Nur Khoiri

RADIKALISME AGAMA

dalam Pandangan Elit MUHAMMADIYAH dan NAHDLATUL ULAMA

SEAP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – INDONESIA

RADIKALISME AGAMA

Dalam Pandangan Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Dr. H. Nur Khoiri M.Ag.

RADIKALISME AGAMA

Dalam Pandangan Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

SEAP
SOUTHEAST ASIAN PUBLISHING

Radikalisme Agama dalam Pandangan Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
Karya Dr. H. Nur Khoiri M.Ag.

Penyunting: Aqil Luthfan
Penata Aksara: Dewi Anggraini
Perancang Sampul: SeAP Studio

ISBN 978-602-53280-5-3

Cetakan Pertama, April 2019

x + 170 hlm.; 21 cm.

Diterbitkan oleh Southeast Asian Publishing
Puri Delta Asri 3 Blok W No. 2 Semarang
Telepon +62-8968-449-7722
Surel: contact@seapublication.com
Website: seapublication.com

©2019
Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Radikalisme agama menjadi ancaman nyata di dunia Islam. Ini terbukti dengan munculnya tindakan kekerasan atas nama agama, utamanya yang dilakukan oleh mereka yang menyatakan diri sebagai ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Jutaan orang telah kehilangan nyawa secara sia-sia, sementara jutaan lainnya harus menjadi pengungsi di negeri-negeri "kafir" Eropa, di mana mayoritas penduduknya beragama non Islam.

Sebagai negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga menghadapi problem radikalisme agama. Sejak Indonesia merdeka tercatat telah muncul kelompok-kelompok radikal yang terlibat konflik baik dengan aparat keamanan maupun dengan kelompok agama Islam atau non Islam yang lain. Tahun 1950an muncul pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), yang dipelopori oleh Karto Suwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Daud Bereuh di Aceh.

Pada masa Orde Baru kelompok-kelompok radikal bergerak di bawah tanah. Secara sembunyi-sembunyi mereka merekrut pengikut-pengikut baru. Setelah era reformasi berbagai kelompok radikal muncul bak jamur di musim hujan. Kelompok-kelompok ini mulai secara lebih sering melakukan serangan bom di kedutaan-kedutaan negara-negara Barat di Indonesia. Serangan juga pada akhirnya diarahkan pada aparat keamanan terutama polisi. Kelompok-kelompok ini pada akhirnya menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat apalagi dengan munculnya ISIS di Suriah yang juga melakukan rekrutmen pengikut di tanah air.

Radikalisme Islam itu bisa tumbuh berkembang atau mati tergantung pada daya dukung masyarakat Muslim. Oleh karena itu memahami persepsi elit Muslim dan sikap mereka terhadap

radikalisme Islam menjadi sangat penting. Dalam masyarakat yang masih hirarkis paternalistik, perilaku elit berpengaruh terhadap perilaku umatnya. Sikap mereka terhadap isu tertentu akan berpengaruh terhadap sikap umatnya terhadap isu tersebut.

Di Jawa Tengah terdapat dua organisasi massa Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah memiliki pengurus yang paralel dengan struktur pemerintahan Indonesia, terdiri dari Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota, Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Propinsi, Pengurus Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang yang berkedudukan di Kecamatan dan Pengurus Ranting yang berkedudukan di Desa. Muhammadiyah juga memiliki lembaga-lembaga otonom seperti Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Karena besarnya jumlah "anggota"/jamaah Muhammadiyah, maka persepsi dan sikap elit ormas ini sangat penting untuk diperhatikan.

Sama dengan Muhammadiyah, NU juga memiliki struktur organisasi yang berjenjang dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Desa. Pengurus di tingkat nasional disebut PB (Pengurus Besar), sedangkan di tingkat Propinsi disebut PW (Pengurus Wilayah), di tingkat Kabupaten atau Kota disebut PC (Pengurus Cabang), di tingkat Kecamatan disebut MWC (Majlis Wakil Cabang) dan di tingkat Desa disebut PR (Pengurus Ranting). NU mengelola beberapa lembaga NU seperti Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang mengurus pendidikan NU. NU juga memiliki badan otonom seperti Muslimat NU yang menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan-perempuan dewasa NU, Fatayat NU yang menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan-perempuan muda NU, IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) yang menyelenggarakan

kegiatan untuk pemberdayaan pelajar perempuan NU, Anshor yang menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan laki-laki muda NU, dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) yang menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan pelajar laki-laki NU.

Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 dan dipelopori oleh KH Ahmad Dahlan merupakan salah satu ormas Islam yang lahir akibat pengaruh dua arus pemikiran di dunia Islam waktu itu, yaitu modernisme dan puritanisme Islam. Modernisme Islam dipelopori oleh para intelektual Muslim di Mesir dan India pada pertengahan abad ke 19 M. Sedangkan puritanisme dikembangkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab di akhir abad ke 18 M. Modernisme Islam yang diadopsi Muhammadiyah terefleksi dalam program-program pendidikan dan sosial yang dikembangkan oleh ormas ini. Muhammadiyah mengembangkan model pendidikan sekolah sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan penambahan mata pelajaran agama. Dalam bidang sosial, Muhammadiyah banyak mendirikan rumah sakit dan panti asuhan yatim piatu. Sementara itu, puritanisme Islam telah membuat Muhammadiyah terlibat dalam usaha-usaha pemberantasan apa yang mereka yakini sebagai tahayul, bid'ah dan khurafat dengan jargon kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU justru lahir sebagai reaksi atas berkembangnya puritanisme Wahhabi di Tanah Air khususnya dan di dunia Islam pada umumnya. Sementara terhadap modernisme yang diusung para modernis Mesir dan India, NU tidak menolaknya, meskipun penerimaannya tidak secepat Muhammadiyah. Dalam prakteknya NU melalui pesantren-pesantrennya mengembangkan pemahaman Islam yang terkenal

dengan ASWAJA (Ahlus Sunnah Waljamaah), dengan mengikuti pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah dalam urusan aqidah dan salah satu dari 4 imam madzhab dalam bidang fiqih.

Sebagai organisasi dengan massa yang besar tidak bisa diabaikan kemungkinan adanya varian dalam sikap para elit baik di Muhammadiyah atau di NU. Pengalaman hidup para elit di kedua ormas tersebut bisa membuat persepsi dan sikap mereka terhadap radikalisme Islam bisa berbeda-beda. Bahkan boleh jadi elit di kedua ormas tersebut memiliki perbedaan persepsi dengan elit di ormasnya, tetapi sama dengan elit di ormas lain.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, maka studi tentang persepsi dan sikap elit Muhammadiyah dan NU Jawa Tengah ini penting untuk dikaji. Buku ini menyajikan data data faktual dari hasil penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi akademik akan peta dan potensi dukungan terhadap radikalisme Islam di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Tengah pada khususnya, yang diketahui menjadi salah satu wilayah "pencetak" para teroris di Indonesia.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL — i
KATA PENGANTAR — v
DAFTAR ISI — ix

BAB I PENDAHULUAN — 1
- A. Latar Belakang — 1
- B. Penegasan Istilah — 4
  1. Persepsi — 4
  2. Sikap — 5
  3. Radikalisme Islam — 6

BAB II RADIKALISME ISLAM DI INDONESIA — 7
- A. Pengertian Radikalisme Islam — 7
- B. Akar Radikalisme Islam Indonesia — 12
- C. Respons terhadap Radikalisme Islam Indonesia — 17
- D. Faktor di Balik Munculnya Radikalisme — 19
- E. Genealogi Radikalisme atau Fundamentalisme — 26
- F. Kontroversi Islam Garis "Keras" — 31
- G. Masa Depan Hubungan Agama-agama — 39
- H. Afiliasi Paham Radikal dalam Lingkungan Perguruan Tinggi — 52
- I. Deradikalisasi Kampus — 55
- J. Roadmap Deradikalisasi — 58

BAB III METODE KAJIAN — 67
- A. Subjek Kajian — 67

B. Pengumpulan Data — 74
C. Metode Analisis — 74
D. Kajian Sebelumnya — 75

BAB IV RADIKALISME ISLAM DALAM PANDANGAN ELIT MUHAMAMDIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA — 79
A. Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa Tengah — 79
B. Persepsi Elit Nahdlatul Ulama Jawa Tengah — 88
C. Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah — 97
D. Sikap Elit Muhammadiyah Jawa Tengah — 107
E. Sikap Elit Nahdlatul Ulama Jawa Tengah — 113
F. Komparasi Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah — 119
G. Pola Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah — 128
H. Pola Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah — 144
I. Model Persepsi dan Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah — 152

BAB V PENUTUP — 163

DAFTAR PUSTAKA — 165

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Radikalisme agama sedang menjadi ancaman nyata di dunia Islam. Ini terbukti dengan munculnya tindakan kekerasan atas nama agama, utamanya yang dilakukan oleh mereka yang menyatakan diri sebagai ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Jutaan orang telah kehilangan nyawa secara sia-sia, sementara jutaan lainnya harus menjadi pengungsi di negeri-negeri "kafir" Eropa, di mana mayoritas penduduknya beragama non Islam.

Sebagai negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga menghadapi problem radikalisme agama. Sejak Indonesia merdeka tercatat telah muncul kelompok-kelompok radikal yang terlibat konflik baik dengan aparat keamanan maupun dengan kelompok agama Islam atau non Islam yang lain. Tahun 1950an muncul pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), yang dipelopori oleh Karto Suwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Daud Bereuh di Aceh.

Pada masa Orde Baru kelompok-kelompok radikal bergerak di bawah tanah. Secara sembunyi-sembunyi mereka merekrut pengikut-pengikut baru. Setelah era reformasi berbagai kelompok radikal muncul bak jamur di musim hujan. Kelompok-kelompok ini mulai secara lebih sering melakukan serangan bom di kedutaan-kedutaan negara-negara Barat di Indonesia. Serangan juga pada akhirnya diarahkan pada aparat keamanan terutama polisi.

Kelompok-kelompok ini pada akhirnya menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat apalagi dengan munculnya ISIS di Suriah yang juga melakukan rekrutmen pengikut di tanah air.

Radikalisme Islam itu bisa tumbuh berkembang atau mati tergantung pada daya dukung masyarakat Muslim. Oleh karena itu memahami persepsi elit Muslim dan sikap mereka terhadap radikalisme Islam menjadi sangat penting. Dalam masyarakat yang masih hirarkis paternalistik, perilaku elit berpengaruh terhadap perilaku umatnya. Sikap mereka terhadap isu tertentu akan berpengaruh terhadap sikap umatnya terhadap isu tersebut.

Di Jawa Tengah terdapat dua organisasi massa Islam terbesar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah memiliki pengurus yang paralel dengan struktur pemerintahan Indonesia, terdiri dari Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota, Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Propinsi, Pengurus Daerah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang yang berkedudukan di Kecamatan dan Pengurus Ranting yang berkedudukan di Desa. Muhammadiyah juga memiliki lembaga-lembaga otonom seperti Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Karena besarnya jumlah "anggota"/jamaah Muhammadiyah, maka persepsi dan sikap elit ormas ini sangat penting untuk diperhatikan.

Sama dengan Muhammadiyah, NU juga memiliki struktur organisasi yang berjenjang dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Desa. Pengurus di tingkat nasional disebut PB (Pengurus Besar), sedangkan di tingkat Propinsi disebut PW (Pengurus Wilayah), di tingkat Kabupaten atau Kota disebut PC (Pengurus Cabang), di tingkat Kecamatan disebut MWC (Majlis Wakil Cabang) dan di tingkat Desa disebut PR (Pengurus Ranting). NU mengelola beberapa lembaga NU seperti Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang mengurus pendidikan NU. NU juga memiliki badan otonom seperti Muslimat NU yang menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan-perempuan dewasa

NU, Fatayat NU yang menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan-perempuan muda NU, IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) yang menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan pelajar perempuan NU, Anshor yang menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan laki-laki muda NU, dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) yang menyelenggarakan kegiatan untuk pemberdayaan pelajar laki-laki NU.

Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 dan dipelopori oleh KH Ahmad Dahlan merupakan salah satu ormas Islam yang lahir akibat pengaruh dua arus pemikiran di dunia Islam waktu itu, yaitu modernisme dan puritanisme Islam. Modernisme Islam dipelopori oleh para intelektual Muslim di Mesir dan India pada pertengahan abad ke 19 M. Sedangkan puritanisme dikembangkan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab di akhir abad ke 18 M. Modernisme Islam yang diadopsi Muhammadiyah terefleksi dalam program-program pendidikan dan sosial yang dikembangkan oleh ormas ini. Muhammadiyah mengembangkan model pendidikan sekolah sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan penambahan mata pelajaran agama. Dalam bidang sosial, Muhammadiyah banyak mendirikan rumah sakit dan panti asuhan yatim piatu. Sementara itu, puritanisme Islam telah membuat Muhammadiyah terlibat dalam usaha-usaha pemberantasan apa yang mereka yakini sebagai tahayul, bid'ah dan khurafat dengan jargon kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU justru lahir sebagai reaksi atas berkembangnya puritanisme Wahhabi di Tanah Air khususnya dan di dunia Islam pada umumnya. Sementara terhadap modernisme yang diusung para modernis Mesir dan India, NU tidak menolaknya, meskipun penerimaannya tidak secepat Muhammadiyah. Dalam prakteknya NU melalui pesantren-pesantrennya mengembangkan pemahaman Islam yang terkenal dengan ASWAJA (Ahlus Sunnah Waljamaah), dengan mengikuti

pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah dalam urusan aqidah dan salah satu dari 4 imam madzhab dalam bidang fiqih.

Sebagai organisasi dengan massa yang besar tidak bisa dibaikan kemungkinan adanya varian dalam sikap para elit baik di Muhammadiyah atau di NU. Pengalaman hidup para elit di kedua ormas tersebut bisa membuat persepsi dan sikap mereka terhadap radikalisme Islam bisa berbeda-beda. Bahkan boleh jadi elit di kedua ormas tersebut memiliki perbedaan persepsi dengan elit di ormasnya, tetapi sama dengan elit di ormas lain.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, maka kajian tentang persepsi dan sikap elit Muhammadiyah dan NU Jawa Tengah ini penting untuk dikaji. Diharapkan dari kajian ini akan diketahui potensi dukungan terhadap radikalisme Islam di Jawa Tengah, yang diketahui menjadi salah satu propinsi "pencetak" para teroris di Indonesia.

B. Penegasan Istilah

Ada beberapa kata kunci dalam buku ini yang perlu dijelaskan pengertiannya agar tidak menimbulkan penafsiran yang ganda atau bahkan berbeda-beda.

1. Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception* yang diambil dari bahasa latin *perceptio* yang berati menerima atau mengambil. (Desmita, 2011: 117). Dalam kamus Bahasa Inggris persepsi berarti penglihatan, tanggapan daya memahami atau menanggapi sesuatu. (Echols, 2005: 424). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, persepsi memiliki artian tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, serapan, dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.(Depdiknas, 2005: 863).

Menurut Sarlito, persepsi merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu, disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. (Sarwono, 1979: 39).

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berujud diterimanya stimulus oleh individu melalui reseptornya. (Walgito, 1989: 53).

Caplin sebagaimana dikutip Desmita, mengartikan persepsi sebagai proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indra.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh sistem indra manusia. Jadi pada dasarnya persepsi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang ada di lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah individu mengindrakan objek di lingkungannya, kemudian ia memproses hasil pengindraan itu, sehingga timbullah makna tentang objek itu. (Desmita, 2011: 117-118)

2. Sikap

Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.

Sikap memiliki tiga komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan dan perilaku. Keyakinan bahwa "diskriminasi itu salah" merupakan sebuah pernyataan evaluatif. Opini semacam itu merupakan komponen kognitif dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap-komponen afektifnya. Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap dan tercermin dalam pernyataan seperti "Saya tidak menyukai John karena ia mendiskriminasi orang-orang minoritas." Akhirnya, perasaan bisa menimbulkan hasil akhir dari perilaku. Komponen perilaku dari sebuah sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam acara tertentu

terhadap seseorang atau sesuatu. (id.m.wikipedia.org/wiki/Sikap. Dikutip 21 September 2016)

3. Radikalisme Islam

Yang dimaksudkan dengan radikalisme Islam adalah keyakinan ideologis yang diikuti dengan fanatisme yang tinggi mendorong pada perjuangan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung dengan tatanan nilai dan sistem yang diyakini bersumber dari ajaran Islam. (Jamhari, 2004: 2-3)

Jamhari (Jamhari, 2004: 6-8) menyebut beberapa karakteristik "Islam radikal":

a. Mereka masih sering menunjukkan mentalitas "perang Salib"
b. Penegakan hukum Islam yang juga sering diupayakan dengan keras oleh kalangan "*revivalis*" dan "*fundamentalis*" Muslim tidak lagi dianggap sebagai sebuah jalan alternatif melainkan menjadi sebuah "keharusan".
c. Terdapat kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah berikut sistem-sistemnya yang mapan, tetapi dianggap tidak "sah", khususnya karena kurangnya perhatian terhadap masalah "penyakit sosial" masyarakat yang mereka identifikasi sebagai "maksiat" dan "kemungkaran"
d. Semangat untuk menegakkan agama sebagai lambang supremasi kebenaran ajaran Tuhan di dunia dengan jalan "jihad" dengan sendirinya mendapatkan tempat yang sangat terhormat.
e. Penganut Yahudi dan Kristen dianggap sebagai memiliki kesatuan tujuan dalam melakukan konspirasi melawan Islam dan Dunia Islam.

BAB II
RADIKALISME ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Radikalisme Islam

Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian (Nurcholis Madjid, 1995: 260). Sementara yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995:124). Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan, serta paham politik. Tetapi memang tidak bisa dibantah bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan paham keagamaannya secara kaku yang dalam bahasa peradaban global sering disebut kaum radikalisme Islam.

Radikalisme sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, merujuk pada pendapat Theodorson dan Theodorson (1979:330) ada dua pemaknaan sosiologis terhadap pengertian radikalisme yaitu: (1) pendekatan yang non-kompromis terhadap permasalahan sosial dan politik yang dinampakkan oleh ketidakpuasan yang ekstrim terhadap status quo, sehingga mengubahnya secepat mungkin. Kelompok ekstrim kanan atau ekstrim kiri termasuk dalam kriteria radikal; (2) Ideologi non-kompromis ini berfokus pada inovasi, perubahan dan kemajuan, sehingga berbeda dengan nilai-nilai yang ada sebelumnya. Berdasar perspektif politik, Baradat (1994:16) menyatakan bahwa

pengertian radikalisme mengacu pada seseorang atau kelompok yang secara ekstrim tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada, sehingga tidak sabar untuk menanti perubahan yang fundamental.

Istilah radikalisme untuk menyebut kelompok garis keras dipandang lebih tepat ketimbang fundamentalisme, karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang *interpretable*. Dalam perspektif Barat, fundamentalisme berarti paham orang-orang kaku ekstrim serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara dalam perspektif Islam, fundamentalisme berarti *tajdid* (pembaruan) berdasarkan pesan moral Al-Quran dan Sunnah (Imarah, 1999:22). Dalam tradisi pemikiran teologi keagamaan, fundamentalisme merupakan gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku dalam tatanan kehidupan umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah (Watt, 1998:2). Fundamentalisme juga berarti anti-pembaratan (westernisme) (Rahman, 1982:136). Terkadang fundamentalisme diartikan sebagai radikalisme dan terorisme disebabkan gerakan fundamentalisme memiliki implikasi politik yang membahayakan negara-negara industri di Barat (Kuntowijoyo, 1997: 49).

Sebutan fundamentalis memang terkadang bermaksud untuk menunjuk kelompok pengembali (revivalis) Islam (Gibb, 1990:52). Tetapi terkadang istilah fundamentalis juga ditujukan untuk menyebut gerakan radikalisme Islam. Di media Barat, fundamentalisme berarti intoleran dan kekerasan yang ditopang fanatisme keagamaan (Ahmed, 1993:30). Sebutan untuk memberikan label bagi gerakan radikalisme bagi kelompok Islam garis keras juga bermacam-macam. M.A. Shaban menyebut aliran garis keras (radikalisme) dengan sebutan neo-Khawarij (Shaban, 1994:56). Sedangkan Harun Nasution menyebutnya dengan sebutan Khawarij abad keduapuluh satu (abad ke-21) karena memang jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah

dengan menggunakan kekerasan sebagaimana dilakukan Khawarij pada masa pasca-*tahkim* (Nasution, 1995:125). Istilah radikalisme Islam berasal dari pers Barat untuk menunjuk gerakan Islam garis keras (ekstrim, fundamentalis, militan). Istilah radikalisme merupakan kode yang terkadang tidak disadari dan terkadang eksplisit bagi Islam (Ahmed, 1993: 30). Yang menjadi masalah di Barat dan Amerika sebenarnya bukan Islam itu sendiri tetapi praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok komunitas Muslim dalam proses pembentukan jati diri (identitas) kelompoknya (Nurcholish Madjid, 1995:270).

Menurut Afif Muhammad, radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar, dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau 'hingga ke akar-akarnya'. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah 'pemikiran yang radikal' dan bisa pula 'gerakan'. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik. (Afif, Muhammad, "Akar-akar Gerakan Islam Radikal" http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0103/24-/0801.htm)

Dengan demikian, penulis lebih cenderung menggunakan istilah radikalisme daripada fundamentalisme karena pengertian fundamentalisme dapat memiliki arti- arti lain yang terkadang mengaburkan makna yang dimaksudkan sedang radikalisme dipandang lebih jelas makna yang ditunjuknya yaitu gerakan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai target politik yang ditopang oleh sentimen atau emosi keagamaan.

Radikalisme agama berarti tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang cenderung menimbulkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Misalnya saja *sweeping* dan razia atas tempat-tempat seperti perjudian, diskotik dan pelacuran; demonstrasi dan perusakan kantor lembaga- lembaga tertentu, pengerahan massa

dengan simbol dan atribut keagamaan tertentu, pernyataan politik dengan tendensi dan ancaman tertentu, orasi dengan substansi yang bertendensi mengobarkan kekerasan dan sebagainya.

Islam radikal merupakan sebuah paham keislaman yang menginginkan dilakukannya perubahan sosial politik sesuai dengan syariat Islam, yang dilakukan dengan cara keras dan drastis. Islam radikal merupakan aliran dalam Islam yang mencita-citakan terlaksananya syariat Islam dalam kehidupan sosial politik. Dan untuk mencapai cita-cita itu dilakukan tindak-tindak kekerasan yang drastis (Afif, Muhammad, "Akar-akar Gerakan Islam Radikal" http://www.pikiran-rakyat.com-/cetak/0103/24/0801.htm).

Radikalisme merupakan gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosio-politik dan sosio-historis. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam itu, secara historis-sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial politik ketimbang gejala keagamaan meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan. Fenomena radikalisme yang dilakukan oleh sebagian kalangan umat Islam, oleh pers Barat dibesar-besarkan, sehingga menjadi wacana internasional dan terciptalah opini publik bahwa Islam itu mengerikan dan penuh dengan kekerasan. Akibatnya tidak jarang image-image negatif banyak dialamatkan kepada Islam sehingga umat Islam terpojokkan sebagai umat perlu dicurigai. Hal yang demikian terjadi karena masyarakat Barat mampu menguasai pers yang dijadikan instrumen yang kuat guna memroyeksikan kultur dominan dari peradaban global. Apa yang ditangkap masyarakat dunia adalah apa yang didefinisikan dalam media-media Barat. Label Islam untuk menyebut gerakan fundamentalis sangat menyenangkan bagi pers Barat ketimbang label Tamil di Sri Langka, militan Hindu di India, IRA (kelompok bersenjata Irlandia Utara), militan Yahudi sayap kanan, sekte kebatinan di Jepang atau bahkan musuh lamanya, komunis-

marxis yang tidak jarang menggunakan jalan kekerasan sebagai solusi penyelesaian masalah. Karena terlalu mengkaitkan kata-kata radikalisme, fundamentalis, atau gerakan militan dengan Islam, seringkali media Barat mengabaikan perkembangan praktik kekerasan yang ditopang keyakinan keagamaan yang dilakukan oleh kalangan non-Islam atau pun yang ditopang oleh ideologi "kiri." Contoh yang sangat jelas adalah aksi tutup mulut para elit politik Barat atau aksi bicara dalam kepura-puraan ketika melihat praktik kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi ataupun serdadu Israel atas orang-orang Arab Palestina. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pelaku kekerasan ini secara faktual sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok pelaku garis keras "radikalisme Islam." Tetapi sebutan radikalisme lebih kental ditujukan kepada gerakan Islam. Hal inilah yang ditolak oleh gerakan negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) dalam pertemuannya di Kuala Lumpur Malaysia tanggal 1–3 April 2002.

Realitas historis-sosiologis tersebut merupakan bukti betapa Barat menggunakan standar ganda dan bersikap tidak adil terhadap Islam. Ketika masjid dan Mullah dilihat sebagai simbol radikalisme atau ketika gejala-gejala kultural Muslim diproyeksikan sebagai bentuk fanatisme dan ekstrimisme, terjadilah pengekangan dan pemenjaraan peradaban Islam. Masyarakat Barat telah memberikan klaim peradaban atas Islam, sementara proses peradaban Islam sedang membentuk jatidirinya. Hal yang demikian tidak berarti pembenaran perilaku radikalisme yang dilakukan umat Islam, karena apapun alasannya praktik kekerasan merupakan pelanggaran norma keagamaan sekaligus pelecehan kemanusiaan.

Dengan demikian, jelas bahwa label radikalisme yang dialamatkan oleh Barat kepada Islam merupakan pelecehan agama karena di dalam Islam tidak ada perintah menuju kekerasan. Istilah salah kaprah itu sesungguhnya tidak perlu terjadi jika Barat mau mengkaji Islam secara objektif bahwa *Islam normatif*

terkadang tidak diimplementasikan oleh sekelompok Muslim dalam konteks historis-sosiologis. Islam berbeda dengan perilaku Muslim, artinya kebrutalan (radikalisme) yang dilakukan oleh sekelompok Muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai biang keladi radikalisme. Sebaliknya, kelompok-sekelompok kecil umat Islam yang fanatik dan mengarah kepada benturan dan kekerasan juga menjadi bahaya besar bagi masa depan peradaban manusia. Gerakan radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok orang, termasuk Muslim, merupakan kanker rohani yang kronis yang mengancam manusia dan kemanusiaan. Diluar itu semua, praktik-praktik arogansi Barat dan hegemoninya atas dunia Islam harus juga disadari sebagai faktor yang dapat menimbulkan reaksi dalam bentuk radikalisme anti-Barat yang dilakukan oleh sebagian komunitas Muslim.

B. Akar Radikalisme Islam Indonesia

Berubahnya sistem pasca runtuhnya Orde Baru 1998 membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan berbagai elemen bangsa, termasuk didalamnya perkembangan Islam. Bentuk Islam di Indonesia menjadi sangat beragam. Keragaman ini tercermin dari jumlah organisasi keislaman dan kelompok kepentingan atas nama Islam yang dari waktu ke waktu semakin bervariasi.

Peter G. Riddel membagi menjadi empat kekuatan Islam Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru, yaitu; modernis*, tradisionalis, neo-modernis* dan *Islamis*. Secara umum, Riddel sepaham terhadap definisi masing-masing kategori dengan mengabaikan satu kategori dari Woodward, yaitu *indigenized Islam.* Bagi Riddel, masing-masing kategori memiliki ciri khasnya sendiri dalam menanggapi berbagai isu krusial ditahun-tahun periode pertama pasca pemilu pertama runtuhnya Orde Baru, yaitu tahun 1999. Isu-isu tersebut antara lain kembali ke Piagam Jakarta, krisis Maluku, membuka hubungan dagang Israel, negara Indonesia federal, tempat kaum minoritas dalam sistem

negara Indonesia, presiden perempuan, dan partai politik yang baru dibuka krannya setelah Orde Baru runtuh (Riddel, 2002: 65-83).

Pengelompokan yang dilakukan oleh Riddel diatas bila dilihat dari sisi penafsiran dapat dipersempit menjadi dua pengelompokan saja, yaitu liberal-moderat dan radikal atau fundamental. Islam liberal dan moderat dengan penafsiran terbuka terhadap ajaran Islam, sekalipun tidak sama persis, sedangkan Islam radikal atau fundamentalisme miliki paham penafsiran tertutup. Beberapa kelompok Islam seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) NU, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), adalah beberapa kelompok Islam yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok Islam yang beraliran terbuka.

Selain Islam liberal, Islam garis keras atau Islam radikal banyak menikmati perubahan politik di Indonesia ini. Islam radikal ini telah berkembang menjadi salah satu kelompok gerakan Islam baru yang mempunyai arti penting di Indonesia. Berbagai kelompok Islam radikal ini muncul. Sebagian adalah gerakan Islam yang berskala internasional seperti gerakan Salafi dan Hizbut Tahrir. Sebagian yang lain adalah gerakan berskala nasional seperti Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Laskar Mujahidin, Ikhwanul Muslimin Indonesia. Selain itu muncul gerakan Islam radikal lokal seperti Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS) di Surakarta dan Front Thariqah Jihad (FTJ) di Kebumen.

Radikalisme atau fundamentalisme tidaklah muncul dari ruang hampa. Dalam teori sosial, radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain. Dalam pandangan kaum fakta sosial bahwa ada tiga asumsi yang mendasari keseluruhan cara berpikirnya, yaitu terdapat keajegan atau terdapat keteraturan sosial (*social order*), terdapat perubahan sekali waktu dan tidak ada fakta yang berdiri sendiri kecuali ada fakta

penyebabnya. Akar radikalisme dapat ditilik dari beberapa penyebab, antara lain:

Pertama, adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya. Di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoritarianisme (Azyumardi Azra, 1996:18). Dalam kasus Orde Baru, negara selalu membabat habis yang diidentifikasi sebagai gerakan radikal. Baginya radikalisme adalah musuh nomer satu dan dijadikan sebagai *common enemy* melalui berbagai media transformasi. Radikalisme kiri dan kanan sama saja. Radikalisme kiri seperti Gerakan *New Left*, yang pernah berkembang di Indonesia sekitar tahun1980-an dan terus memperoleh momentum di tahun 1990-an melalui Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan eksponen organisasi yang dianggap sebagai musuh negara. Begitu kerasnya tekanan terhadap gerakan radikal kiri ini, banyak para tokohnya yang ditangkap, disiksa, bahkan ada yang hilang tidak tentu rimbanya. Orde Baru juga sangat keras terhadap radikalisme kanan. Diantara yang paling menonjol adalah isu Komando Jihad di pertengahan tahun 1980-an. Banyak tokoh Islam yang diidentifikasi sebagai pemimpin atau anggota Komando Jihad yang ditangkap dan ditahan. Usaha untuk memberangus gerakan-gerakan radikal Islam itupun terus berlangsung sampai periode munculnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di pertengahan tahun 1990-an. Abdul Aziz Thaba membuat tipologi hubungan antara Islam dan Negara dalam tiga kategori, yaitu hubungan antara Islam dan Negara yang bercorak antagonistis, resiprokal kritis, dan hubungan antara Islam dan Negara yang saling membutuhkan. Hubungan antagonistis terjadi di awal Orde Baru sampai awal tahun 1980-an dan hubungan simbiosis terjadi diera tahun 1990- an (Abdul Aziz Thaba, 1995). Diera reformasi, jika gerakan radikal kiri berada dalam keadaan mati suri, tidak demikian halnya dengan gerakan radikalisme kanan. Setelah kran-kran kebebasan demokrasi dibuka, tidak serta merta membuat

gerakan radikal ini surut, bahkan tumbuh subur, seperti munculnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Salafi, Laskar Jundullah, Laskar Jihad, Gerakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Negara Islam Indonesia (NII) dan berbagai agama bercorak lokal adalah sebuah potret merebaknya gerakan-gerakan keagamaan ini.

Kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Lebih tepat dikatakan hal itu sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama (wahyu suci yang absolut), karena gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad, dan mati sahid. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, yakni nisbi dan subjektif.

Keterlibatan faktor emosi keagamaan ini nyata ditunjukkan dengan terjadinya kerusuhan massal diawal reformasi, ratusan gereja dan tempat usaha etnis Cina dibakar, dirusak, dan dijarah. Pada bulan Mei 1998 kerusuhan bernuansa SARA menewaskan lebih dari 1000 orang. Kerusuhan Timor Timur, Poso, Ambon, Sambas, dan lainnya adalah sebagian dari daftar panjang kerusuhan yang dilatari oleh konflik agama dan etnik (Budhy Munawar-Rahman, 2010: LVII). Kekerasan yang baru saja terjadi misalnya kekerasan kelompok FPI dengan Ahmadiyah di Cikeusik, kerusuhan di Temanggung, Lombok, dan kerusuhan Syi'ah dan NU di Madura yang berlatar agama.

Ketiga, faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, sebagaimana diungkapkan Musa Asy'ari (Musa Asy'arie, 1992:95), bahwa di dalam masyarakat selalu diketemukan usaha untuk melepaskan diri

dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesis terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya Muslim. Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia. Barat telah dengan sengaja melakukan proses marjinalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan Muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Barat dengan sekularismenya sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa Timur dan Islam sekaligus dianggap bahaya terbesar dari keberlangsungan moralitas Islam. Hal ini bisa dilihat dari perubahan- perubahan sehari-hari, seperti semakin masifnya pola konsumsi umat beragama pada produk-produk Barat, misalnya ATM, handphone, internet, dan produk global lainnya (Zuly Qodir, 2011:23).

Gerakan radikal di Indonesia disinyalir Yudi Latif karena mereka tidak menerima perbedaan. Perbedaan yang muncul di masyarakat dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi kaum radikal. Mereka berasumsi bahwa untuk menunjukkan eksistensi mereka maka mereka harus mengeliminasi eksistensi orang lain. Teroris berani mati karena mereka menganggap perbedaan adalah musuh dan ancaman yang harus dihancurkan. "Teroris berani mati, tetapi tidak berani hidup, mereka adalah musuh kehidupan" (Mukhlisin, 9 Maret 2012).

Keempat, faktor ideologis anti-westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidak

mampuan mereka dalam memosisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Yudi Latif menandaskan, munculnya terorisme disebabkan karena tidak berjalannya *sense of conception of justice.* Teroris muncul karena munculnya skeptisisme terhadap demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai sistem negara kafir (Mukhlisin, 9 Maret 2012).

Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidak mampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini elit-elit pemerintah di negeri-negeri Muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Hal yang demikian diungkapkan oleh Mahathir Muhammad dalam sambutannya pada acara pertemuan negara-negara OKI di Kuala Lumpur Malaysia tanggal 1–3 April 2002 (SOLOPOS, 2002:4). Di negeri ini bisa dilihat tidak tuntasnya penyelesaian masalah korupsi, aset negara yang banyak lari ke luar negeri, pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia, dan disedotnya kekayaan negara oleh konspirator politik.

Disamping itu, *keenam,* faktor media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Propaganda-propaganda lewat pers memang memiliki kekuatan dahsyat dan sangat sulit untuk ditangkis sehingga sebagian "ekstrim" yaitu perilaku radikal sebagai reaksi atas apa yang ditimpakan kepada komunitas Muslim. Lihat misalnya film Fitna, penggambaran tentang kiamat (film *2012*), dan lainnya.

C. Respons terhadap Radikalisme Islam Indonesia

Akibat media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat Islam menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Di samping Muslim sendiri

masih belum selesai menata identitas diri, tema-tema yang diusung kelompok Islam radikal kerap kali menerapkan syariah Islam dalam negara yang dinilai Barat sangat "menakutkan". Tema tersebut akan berakibat kepada kecurigaan dunia internasional yang merugikan bagi bangsa Indonesia, apalagi bila dihadapkan pada pelaku bom alumni Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki Surakarta; Muchlas alias Ali Gufron, Amrozi, Fathurrahman al-Ghazi (ditangkap di Filipina), Asmar Latinsani (pelaku bom bunuh diri JW Mariot), dan lain-lain.

Kekerasan bukanlah tipe agama-agama. Agama selalu menerapkan doktrin keselamatan dan kesejahteraan. Peter L. Berger sebagaimana dikutip Nur Syam, menawarkan dua konsep penting supaya tidak terjadi kekerasan agama, *religious revolution,* dan *religion subcultures* (Nur Syam, 2005: 94). Arahan pertama terkait dengan bagaimana elite agama dapat menumbuhkan dengan cepat kesadaran akan pentingnya model agama yang modern. Di dalam agama yang modern ditandai dengan adanya penghargaan terhadap pluralitas yang tidak vakum diversitas dan vakum budaya. Manusia hidup dalam entitas yang heterogen. Maka agama akan menjadi *mode of communication* yang tidak hanya vertikal tetapi juga horizontal. Agama sebagai model komunikasi berarti menuntut kesepahaman dan mengakui perbedaan dalam banyak hal tetapi juga memiliki kesamaan misi kemanusiaan.

Religion subcultures yaitu gerakan elit agama untuk mencegah pengaruh luar agama masuk ke dalam wilayah agama. Faktor ekonomi dan politik adalah dua faktor yang sering mengintervensi kehidupan keberagamaan. Agama sebenarnya merupakan persoalan moralitas dan politik ekonomi merupakan persoalan yang profan. Keduanya harus diletakkan dalam wilayah yang berbeda.

D. Faktor di Balik Munculnya Radikalisme

Radikalisme yang sering kali dibungkus dengan aliran agama, ternyata masih mewarnai tindakan terorisme di Indonesia. Kasus bom bunuh diri (bom di Marriott Dubes Australia, Bom Bali I & II dan yang lainnya), konflik yang berbau sentimen agama di Poso, Maluku, dan yang lainnya, semakin memperjelas bahwa adanya korelasi antara radikalisme di masyarakat dengan doktrin agama.

Faktor Kemiskinan

Dalam kacamata intelektual kampus, radikalisme yang berbasis kelompok agama terkait erat dengan kemiskinan. Selama kemiskinan masih melekat dalam irama kehidupan rakyat, radikalisme akan beranak pinak. Pandangan tersebut, memang sangat realistis dengan kenyataan yang terjadi. Hal itu bisa dilihat dari berkembangnya radikalisme di seluruh pelosok dunia, ternyata lebih marak terjadi di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Bentuk radikalisme tersebut sering terjadi dalam bentuk pemberontakan sebagian masyarakat yang kecewa terhadap pemerintahannya yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya, perang saudara antar-etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang lainnya. Semua itu tidak terlepas dari usaha masyarakat untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi lebih baik (sejahtera) dari keadaan kemiskinan yang menimpanya.

Di negara-negara maju sangat jarang terjadi radikalisme dengan latar masalah ekonomi (kemiskinan). Meskipun di negara maju tidak sepenuhnya bersih dari tindakan radikalisme, namun motif radikalisme di negara maju mempunyai latar belakang yang berbeda dengan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Dalam ajaran Islam juga dijelaskan

bahwa timbulnya kekufuran (termasuk radikalisme masyarakat) itu bisa terjadi karena kemiskinan. Karena pada dasarnya kemiskinan bisa menyebabkan manusia untuk berbuat kufur.

Keadaan rakyat Indonesia sampai dengan saat ini masih dililit dengan problem kemiskinan. Bank Dunia memperhitungkan 108,78 juta orang atau 49 persen dari total penduduk Indonesia dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Kalangan ini hanya hidup dengan kurang dari 2 dolar AS atau sekitar Rp. 19.000 per hari (Kompas, 8 Desember 2006).

Kondisi Indonesia seperti ini memang sangat rentan timbulnya radikalisme. Menurut kalangan intelektual kampus untuk menghentikan radikalisme di masyarakat perlu ada usaha dari seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peran ulama dan pemerintah sangat penting dalam melakukan misi suci ini. Ulama (da'i dan para guru/dosen) bisa terus mengarahkan masyarakat dan para siswa/mahasiswanya, untuk menciptakan masyarakat dan generasi mudanya, untuk mengasah bakat di suatu bidang (profesional) dan berbuat jujur dalam bidangnya. Begitu juga pemerintah sebagai pelayan masyarakat, harus bisa menciptakan iklim perekonomian yang stabil. Dengan semua usaha itu, masyarakat Indonesia bisa terhindar dari problem kemiskinan yang berkepanjangan. Radikalisme pun akan bisa diminimalisasi.

Faktor Kebodohan

Keterpurukan ekonomi yang dialami oleh sebagian lapisan masyarakat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengenyam pendidikan. Hal ini akan berakibat keterpurukan inteligensi dan pengetahuan bagi warga yang kurang mampu. Mereka tidak akan cukup dibekali oleh ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Juga akan lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari pihak lain. Termasuk juga akan mudah diprovokasi oleh paham-paham radikal.

Hal ini dianggap oleh sebagian besar orang terjadi karena kegagalan pemerintah dalam merealisasikan program-program pendidikannya. Program wajib belajar 9 tahun misalnya, mungkin bagi sebagian masyarakat masih terjangkau untuk dipenuhi. Namun bagi rakyat miskin, program tersebut cukup sulit untuk dipenuhi. Karena bagi mereka mempertahankan kelangsungan hidup lebih penting, sehingga kebutuhan akan pendidikan mereka sampingkan. Meski pemerintah juga telah memberikan fasilitas dana BOS bagi setiap siswa di Indonesia, namun dana yang diberikan itu belum cukup untuk membayarkan biaya-biaya tambahan yang sering dibebankan oleh sekolah. Seperti biaya tunjangan pembangunan, sarana prasarana, les tambahan, buku pelajaran, dll. Parahnya lagi, marak terjadi kasus-kasus penyelewengan dana BOS oleh oknum-oknum tertentu yang berakibat tidak tersalurkannya hak para siswa.

Maka dari itu, sudah jadi hal maklum jika banyak generasi muda saat ini tidak banyak mengenyam pendidikan dan sudah tentu menjadi tugas pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat untuk membela rakyat-rakyat kecil. Sehingga akan tercapai kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Selain itu, tingkat pemahaman agama yang rendah juga dapat mengakibatkan lebih rentan terpengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Misalnya saja mengenai ajaran jihad. Jihad sendiri berasal dari kata Arab artinya bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dalam rangka beribadah mencari ridho Allah. Namun ada beberapa kelompok yang terus saja memaksakan paham bahwa jihad dalam Islam yang hukumnya wajib haruslah dipenuhi dengan berperang. Padahal sesungguhnya jihad di jaman ini tidak harus selalu dengan cara berperang, namun bisa berupa usaha mencari nafkah secara halal demi keluarga. Generasi muda mencari ilmu demi masa depannya. Seorang pedagang yang jujur tidak mengurangi timbangan. Jadi jihad itu banyak macamnya bukan dengan terror dan aksi bom bunuh diri karena itu makin mengotori wajah Islam dimata dunia.

Faktor Politik

Stabilitas politik yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat adalah cita-cita semua negara. Kehadiran para pemimpin yang adil, berpihak pada rakyat, tidak semata hobi bertengkar dan menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat, tentu akan melahirkan kebanggaan dari ada anak negeri untuk selalu membela dan memperjuangkan negaranya. Mereka akan sayang dan menjaga kehormatan negaranya baik dari dalam maupun dari luar.

Namun sebaliknya jika politik yang dijalankan adalah politik kotor, politik yang hanya berpihak pada pemilik modal, kekuatan-kekuatan asing, bahkan politik pembodohan rakyat, maka kondisi ini lambat laun akan melahirkan tindakan skeptis masyarakat. Akan mudah muncul kelompok- kelompok atas nama yang berbeda baik politik, agama ataupun sosial yang mudah saling menghancurkan satu sama lainnya.

Bukankah kita pernah membaca sejarah lahirnya gerakan Khawarij pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib RA. yang merupakan mascot gerakan terorisme masa lalu yang juga disebabkan oleh munculnya stigma ketidakstabilan dan ketidakadilan politik pada waktu itu. Sehingga munculah kelompok-kelompok yang saling mengklaim paling benar, bahkan saling mengkafirkan satu sama lainnya. Tentu kita tidak ingin sejarah itu terulang kembali saat ini.

Faktor Pendidikan

Sekalipun pendidikan bukanlah faktor langsung yang dapat menyebabkan munculnya gerakan terorisme, akan tetapi dampak yang dihasilkan dari suatu pendidikan yang keliru juga sangat berbahaya. Pendidikan agama khususnya yang harus lebih diperhatikan. Ajaran agama yang mengajarkan toleransi, kesantunan, keramahan, membenci pengrusakan, dan menganjurkan persatuan tidak sering didengungkan. Retorika pendidikan yang

disuguhkan kepada ummat lebih sering bernada mengejek daripada mengajak, lebih sering memukul daripada merangkul, lebih sering menghardik daripada mendidik. Maka lahirnya generasi umat yang merasa dirinya dan kelompoknyalah yang paling benar sementara yang lain salah maka harus diperangi, adalah akibat dari sistem pendidikan kita yang salah. Sekolah-sekolah agama dipaksa untuk memasukkan kurikulum-kurikulum umum, sementara sekolah umum alergi memasukkan kurikulum agama.

Dan tidak sedikit orang-orang yang terlibat dalam aksi terorisme justru dari kalangan yang berlatar pendidikan umum, seperti dokter, insinyur, ahli teknik, ahli sains, namun hanya mempelajari agama sedikit dari luar sekolah, yang kebenaran pemahamananya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Atau dididik oleh kelompok Islam yang keras dan memiliki pemahaman agama yang serabutan.

Demikianlah penjabaran enam faktor penyulut terorisme, semoga dapat bermanfaat. Tugas kita ke depan tentu sangat berat, maka diperlukan kerjasama yang sinergis antara semua elemen bangsa, baik ulama, pemerintah, dan masyarakat untuk mengikis tindakan terorisme sampai ke akar-akarnya. Paling tidak langkah itu dapat dimulai dengan cara meluruskan pahampaham keagamaan yang menyimpang oleh ulama, menciptakan keadilan dan stabilitas ekonomi dan politik oleh pemerintah. Serta menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya tatanan masyarakat yang damai, toleran, aman, merdeka, religius, bertaqwa dan memiliki semangat kecintaan tanah air yang kuat.

Dengan langkah ini kita memohon kepada Allah Swt, semoga bangsa dan negara kita terlindung dari bahaya terorisme, sesuai dengan janji dan spirit al-Qur'an: Yang artinya: Seandainya penduduk suatu kaum itu beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan pintu berkah kepada mereka dari arah langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan

(agama), maka akan kami binasakan mereka akibat dari perbuatannya itu sendiri (Q.S. al-A'raf: 69).

Faktor Psikologi

Faktor ini sangat terkait dengan pengalaman hidup individual seseorang. Pengalamannya dengan kepahitan hidupnya, lingkungannya, kegagalan dalam karir dan kerjanya, dapat saja mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan anarkis. Perasaan yang menggunung akibat kegagalan hidup yang dideranya, mengakibatkan perasaan diri terisolasi dari masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung tanpa adanya pembinaan dan bimbingan yang tepat. Orang tersebut akan melakukan perbuatan yang mengejutkan sebagai reaksi untuk sekedar menampakkan eksistensi dirinya.

Dr. Abdurrahman al-Mathrudi pernah menulis, bahwa sebagian besar orang yang bergabung kepada kelompok garis keras adalah mereka yang secara pribadi mengalami kegagalan dalam hidup dan pendidikannya. Mereka inilah yang harus kita bina, dan kita perhatikan. Maka hendaknya kita tidak selalu meremehkan mereka yang secara ekonomi dan nasib kurang beruntung. Sebab mereka ini sangat rentan dimanfaatkan dan di-*brain washing* oleh kelompok yang memiliki target terorisme tertentu.

Doktrin Radikalisme

Ralp Dahrendorf, pelopor sosiologi konflik, menjelaskan radikalisme dengan mengacu pada pemikiran Karl Marx. Disetiap pergantian zaman, radikalisme selalu dimotori oleh kelompok yang kondisi ekonominya relatif lebih baik. Kelompok ini merasa dipinggirkan dalam proses perubahan yang sedang berlangsung. Muncul kekecewaan bercampur kebencian kepada rezim yang berkuasa, yang dianggap memblokir peluang mobilitas sosial mereka.

Dalam hal ini, kesenjangan antara harapan dan kenyataan merupakan bahan bakar radikalisme. Dahrendorf berpendapat

kelompok miskin cenderung apatis (The Politics of Frustration, Oktober 2005).

Hasil penelitian Dr. Marc Sageman, psikiater forensic AS, sangat membantu menjelaskan hal tersebut. Sageman mengambil sampel biografi 400 anggota Al-Qaeda maupun jaringannya. Hasilnya dituangkan dalam buku *Understanding Terror Networks* (2004). Menariknya, Sageman adalah mantan anggota CIA yang bertugas di Pakistan tahun 1980-an. Biografi yang dikumpulkan Sageman sebagian besar warga Arab, komunitas imigran Eropa Barat, dan warga Indonesia dan Malaysia. Mereka ternyata bukan berasal dari negara termiskin. Lebih mengejutkan lagi, tidak ada satupun dari 400 sampel yang berasal dari Afghanistan, salah satu negara termiskin di dunia.

Dalam kaitannya dengan latar belakang sosial-ekonomi, tiga perempat berasal dari keluarga kelas atas dan menengah. Mereka lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang rukun, penuh perhatian terhadap anak, taat beragama, dan menaruh perhatian terhadap masalah kemasyarakatan. Sekitar 60 persen sampel pernah menjadi mahasiswa. Padahal, di negara asal imigran tersebut tidak semua orang berkesempatan untuk masuk perguruan tinggi. Umumnya mereka bergabung dengan organisasi teroris pada usia rata-rata 26 tahun. Tiga seperempat sudah menikah dan sangat bertanggungjawab kepada keluarga.

Dari keseluruhan sampel tidak ditemukan "pencucian otak" oleh keluarga maupun pendidikan. Sekitar 50 persen mereka sejak kecil sudah menekuni agama. Hanya 13 persen dari sampel, yang hampir semua dari Asia Tenggara, mengikuti pendidikan di pondok pesantren.

Hal yang menarik lainnya, 70 persen diantara mereka bergabung dalam jihad global ketika di perantauan. Sekitar 10 persen lagi adalah imigran baru Arab magrib di Eropa. Dengan demikian, lebih kurang 80 persen terasing di negeri rantau, terputus dari ikatan sosial budaya asli, dan jauh dari sanak keluarga.

Data-data di atas menunjukkan bahwa radikalisme lahir tidak hanya karena kesenjangan ekonomi (kemiskinan) tetapi juga karena ideologi tertentu, khususnya yang bersumber dari doktrin agama. Jika sebagian pelaku terorisme di Indonesia kebetulan berasal dari keluarga miskin dan terdorong oleh suatu ideologi, maka terdoronglah keinginan untuk meluluhlantakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

E. Genealogi Radikalisme atau Fundamentalisme

Radikalisme atau fundamentalisme tidak muncul dari ruang hampa. Mengikuti faham kaum fakta social, bahwa radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain.[1] Genealogi radikalisme (Happy Susanto, 10/9/2003) dapat ditilik dari beberapa penyebab antara lain, yaitu: *pertama*, tekanan politik penguasa. Radikalisme atau fundamentalisme muncul disebabkan oleh tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya. Di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia, fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoriterisme. Dalam kasus Orde Baru, Negara selalu membabat habis yang diidentifikasi sebagai gerakan radikal. Baginya, radikalisme adalah musuh nomor satu dan dijadikan sebagai *common enemy* melalui berbagai media transformasi. Radikalisme kiri dan kanan sama saja. Radikalisme kiri seperti Gerakan New Left, yang pernah berkembang di Indonesia di tahun 1980-an dan terus memperoleh momentum di tahun-tahun 1990-an melalui Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan eksponen organisasi yang dianggap sebagai musuh negara. Begitu kerasnya tekanan terhadap gerakan kiri radikal ini, maka banyak tokohnya yang ditangkap, disiksa dan bahkan ada yang hilang tidak tentu rimbanya. Di era reformasi, gerakan-gerakan kiri

[1] Dalam pandangan kaum fakta social bahwa ada tiga asumsi yang mendasari keseluruhan cara berpikirnya, yaitu: terdapat keajegan atau terdapat keteraturan social (*social order*), terdapat perubahan sekali waktu dan tidak ada fakta yang berdiri sendiri kecuali ada fakta penyebabnya.

radikal tampaknya kehilangan makna signifikannya sehingga banyak tokohnya yang memasuki partai politik, misalnya Budiman Sujatmiko yang kemudian masuk ke dalam Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Sementara yang lain, jarang lagi didengar aktivitasnya. Pintu demokrasi yang telah dibuka oleh Negara, sepertinya menutup celah perjuangan yang selama ini menjadi isu utamanya.

Orde Baru juga sangat keras terhadap gerakan radikalisme kanan. Di antara yang paling menonjol adalah isu Komando Jihad, di pertengahan tahun 1980-an. Banyak tokoh Islam yang diidentifikasi sebagai pemimpin atau anggota Komando Jihad yang ditangkap dan ditahan. Usaha untuk memberangus gerakan-gerakan radikal Islam itupun terus berlangsung sampai periode munculnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di pertengahan tahun 1990-an (Abdul Azis Thaba, 1995)[2]. Jika gerakan radikal kiri berada dalam keadaan mati suri, tidak demikian halnya dengan gerakan radikalisme atau fundamentalisme Islam. Gerakan ini sepertinya justru menemukan lahan subur di era reformasi. Gerakan radikal muncul seperti cendawan di musim hujan. Di era reformasi yang mengedepankan demokratisasi dan Hak Asasi manusia, tampaknya tidak menemukan raung gerak untuk melakukan pemberangusan terstruktur dan sistematis terhadap gerakan Islam radikal atau fundamental.

Tersebab oleh alasan itu, maka berbagai manuver gerakan Islam radikal atau fundamental tidak terdeteksi atau sengaja dibiarkan di dalam kiprahnya. Terjadinya berbagai kekerasan

[2] Abdul Aziz Thaba membuat tipologi hubungan antara Islam dan Negara dalam tiga kategori, yaitu hubungan antara Islam dan Negara yang bercorak antagonistis, resiprokal-kritis dan Islam dan Negara yang saling membutuhkan. Hubungan antagonistis terjadi di awal Orde baru sampai awal tahun 1980-an. Hubungan saling mengintai terjadi pada awal tahun 1980-an sampai pertengahan tahun 1980-an dan hubungan simbiosis terjadi di era awal tahun 1990-an sampai pertengahan tahun 1990-an.

agama tidak serta merta menyebabkan penihilan terhadap organisasinya. Jika terjadi kekerasan agama, seperti peledakan, penyerangan dan sebagainya, maka cukup aktor-aktornya yang ditahan, diadili atau dihukum sesuai dengan tindakannya. Hal ini sangat berbeda dengan masa Orde baru, yang tidak hanya penangkapan dan pemberian hukuman terhadap aktornya tetapi juga pelarangan terhadap organisasinya.

Munculnya berbagai gerakan Islam yang berkonotasi radikal akhir-akhir ini, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Gerakan Salafi, Laskar Jundullah, Laskar Jihad, Gerakan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah dan berbagai gerakan keagamaan bercorak local adalah sebuah potret tentang merebaknya gerakan-gerakan keagamaan di tengah euphoria keterbukaan, demokratisasi dan hak asasi manusia.

Kedua, kegagalan rezim secular dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan masyarakat. Rezim secular di Negara-negara berkembang yang kebanyakan mengadopsi system kapitalisme ternyata gagal dalam mengimplementasikan kebijakannya ditengah ketidakpastian ekonomi dunia. Kegagalan pembangunan yang mengakomodasi teori-teori modernisasi,[3] ternyata berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap model pembangunan yang diadopsi dari pengalaman- pengalaman Negara barat tersebut. Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Negara-negara berkembang di antaranya disebabkan oleh kesalahan di dalam

[3] Teori pembangunan yang dimaksud disini adalah satu varian dari teori pembangunan yang dikemukakan oleh Harold dan Domar, yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dilaksanakan kalau ada dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan. Jika dana dalam negeri tidak ada, maka salah satu solusinya adalah dengan bantuan luar negeri. Teori ini memang pernah manjur untuk mengatasi kesulitan kembali dalam pembangunan di Inggris. Melalui perjanjian Marshall antara Inggris dan Amerika Serikat disepakati untuk memberikan bantuan dalam kerangka membangun kembali Inggris. Periksa Arief Budiman, *Teori-teori Pembangunan di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

penerapan teori pembangunan yang bertumpu kepada bantuan luar negeri. Dana pembangunan luar negeri yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan di dalam berbagai sector ternyata juga dikorupsi. Kebocoran dana pembangunan, sebagaimana dilansir oleh Soemitro Djojohadikusumo bahkan mencapai angka 30% dari total anggaran pembangunan.[4] Artinya, ada kesenjangan antara praktik pembangunan dengan kebijakan yang dirumuskan. Moralitas pembangunan yang jeblok seperti ini kemudian mengilhami munculnya gerakan-gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda kehidupan birokrasi dan masyarakat. Ditengah ketidakpercayaan ini, maka muncullah gagasan Islam sebagai alternative untuk solusi. Tidak salah jika orang melirik terhadap gerakan-gerakan yang memberikan janji perbaikan, melalui solusi Islam. Ketika Negara tidak lagi dapat mengatasi kemungkaran, maka tampillah mereka untuk memberantasnya. Maka, dilakukanlah gerakan-gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar* melalui cara dan mekanisme yang menurutnya absah. Tampillah di sini gerakan Islam garis keras yang melakukan tindakan menurut konstruksi sosialnya dan yang dianggapnya benar.

Ketiga, respon terhadap barat. Kebanyakan isu yang diangkat ke permukaan oleh kelompok ini adalah responnya terhadap apapun yang datangnya dari barat. Isu tentang salibisme, moralitas permissiveness, demokrasi dan bahkan hak asasi manusia adalah rekayasa barat untuk meminimalisasikan peran dan

[4] Yang juga menarik adalah cerita pembangunan yang dilakukan oleh Brazil yang juga memanfaatkan bantuan Negara asing dalam rangka pembangunan Negara. Pada awalnya Brazil seakan mau bangkit dari tidurnya ketika perkembangan ekonomi negaranya mencapai angka yang signifikan, namun karena berbagai kebocoran dana pembangunan, maka Negara Brazil justru terpuruk kondisi perekonomiannya. Cerita tentang Barzil itu terekam dalam "Kisah Sukses Yang Gagal". Periksa Emanuel Subangun, *Dari Saminisme ke Pos-Modernisme* (Yogyakarta: Alocita, 1995).

pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Semua ide tentang persoalan tersebut dikemas dengan konsep modernisasi dan sekularisasi. Modernisasi mempunyai anak kandung kapitalisme dan materialisme. Kapitalisme yang merupakan proses akumulasi modal didasarkan atas konsep individualisme yang dianggap bertentangan dengan konsep Islam tentang sistem masyarakat. Sedangkan materialisme yang menganggap bahwa materi adalah segala-galanya juga sangat bertentangan secara diametral dengan Islam. Apalagi sekularisasi yang bermakna pemisahan antara agama dan kehidupan dunia juga merupakan musuh Islam yang lebih menekankan kehidupan spiritual. Berbagai isme ini, mau tidak mau harus dilawan sebab akan menggerogoti kehidupan umat Islam secara umum. Di tengah ketidak menentuan ini, muncul konsep globalisasi yang menihilkan batas geografis, budaya, social dan ekonomi.[5] Makanya, apa yang terjadi di Negara-negara barat dalam waktu sangat singkat akan terjadi di belahan lain. Padahal, seperti moral permissiveness yang diimpor dari barat tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam keadaan banyaknya penyimpangan moral, perilaku dan tindakan-tindakan di dalam masyarakat, maka gerakan Islam ini menawarkan konsep kembali ke kehidupan masa lalu, *al-salaf al-salih.* Kehidupan ini ditandai dengan pengamalan Islam secara

[5]Konsep yang digunakan untuk menjelaskan tentang globalisasi dalam kaitannya dengan masyarakat adalah konsep *borderless society* (masyarakat tanpa batas), yaitu suatu tata masyarakat dunia yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Untuk penjelasan lebih lanjut periksa Irwan Abdullah, "Privatisasi Agama, Globalisasi Gaya Hidup dan Komodifikasi Agama di Indonesia" dalam *Wacana Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, No.1, 2002. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Mike Featherstone, bahwa di dalam globalisasi maka ditandai dengan tiga hal mendasar, yaitu: meningkatnya nilai simbolis barang (barang atau jasa dinilai tidak hanya semata-mata nilai barang atau jasanya tetapi juga nilai simbolik barang tersebut), meningkatnya estetika kehidupan (nilai barang dan jasa juga dilihat dari nilai estetisnya) dan melemahnya preferensi tradisional (melemahnya ikatan paternalitas dan nilai-nilai lama). Periksa Mike Featherstone, *Posmodernisme dan Budaya Konsumen.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

kaffah, dalam semua tataran kehidupan. Hukum harus didasarkan atas system syariah, ekonomi harus berbasis syariah, politik berasas syariah dan sebagainya.

Menurut survey yang dilakukan oleh Azyumardi Azra, bahwa gerakan radikalisme Islam memiliki genealogi dengan gerakan Islam salafi yang berkembang di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Entah suatu kebetulan atau memang seperti itu, kebanyakan tokoh- tokoh gerakan Islam radikal di Indonesia adalah keturunan Arab. Seperti, Habieb Riziq Syihab yang memimpin Front Pembela Islam (FPI), Ja'far Umar Thalib memimpin Laskar Jihad, Abu Bakar Ba'asyir memimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Habieb Husein Al-Habsyi memimpin Ikhwanul Muslimin, Hafidz Abdurahman memimpin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hampir sama dengan pendapat ini, Barton juga menyatakan bahwa akar radikalisme Islam tumbuh dan berkembang dari ide-ide Wahabi, Neo-Wahabi dan Hassan al-Banna. Dalam banyak hal radikalisme Islam di Indonesia juga dapat dikaitkan dengan Ibn Qayyim al-Jauzi yang memiliki kesamaan dalam hal penerapan syari'ah Islam di beberapa tahun terakhir. (Rudi Pranata, Pebruari 15-21, 2005: 44)

Gerakan Islam Radikal sangat responsive terhadap apa saja yang datang dari dunia barat. Modernisasi dengan berbagai implikasinya adalah musuh besarnya. Melalui pergulatannya dengan sekularisasi yang permissiveness, maka visi dan misi utama adalah mengembalikan masyarakat ke dalam pangkuan Islam yang seluruh kandungan ajarannya mengatur kehidupan manusia secara total. Di dalam konstruksi sosialnya, dunia haruslah diatur sesuai dengan zaman *salaf al-salih*, yang merupakan zaman terbaik pasca kehidupan Rasulullah

F. Kontroversi Islam Garis "Keras"

Islam garis keras yang dilabel dengan radikalisme Islam adalah sebuah konstruksi social. Sebagai sebuah konstruksi social, maka yang disebut sebagai radikalisme juga sangat tergantung

kepada siapa yang mendefinisikannya. Di dalam hal ini, konsepsi radikalisme sangat tergantung kepada subyek yang melabelnya. Radikalisme adalah hasil labelisasi tentang gerakan-gerakan keagamaan yang memiliki ciri pembeda dengan gerakan Islam yang menjadi *mainstream* yang tujuannya adalah untuk menegakkan ajaran Islam sesuai dengan masa-masa lalu (*salaf al-salih*). Visi dan misi gerakan ini adalah untuk menegakkan Islam sesuai dengan perintah Allah sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad. Tujuan akhir dari gerakan ini adalah terciptanya suatu tatanan masyarakat, seperti zaman Nabi Muhammad saw., *khulafaurrasyidin* dan *salaf al- salih*. Untuk melakukan perubahan banyak dilakukan dengan cara menjebol tatanan yang sudah ada dan menggantinya dengan tatanan baru sesuai dengan yang diinginkannya.

Berdasarkan rumusan panjang ini maka dibuatlah daftar tentang gerakan mana yang sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai radikal atau tidak. Cara berpikir seperti ini yang sering dinyatakan terjebak kepada obyektivisme. Artinya untuk menentukan sebuah gerakan dianggap radikal, maka harus memenuhi kriteria dan kategori yang telah disusun di dalam merumuskan radikalisme tersebut. Oleh karena itu, ketika orang menyebut sebuah gerakan dianggap radikal, maka definisi itulah yang menjadi ukurannya.

Ketika orang berbicara tentang radikalisme, sesungguhnya mereka berbicara di dalam level obyektivisme. Ia merupakan stereotype atau stigma yang dilabel kepada gerakan-gerakan yang memenuhi kriteria atau penggolongan yang telah ditentukan. Jadi, radikalisme agama hakikatnya adalah label yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang dengan ciri tertentu.

Oleh karena itu menjadi tidak salah ketika banyak orang melabel kaum radikalis yang telah melakukan pengeboman terhadap lokus yang dianggapnya sebagai tempat kemaksiatan, maka mereka sama sekali tidak menganggap tindakannya se-

bagai tindakan radikal tetapi jihad. Dalam konteks perbincangan ilmu social, anggapan demikian dianggap terjebak kepada subyektivisme. Artinya bahwa dirinya sendirilah yang menentukan terhadap label yang melekat pada dirinya. Tindakan yang oleh orang lain dinyatakan sebagai terror terhadap kemanusiaan, menurutnya adalah jihad sebagai perintah agama.

Dalam konteks labelisasi terhadap sebuah gerakan ini, maka menjadi menarik untuk membincangkan tegangan antara kelompok yang dilabel sebagai gerakan radikalis disatu sisi dengan respon yang diberikan oleh kelompok dimaksud terhadap pemberi labelnya. Di sinilah makna simbolisasi itu memperoleh maknanya.

Akhir-akhir ini, muncul beberapa tulisan yang saling mengklaim tentang kebenaran tindakan yang dilakukan. Diantara tulisan itu adalah ketika memaknai terorisme sebagai gerakan social yang memiliki ambivalensi makna. Dualitas makna tersebut terletak pada bagaimana mereka memaknai gerakannya. Tulisan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua paradigma. Pertama, tulisan yang bercorak menuduh tindakan terorisme sebagai tindakan anti humanisme. Melalui tulisan Nasir Abas –mantan anggota Jamaah Islamiyah yang kini telah tobat—mengungkap dengan jelas tentang kiprah gerakan terorisme yang dilakukan oleh Jamaah islamiyah. Berdasarkan pengalamannya, dipaparkan bahwa gerakan jamaah Islamiyah banyak melakukan kesalahan dalam mengamalkan ajaran Islam karena penafsiran ajaran Islam yang sempit dan sepotong-potong. Akibatnya, mereka melakukan tindakan-tindakan anti humanisme dengan melakukan kekerasan agama yang disangkanya benar, padahal sesungguhnya hal itu bertentangan dengan ajaran Islam yang mengagungkan keselamatan (Nasir Abas, 2005).

Termasuk kategori ini adalah tulisan yang dilansir oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Buku ini mencoba untuk menjabarkan tentang peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam

ikut serta melawan gerakan terorisme terutama kasus Bom Bali. Buku secara utuh menggambarkan tentang data-data penyidikan terhadap tersangka Bom Bali disertai dengan bukti-bukti pengakuan para tersangka dan peran polisi di dalam mengungkap tragedi nasional tersebut. Sebagai buku putih, karya ini memberikan ilustrasi tentang tindakan kepolisian yang dianggapnya benar di dalam melakukan tindakan hukum terhadap para tersangka (Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 2004).

Kedua, tulisan yang memberikan ilustrasi pembelaan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok garis keras ini. Diantara tulisan itu adalah karya Imam Samodra –*terpidana mati kasus Bom Bali*—yang mengungkap tentang tindakannya yang seperti itu hakikatnya adalah sebuah tindakan untuk melawan terorisme yang dilakukan oleh Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Bagi Imam Samodra, teroris yang sebenarnya bukan dirinya dan kawan-kawan yang tergabung di dalam jaringan Jamaah Islamiyah, akan tetapi adalah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Tindakan terror adalah bagian dari jihad dalam membela Islam dari serangan terorisme yang terstruktur dalam tindakan kekerasan Negara-negara barat. Melalui ilustrasi terhadap perang Afghanistan, Irak dan juga kekerasan di Negara-negara Islam lainnya, Imam Samodra sampai pada kesimpulan bahwa melawan dengan kekerasan –termasuk bom— adalah jihad melawan setan besar, Amerika Serikat. (Dedi Junaedi, 2005)[6]

Yang sangat menarik tentunya adalah tulisan Paridah Abas –istri terhukum mati Mukhlas—yang merupakan pembelaan terhadap posisi suaminya yang dituduh sebagai teroris. Buku ini

[6] Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Nurcholis Madjid ketika menanggapi peristiwa pengeboman Bali. Beliau menunjuk adanya spekulasi dimasyarakat bahwa bom di Kuta adalah konspirasi Negara-negara asing tertentu untuk kepentingan politik mereka, baik internasional maupun domestik. Periksa Ahmad Gaus AF., "Waspadai Isu Terorisme" dalam *Perta, Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam*. Vol.V/No. 2/2002, hlm.13.

lebih merupakan riwayat kehidupan (*life history*) yang dituangkan ke dalam tulisan, mulai dari masa kecil, remaja dan dewasa sampai petualangannya untuk menemukan Islam seperti yang dilakoninya, sehingga memberikan gambaran tentang bagaimana liku-liku kehidupan terpidana mati tersebut. Di dalamnya diceritakan tentang bagaimana para pelaku pengeboman Bali, Hotel Marriott dan kedubes Australia ini menjalani kehidupan keberagamaannya, pergulatannya dengan iman dan Islamnya dan bagaimana keimanan dan keislaman tersebut membentuk semangat hidupnya dan tekadnya untuk terus melakukan jihad. Bagi mereka, tindakan pengeboman terhadap tempat kemungkaran bukanlah tindakan yang salah, akan tetapi merupakan panggilan jihad yang harus dilakukan. Kekerasan yang dilakukan oleh Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat telah melampaui batas kemanusiaan. Bentuk-bentuk teror yang dilakukan terhadap rakyat Afghanistan, Irak, Negara-negara Islam di Afrika dan Eropa Timur adalah sebuah tindakan terorisme yang harus dilawan dengan kekerasan. Jadi, melakukan kekerasan terhadap mereka adalah respon terhadap kekerasan yang jauh lebih berat yang sudah dilakukan oleh Negara-negara barat.

Buku yang juga senada dengan ini adalah karya Dedi Junaedi, yang berisi tentang keraguannya kalau pelaku terorisme melalui pengeboman terhadap pusat hiburan di Legian Bali adalah Amrozi dan kawan-kawan. Dengan mengutip pakar bom dari Australia, buku ini memberikan ilustrasi ketidakmungkinan Amrozi dan kawan-kawan mampu membuat bom yang sedemikian canggih dengan daya ledak seperti itu. Bom yang diledakkan di Sari Club Legian Bali itu memiliki kemampuan daya rusak luar biasa dan sepertinya tidak mungkin dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan. Oleh karena itu, dia berkesimpulan bahwa dalam kasus peledakan di Bali tersebut pastilah ada konspirasi untuk mendiskreditkan Islam dan umat Islam. Konspirasi tersebut dil-

akukan untuk memberi pembenaran (justifikasi) bahwa Indonesia dengan umat Islamnya rawan untuk menjadi sarang terorisme internasional. Atau dengan kata lain, jaringan terorisme internasional telah berada di Indonesia. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Joe Vialls atas keterangan Amrozi, maka dia sampai kepada kesimpulan bahwa tidak mungkin Amrozi cs dapat membuat bom dengan kemampuan daya ledak sedahsyat itu. Vialls justru menyatakan jika Amrozi dapat membuat bom seperti itu, maka layak kalau dia mendapatkan hadiah Nobel fisika.[7]

Terlepas dari berbagai tulisan ini, tetap saja menyisakan persoalan, bahwa munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang berkonotasi "keras" hakikatnya adalah respons social atas munculnya berbagai kebijakan barat yang lebih bermuatan politis, ketimbang persoalan kemanusiaan. Jika persoalan kemanusiaan, maka semestinya juga dihitung banyaknya kerugian fisik dan non fisik terhadap berbagai kekerasan yang dilakukan oleh Negara-negara barat terhadap umat Islam di belahan dunia ini. Kasus Muslim Bosnia, Chechnya, Irak, Afghanistan dan lain-lain adalah bukti histories tentang kekejaman yang dilakukan Negara-negara barat terhadap umat Islam. Hanya saja mereka membungkusnya dengan konsep membela Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Penghancuran Irak dan Afghanistan atas nama menggulingkan pemerintahan otoriter dan penghancuran Bosnia dan Chechnya adalah alasan membela Hak Asasi Manusia. Respon social semacam ini, seringkali dimanifestasikan

[7] Konsep matematika supra-material dibuat oleh Pujo Semedi dalam kata pengantar terhadap buku Islam pesisir. Baca Pujo Semedi, "KataPengantar" dalam Nur Syam, *IslamPesisir*. (Yogyakarta, LKiS, 2005), hlm. i-ix. Sebagai contoh lain adalah ungkapan Imam Samodra menanggapi seputar grasi atau pengurangan dan penghapusan hukuman, dia justru menyatakan: "saya sudah ikhlas dan hanya akan meminta pengampunan di akhirat dan bukan pengampunan di dunia". Periksa, *Harian Republika*. Kamis, 16 Agustus 2005, hlm. 8.

dengan tindakan kontra-kekerasan. Ada alasan sederhana dalam logika orang tertindas, bahwa melakukan kekerasan yang sama atau melebihi terhadap kekerasan yang lain adalah sesuatu yang harus dilakukan di tengah ketidakpastian hidup. Ketika ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan, mengapa orang-orang Palestina memiliki keberanian yang luar biasa untuk melawan tentara Israel yang bersenjata lengkap dengan hanya berbekal senjata ketapel atau mengapa mereka berani melakukan tindakan bom bunuhdiri? Maka jawabannya adalah ketidakpastian hidup ditengah kesendirian karena sanak keluarganya telah menjadi syahid adalah jawaban yang disebabkan oleh logika orang-orang tertindas. Orang tertindas selalu memiliki logika matematika supra-material, bahwa akan ada kehidupan di luar dunia ini (akhirat) yang akan memberikan kebahagiaan kalau orang melakukan amalan baik ketika di dunia (Olaf H. Schumann, 2004: xiii). Janji tentang pahala orang *syahid* dengan imbalan surga tentunya memicu untuk melakukan tindakan diluar tindakan umum yang berlaku.

Hanya sayangnya, tindakan teror yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan ucapan Allahu Akbar ternyata berimplikasi lain. Salah satu implikasinya adalah munculnya anggapan bahwa Islam memiliki relevansi dengan tindakan teror. Labelisasi inilah yang kemudian membawa implikasi lanjutan bahwa kekerasan atas nama agama menjadi absah. Padahal senyatanya, bahwa terorisme dengan ternornya tetap teror dan bukan agama. Keduanya merupakan sesuatu yang berhubungan secara simetris. Keduanya tidak akan pernah bertemu karena tujuan akhirnya sangat berbeda. Tujuan keselamatan tetaplah haruslah menggunakan cara dan jalan keselamatan. Tujuan keselamatan tidak bisa diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan keselamatan. Jika teror bukan cara untuk keselamatan, sudah pasti bahwa teror bukan berkaitan dengan agama.

Memang harus dipahami bahwa stigma tentang Islam sebagai gerakan yang mendorong terjadinya kekerasan adalah

suatu pandangan barat tentang Islam yang sering kali bersifat menggeneralisasikan. Komaruddin Hidayat dalam kata pengantar bukunya Olaf H. Schumann, misalnya menyatakan: "kesan dan penilaian bahwa Islam berada di balik gerakan radikalisme dan terorisme tampaknya dengan sengaja dibangun oleh beberapa media barat. Secara faktual memang ada benarnya, namun sama sekali tidak mewakili mainstream ajaran dan gerakan Islam. Adalah menjadi pertanyaan dan harus dicurigai ketika muncul generalisasi dan kesengajaan opini untuk memojokkan citra Islam sebagai agama yang anti-perdamaian, anti demokrasi, dan anti peradaban global Islam, sebagaimana Yahudi dan Kristen adalah agama serumpun dari tradisi Ibrahim yang kesemuanya –bersama Hindu, Buddha, Konghucu merupakan agama dan sekaligus pendukung peradaban dunia yang harus kita hormati dan pelihara eksistensinya".[8]

Hampir semua agama memang memiliki tradisi kekerasan. Namun demikian, sebagaimana yang terjadi bahwa mereka bukanlah mewakili arus utama tradisi agama- agama. Di Indonesia, arus utama agamanya adalah yang diwakili oleh Islam moderat melalui representasi NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Jam'iyah Washliyah, dan lain-lain. Sedangkan yang tergolong radikal –meskipun jumlah organisasinya banyak— hanya memiliki jumlah keanggotaan kecil yang kebanyakan berpusat di kota-kota. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda perkotaan, yang memang sedang di dalam proses pencarian makna agama di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam proses pencarian ini, mereka bertemu dengan tradisi-tradisi yang

[8] Ada sebuah pernyataan menarik yang diungkapkan oleh Dom Helder Camara, tokoh pendamai asal Brazil. Dia menyatakan: "ketika kekerasan disusul dengan kekerasan, dunia jatuh dalam spiral kekerasan". Oleh karena itu, Johan Galtung menawarkan konsep bahwa "perdamaian hanya dapat diwujudkan dengan sarana-sarana damai". Periksa Johan Galtung, *Studi Perdamaian.*

memiliki paham keagamaan yang "keras" dan cenderung eksklusif. Ghirah keislaman yang demikian membara terkadang melupakan bahwa ternyata ada entitas lain yang juga memerlukan ruang kehidupan yang sama dengannya. Pemahaman keislaman yang rigid terkadang memaksanya untuk melakukan tindakan-tindakan keagamaan yang secara subyektif melawan keselamatan dan kedamaian. Di tengah suasana kekerasan tersebut, maka stigma-stigma yang muncul adalah Islam secara afinitas elektif mendorong terjadinya kekerasan sosial.

Hanya saja, stigmatisasi ini didukung oleh sejumlah besar media massa sehingga memiliki gaung yang luar biasa. Padahal senyatanya, Islam adalah agama yang memiliki misi keselamatan dan kedamaian, menjunjung tinggi keadilan dan equalitas, mengedepankan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Islam sama sekali menentang terhadap kekerasan dengan dalih mengembalikan masyarakat ke dalam ajaran agama yang benar. Islam memberikan ruang yang memadai untuk saling berbeda, bahkan terhadap keyakinan atau agama sekalipun. Sesungguhnya Islam mengajarkan bahwa keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan adalah persoalan humanitas yang seharusnya dijunjung dan diperjuangkan secara maksimal. Dengan demikian, semua gerakan keagamaan yang menggunakan cara-cara yang tidak mengutamakan keselamatan, seperti kekerasan-kekerasan atas nama agama–apapun agamanya—maka sudah pasti itu bukan tindakan keagamaan yang berbasis keselamatan tersebut.

G. Masa Depan Hubungan Agama-agama

Islam radikal adalah wacana yang dikembangkan oleh dunia barat. Ia merupakan fantasi barat tentang dunia Islam yang menakutkan. Ia takut akan kegagalan proyek universalisasi dunia dibawah komando barat, khususnya Amerika Serikat. Ditengah kegalauan ini, maka dibuatlah berbagai proyek untuk memberangus berbagai gerakan keagamaan yang bercorak keras. Salah

satu intelektual barat yang sangat bombastis membuat hipotesis akan terjadinya benturan peradaban adalah Huntington.[9] Tulisan Huntington yang sangat bombastis yang bertitel "*Class of Civilization*" merupakan refleksi dari kegalauan tentang perkembangan Islam dalam percaturan dunia dewasa ini.[10]

Tesis Huntington ini banyak menuai kritik. Yang paling utama adalah kritik bahwa benturan peradaban sesungguhnya merupakan refleksi pemikiran barat tentang Islam, yang diidentifikasi sebagai musuh utama barat. Setelah hancurnya Uni Soviet, maka tidak ada lagi ideologi lain yang bisa menandingi barat. Kekuatan Sosialisme pun tinggal bertumpu di Cina–sekarang sudah mengadopsi sistem kapitalisme—kemudian Korea Utara dan Chili yang secara ekonomis juga sudah hancur pasca kehancuran induk semangnya, Uni Soviet. Oleh karena itu yang dianggap akan menjadi batu sandungan barat dalam proyek-proyek westernisasi dan universalisasi dunia di bawah panji-panji barat khususnya Amerika Serikat adalah Islam. Islam memenuhi syarat untuk menjadi lawan bagi barat.[11]

---

[9] Di dalam Foreign Affair, Musim Panas, 1993, Huntington berpendapat bahwa dengan berakhirnya perang dingin, sumber konflik utama yang dihadapi umat manusia tidak lagi masalah politik dan ekonomi tetapi perbedaan kebudayaan. Diantara benturan peradaban yang kerasakan terjadi antara kebudayaan Kristen Barat dengan kebudayaan Islam.Hal ini disebabkan oleh jangkauan universal dari keduanya.

[10] Menurut Richard Falk, bahwa tulisan Huntington itu sangat berpengaruh bukan karena substansi dan alur logikanya, akan tetapi karena tulisan itu memiliki gaung luar biasa dan menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Tulisan ini sama dengan karya Nietzche tentang "*Twilight of the Gods",* yang berpengaruh bukan karena alur pemikiran dan metodenya tetapi karena pengaruh sosialnya yang luar biasa pada masyarakat Yunani. Periksa Richard Falk, "Geopolitik Penyingkiran terhadap Islam (Kritik atas Huntington)" dalam *Ulumul Qur'an,* No. 6/VII/1997, hlm. 63

[11] Masih menurut Falk, bahwa barat telah menciptakan konsep universalisme yang keliru, yaitu sebuah topeng untuk menutupi hegemoni barat yang telah lama digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah perang peradaban untuk menyingkirkan Islam didalam percaturan geopolitik internasional. Ia

Islam tidak hanya sekedar agama dengan seperangkat keyakinan terhadap hal-hal gaib dan serangkaian upacara ritualnya, akan tetapi adalah seperangkat pedoman hidup yang kaffah, utuh dan menyeluruh. Secara histories, Islam telah menjadi seperangkat pedoman kehidupan yang memiliki pengaruh sangat signifikan. Agama gurun yang tandus hanya dalam waktu singkat telah menjadi agama bagi jutaan umat di dunia. Agama yang semula hanya dipeluk oleh masyarakat selatan dan timur tengah yang terbelakang, namun kenyataannya telah berubah menjadi agama yang menyebar diberbagai Negara, termasuk barat dan juga Asia Timur. Perkembangan yang demikian mencolok merupakan bukti bahwa Islam memiliki élan vital yang luar biasa untuk menyaingi agama-agama yang telah mapan. Yang sering menjadi contoh adalah Iran. Betapa sekelompok Mullah yang selama ini dikenal hanya ahli agama, ternyata bisa menghancurkan kekuasaan Syah Iran dengan persenjataan mutakhir dan dukungan Amerika Serikat. Kekuasaan Syah Iran yang telah menancap kuat di bumi Iran dalam waktu sekejap bisa diubah oleh kaum *Mullah* yang semula tidak diperhitungkan. Negara yang semula sangat sekuler tiba-tiba berubah menjadi Negara teodemokratis dibawah komando kaum Mullah. Afghanistan dibawah kekuasaan Rusia juga hancur oleh kekuatan penganut Islam. Ini sekaligus menandai era baru perang peradaban antara barat dan Islam.

Perkembangan Islam di Asia Tenggara juga menjadi catatan khusus. Islam yang selama ini dipandang sebagai Islam Peripheral, ternyata telah melepas belenggu itu. Bahkan John Elposito mengagumi perkembangan Islam di Asia Tenggara dapat memainkan peranan yang sangat besar di masa datang. Is-

dengan jernih mempertanyakan "bagaimana Islam telah menjadi korban diskriminasi dalam pembentukan tatanan dunia?." Periksa Richard Falk, "Geopolitik Penyingkiran…". hlm. 64.

lam di Malaysia dan Indonesia dapat menjadi Barometer perkembangan kemajuan Islam di dunia. Kebangkitan Islam di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Islam di belahan ini tidak stagnan bahkan akan menjadi alternative bagi perkembangan Islam tahap berikutnya. Islam di Asia Tenggara hingga sekarang masih memberikan gambaran tentang Islam yang moderat. Terutama di Indonesia, Islam masih berwajah moderat terbukti dengan kekuatan Muhammadiyah dan NU yang bercorak moderatisme tersebut. Namun penilaian ini masih sangat tentative. Salah satu diantaranya adalah semakin kuatnya arus perkembangan Islam garis keras dalam aras percaturan dan dinamika Islam di Indonesia. Semaraknya fenomena gerakan-gerakan Islam garis keras dalam berbagai moment dan penyikapan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dewasa ini sekurang-kurangnya memberikan gambaran bahwa ada tren meningkat dari gerakan ini.

Dalam kajian ilmu sosial, konflik adalah penggerak dinamika masyarakat. Mengikuti kaum Marxian, bahwa tanpa konflik maka dinamika kehidupan masyarakat akan menjadi kurang semarak. Melalui konflik masyarakat yang stagnan akan menjadi berubah. Konflik tidak hanya bercorak horizontal, tetapi juga vertical. Hubungan konfliktual antara sesama penganut agama (intern umat beragama) adalah contoh konflik horizontal. Sedangkan konflik vertikal terjadi antara rakyat dan Negara atau antara satu strata social yang lebih rendah dengan strata social lainnya. Konflik juga memiliki derajat intensitas yang berbeda-beda. Konflik akan menjadi sangat keras manakala telah melibatkan agama. Dalam sejarah panjang perjalanan agama-agama, kekerasan yang difasilitasi oleh agama menjadi luar biasa beringasnya. Konflik antara Islam dan Kristen yang dikonstruksikan sebagai perang Salib–perang seratus tahun dan melibatkan tokoh besar Salahuddin Al-Ayyubi dan Raja Richard—adalah perang yang sungguh melelahkan dan menghancurkan. Bahkan konflik antara penganut Katolik dan Protestan diawal-awal

perkembangan Protestan juga konflik dengan kecenderungan yang sangat keras. Perburuan terhadap kelompok Protestan yang dianggap sebagai kelompok heresyi, murtad dan merusak keyakinan Katolik juga menjadi sejarah kelabu dalam sejarah agama-agama.

Konflik antara Islam dan Kristen pada dasarnya berhubungan dengan doktrin-doktrin teologi yang eksklusif. Masing-masing agama memang memiliki doktrin yang menihilkan agama lain. Baik Islam maupun Kristen memiliki doktrin teologis yang saling meniadakan. Masing-masing memiliki *truth claim* sebagai agama yang benar dan benar-benar agama. (Budhy Munawar-Rahman, 2004: vii)[12]

Doktrin-doktrin teologis yang demikian ini kemudian menjadi pegangan dalam melakukan tindakan. Oleh karena itu, di antara umat kedua agama ini juga berkeinginan untuk mempertahankan dan menyebarkan agama berdasarkan *truth claim* tersebut. Islam memiliki konsep dakwah (penyebaran agama kepada orang atau kelompok lain). Demikian pula Kristen juga memiliki doktrin *missionary* (penyebaran agama kepada masyarakat lain).[13]

---

[12] Setiap agama memiliki *language game* yang diwariskan dari generasi ke generasi lainnya bahwa agamanyalah yang paling benar dan yang lainnya salah. Dalam konsepsi Arthur J. D'Adamo, bahwa masing-masing agama memiliki religion's way of knowing yang menjadi akar konflik. Setiap agama menetapkan standard tentang agamanya sendiri dan kitab sucinya memuat kebenaran yang tak terbantahkan. Apa yang ada di dalam kitabnya adalah bersifat konsisten dan tidak mengandung kesalahan sedikitpun, bersifat lengkap dan final, kebenaran agamanya dianggap satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan atau pembebasan dan seluruh kebenaran agamanya diyakini dari Tuhan.

[13] Dalam memandang agamanya, Gereja memiliki pandangan bahwa agama Kristen sebagai pewaris dan ekspresi yang final dari kebenaran ini. Ungkapan "Dia yang tidak bersama saya adalah menentangsaya, dan dia yang tidak bersama saya, akan bercerai berai" (Matius 12:30). Gereja juga pemegang otonomi dan sumber keselamatan satu-satunya, sebagaimana tercermin dalam ungkapan "*extra ecclesiamnullasalus"*. Periksa Mahmoud M.

Benturan ini yang sering kali memicu konflik berkepanjangan. Namun demikian, menurut Mahmoud Ayoub, bahwa yang menjadikan konflik itu semakin keras adalah sikap-sikap kolonialisme, misionaris dan kalangan orientalis yang sering menjadi pemicu dari konflik tersebut. Sikap kolonialisme yang berkeinginan untuk melakukan hegemoni dan represi terhadap penduduk pribumi untuk kepentingan ekonomi, penguasaan sumber-sumber ekonomi dan penguasaan sumber-sumber kekuasaan politik menjadi variabel penting di dalam memicu konflik antara Islam dan Kristen. Gerakan misionaris yang mendompleng terhadap penjajahan dan terus berlangsung hingga dewasa ini juga menjadi faktor dominant perlawanan terhadap kelompok Kristen. Demikian pula sikap orientalisme yang menciptakan idiom-idiom barat sebagai bangsa pilihan, superior, dan memiliki kelebihan- kelebihan dibanding bangsa timur juga menjadi penyebab lain pertentangan antara Islam dan Kristen. (Mahmoud M. Ayoub, 1993: 26)

Konflik agama antara Islam dan Yahudi juga terjadi hingga dewasa ini. Konflik ini oleh Basyaib di identifikasi oleh persoalan politik alih-alih persoalan teologis. (Hamid Basyaib, 1993: 42) Memang tidak bisa diremehkan bahwa akar pertentangan itu semula memang karena faktor teologis, namun babak berikutnya yang menguatkan konflik adalah faktor politik. Pertentangan itu sesungguhnya dimulai dari terusirnya kelompok Yahudi dari Madinah pada zaman Nabi Muhammad saw., dan terus berlangsung hingga sekarang. Rusaknya dinamika hubungan antara Islam-Yahudi, terutama dewasa ini, adalah murni persoalan politik. Ketika telah terbentuk Negara Israel dan puncaknya adalah

---

Ayoub, "Akar-akar Konflik Muslim-Kristen" dalam *Ulumul Qur'an,* No.4, Vol.IV, th.1993, hlm.26-27. Bandingkan ini dengan ungkapan al-Qur'an "*inna al-dina 'inda-llah al-Islam*" (sesungguhnya agama yang ada disisi Allah hanyalah Islam) atau ungkapan "*al-Islamu yu'la wala yu'la alaihi*". Ungkapan-ungkapan ini adalah doktrin teologis yang bisa memicu konflik disebabkan oleh *truth claim* masing-masing.

terbentuknya fundamentalisme Yahudi di Israel dan daerah-daerah pendudukan Tepi barat dan Gaza, maka juga memunculkan fundamentalisme Islam yang menjadikan hubungan antara Islam dan Yahudi semakin suram.

Ditinjau dari perspektif teologis jelas bahwa antara Yahudi dan Islam memiliki perbedaan yang sangat principal. Perbedaan teologis yang selalu menjadi ciri *truth claim* masing-masing agama sesungguhnya adalah inti pembeda di dalam berbagai agama. Sama dengan Islam dan Kristen, Yahudi dan Islam juga memiliki *truth claim*-nya masing-masing. Doktrin Israel sebagai bangsa pilihan, hakikatnya merupakan akar teologis yang menyebabkan orang Israel selalu memandang rendah kelompok lain. Kemudian, akan menjadi penyebab rusaknya hubungan antar pemeluk agama. Doktrin Islam juga mengajarkan sebagai manusia pilihan. Ketika dua kelompok saling mengklaim sebagai manusia pilihan, maka berujung pada kerusakan hubungan di antara keduanya.

Namun demikian, dewasa ini sudah mulai terjadi kesadaran baru dalam hubungan antar agama-agama. Menurut catatan Diana L. Ecks, bahwa di Amerika Serikat juga sedang tumbuh dengan kuat tentang kehidupan keagamaan yang mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap persahabatan itu dilakukan oleh berbagai elit agama dari berbagai macam agama. Dikalangan kaum Budha yang kebanyakan kaum imigran juga ada kesadaran untuk menyumbang budaya Amerika. Dalam kasus perayaan *Thank Giving*, umat Budha juga dianjurkan agar mereka terlibat di dalam peristiwa budaya tersebut. Termasuk juga kebolehan untuk merayakan kelahiran Yesus sebagai hari kedamaian dan saling menukar cinderamata. Bahkan kelompok Islam juga lebih mengambil tematema perjuangan yang berkonotasi moderat. Corak sikap keislaman seperti ini sangat berbeda dengan beberapa dekade lalu, yang lebih mengambil corak keislaman yang militant. Perubahan ini memicu perubahan pada beberapa kelompok Islam Afrika-

Amerika yang juga menjadi cenderung moderat. (Diana L. Eck, 2001: 339-440)[14] Dewasa ini telah berkembang dengan pesat kegiatan dialog antar umat beragama. Semenjak tahun 1993 di Amerika telah berkembang *America Interfaith Movement*, yang mengusung tema pluralisme agama, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kenyataan-kenyataan di lapangan memberikan pelajaran bahwa di antara mereka memang saling bertetangga, saling bertemu, saling berkomunikasi, sehingga juga saling memahami, menghargai dan membangun kerjasama. *A Multi Religious America* adalah sebuah gambaran tentang pentingnya dialog antar umat beragama dalam pigura humanisasi.

Di Indonesia, gerakan dialog antar umat beragama juga sudah dilakukan secara maksimal. Suatu kenyataan bahwa dialog tersebut baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan kesepahaman tentang perbedaan dan persamaan di antara agama-agama. Perbedaan yang sangat menonjol adalah dimensi teologis dan ritual, namun ada dimensi kesamaan yang diusung oleh masing-masing agama adalah dimensi humanisme agama. Agama apapun akan memperjuangkan keselamatan, kesejahteraan dan keadilan dan kedamaian. Pigura kemanusiaan inilah yang perlu dikedepankan, sebab pada dimensi inilah titik temu agama. Dialog agama tentu bukan dalam khasanah mencari kesamaan-kesamaan doktrin teologis dan ritual, sebab memang harus berbeda. Akan tetapi yang penting adalah menemukan titik kesamaan dalam program kemanusiaan k e depan. Ruang kosong humanitas itulah yang perlu diisi dengan pro-

[14] Menurut Azyumardi Azra ketika membahas buku Diana L. Eck dalam edisi Indonesia, dinyatakan bahwa pluralisme agama memerlukan toleransi. Toleransi dapat menciptakan iklim untuk menahan diri, tetapi belum tentu menghasilkan saling pengertian. Oleh karena itu toleransi saja tidak cukup. Toleransi harus diikuti dengan saling pengertian konstruktif di antara umat beragama. Baca, Azyumardi Azra, Kolom Resonansi, "Pat Robertson" dalam Harian *Republika*, Kamis 1 September 2005.

gram bersama bukan dalam tataran teologis dan ritual tetapi dalam pigura memanusiakan manusia (M. Ridlwan Nasir dan Nur Syam, 2004: 160-174).

Hubungan antar agama yang seperti ini memang bisa dibangun jika masing-masing agama mengusung moderatisme. NU dan Muhammadiyah yang menjadi pilar kehidupan keberagamaan di Indonesia mestinya bisa melakukan dialog ini, sebab keduanya adalah dua organisasi yang memiliki ciri moderatisme yang lebih mengedepankan inklusifisme keberagamaan. Namun persoalan yang adalah ketika dialog itu akan dilakukan terhadap kelompok yang mengedepankan corak keberagamaan yang fundamental dan mengedepankan eksklusifisme keberagamaan.

Ketakutan dunia barat terhadap Islam adalah Islam dalam konstruksi keberagamaan yang bercorak eksklusif tersebut. Pembenaran lapangan terhadap berbagai pelaku terror di banyak Negara adalah mereka yang dikategorikan sebagai Islam garis keras. Bom Bali dilakukan oleh Amrozi cs., Bom London dilakukan oleh jaringan al-Qaidah, kekerasan di Filipina juga terkait dengan jaringan al-Qaidah, demikian pula kekerasan di Mesir, Afghanistan dan sebagainya.

Tema-tema yang diusung oleh kelompok Islam radikal tentang penerapan syariat Islam adalah tema-tema yang "menakutkan". Parlemen Australia melarang perempuan sekolah memakai Jilbab,[15] Pemerintah Inggris melakukan pendataan terhadap imam-imam masjid,[16] mencurigai sekolah-sekolah Islam

[15]Bronwyn Bishop sebagaimana dikutip oleh Stasiun Televisi *Seven Network*, dia menyatakan: "dalam sebuah masyarakat yang ideal, anda tidak perlu melarang apapun. Namun ini terpaksa dilakukan karena apa yang kita lihat dinegeri ini adalah sebuah *clash of cultures*. Sungguh kerudung dijadikan sebagai ikon perlawanan". Periksa Harian *Republika*, Senin, 29 Agustus 2005

[16]Menurut Sunday Time, ada sebanyak 50 orang Imam yang masuk dalam daftar intelijen. Diantara mereka adalah ulama asal Arab Saudi, Mohammad al-Masari dan Saad al-Faqih, serta Imam dari Mesir Yasser al-Siri.

yang dianggap sebagai sumber radikalisme. Demikian pula di beberapa Negara Eropa juga dilakukan hal yang sama. Ini adalah implikasi terhadap kerasnya tuntutan Islam radikal tentang penerapan Syariat Islam yang secara diametral dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Negara-negara sekular tersebut.[17]

Kekerasan, sekali lagi bukan tipe agama-agama. Agama selalu menawarkan doktrin keselamatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, jika terjadi kekerasan agama hakikatnya adalah implikasi dari tafsir agama yang cenderung literalistik, sempit, dan hitam putih.

Tafsir agama itu kemudian dianggap sebagai agama yang bercorak doktriner. Jika ini yang banyak terjadi, maka program kerukunan antar umat beragama yang semenjak Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, melalui konsep tri kerukunan umat beragama, yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah hanyalah akan menjadi pepesan kosong.

Mereka disebut sebagai orang yang menyebarkan kebencian atau *preacher of hates* yang disusun oleh Badan Inteligen dalam Negeri Inggris (M15). Periksa Harian *Republika*, Senin, 29 Agustus 2005.

[17] Dalam apel besar yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia di Masjid Al-Azhar, lagi-lagi juga dikumandangkan tentang pentingnya Khilafah Islam yang menggunakan model pemerintahan zaman Nabi dan *Khulafaur Rasyidin* sebagai prototype pemerintahan yang dapat menjawab masalah-masalah sosial dewasa ini. Dalam pidatonya, Ketua DPP HTI, KH. Muhammad Al-Khaththab dihadapan sekitar 5000 umat Islam dan simpatisan HTI menyatakan: "Hizbut Tahrir menyeru kepada saudara semua, termasuk kalangan militer, agar bersama-sama barisan Hizbut sejak sekarang untuk menegakkan khilafah". Dalam penjelasannya Muhammad Ismail Yusanto, Jubir HTI juga menyatakan: "Gagasan Khilafah ini sudah lama terkubur oleh sejarah dibalik lembaran-lembaran buku, dan kami berusaha mengingatkan kembali bahwa mutlak adanya kita sebagai umat Islam menegakkan kembali khilafah". Periksa Harian *Republika*, Sabtu, 3 September 2005.

Untuk menjawab persoalan ini, Peter L. Berger menawarkan dua konsep penting agar tidak terjadi kekerasan agama, yaitu: *religious revolution* dan *religion subcultures*.[18]

Arahan pertama terkait dengan bagaimana kaum elit agama dapat menumbuhkan dengan cepat kesadaran akan pentingnya model agama yang modern. Di dalam agama yang modern ditandai dengan cirinya yang menghargai pluralitas. Manusia tidak hidup dalam wilayah yang vakum diversitas dan vakum budaya. Manusia tidak hidup dalam ruang dan entitas homogin, tetapi manusia hidup di dalam ruang dan entitas yang heterogin. Maka, agama akan menjadi *mode of communication*,[19] artinya agama menjadi model komunikasi tidak hanya vertikal kepada Tuhan tetapi juga sebagai model komunikasi horizontal. Menempatkan agama sebagai model komunikasi, maka dipersyaratkan adanya kesepahaman mengakui perbedaan dalam banyak hal, tetapi juga memiliki kesamaan misi kemanusiaan.

Religion subcultures yaitu gerakan kaum elit agama untuk mencegah pengaruh luar agama untuk masuk kedalam wilayah agama. Faktor politik dan ekonomi adalah dua variabel penting yang sering mengintervensi kehidupan keberagamaan. Akibatnya banyak hal yang menjadi carut marut karena faktor politisasi agama dimaksud. Agama yang sesungguhnya adalah persoalan moralitas, tertarik ke dalam wilayah politik dan ekonomi yang profan. Implikasinya adalah kesulitan untuk membedakan apakah ini masalah politik atau masalah agama. Gerakan-gerakan Islam radikal, sesuai dengan konstruksinya tentu sangat berbeda dengan konsep ini. Gagasan Nurkholis Madjid tentang Islam Yes, Partai Islam No, dianggapnya sebagai

[18]Konsep *Religious Revolution* dan *Religion subcultures* dinukil dari Happy Susanto, Menyoroti Fenomena Kekerasan Agama, 10/9/2003.

[19] Konsep agama sebagai *Modes of Communication* dinukil dari Peter Beyer, *Religion and Globalization* (London: Sage Publication, Ltd., 1994). Periksa juga Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam* (Surabaya: Eureka, 2005), hlm. 94.

keterpengaruhan paham sekularisme yang memisahkan agama dengan profane lainnya. Padahal yang dimaksud adalah memberikan pembedaan wilayah, mana yang wilayah agama dan mana wilayah politik. Agama terkait dengan persoalan wilayah sacral sedangkan politik terkait dengan persoalan wilayah profane.

Merespon terhadap radikalisme agama, kiranya ada konsep yang perlu dikembangkan adalah membangun kesadaran *universalisme-partikularitas agama*. Konsep ini terkait dengan ajaran agama yang selalu bermuatan universal, baik dalam tataran teologis, ritual maupun moralitas. Konsep teologis dalam agama selalu bercorak universal. Demikian pula konsep ritual dan moralitas yang diusung oleh agama. Namun demikian, konsep teologis dan ritual tersebut dapat diterjemahkan oleh manusia melalui konstruksi sosial masyarakatnya. Dalam masalah teologis, yang sesungguhnya adalah persoalan yang sangat rigid tetapi dalam konteks sosial juga terdapat pemahaman yang berbeda-beda. Dalam praktik ritual, di sana-sini terdapat perbedaan karena penafsiran orang-orang terdahulu tentang ritual.[20] Yang sangat universal adalah persoalan moralitas, terutama yang menyangkut pesan humanisme, keselamatan, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi mesti diandaikan bahwa ditengah universalitas tersebut ternyata terdapat partikularitas yang memang menjadi ciri dari pemahaman manusia tentang yang universal tersebut. Jadi, konsep partikularitas tidak dimaksudkan

[20] Di dalam Islam misalnya dikenal berbagai pemahaman dan praktik keberagamaan yang didasarkan atas faham ahlusunnah wal-jamaah yang terbagi ke dalam empat madzab: Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i serta madzab lainnya yang berhaluan sama, dan Madzab Syiah yang juga berfaksi-faksi seperti Zaidiyah, Itsna Asy'ariyah dan sebagainya yang masing-masing juga mengklaim dirinya yang paling benar. Ketika kemudian muncul faham baru dengan format ajaran baru, maka sesungguhnya juga akan mengklaim diri sebagai pemahaman yang benar. Nah jika seperti ini, maka bukankah sesungguhnya kita sedang bertarung dengan klaim-klaim kebenaran yang kita ciptakan atas dasar pemahaman atau tafsir kita tentang agama.

sama dengan konsep lokalitas agama dalam perspektif antropologis yang dikembangkan oleh Niels Mulder, yaitu agama apapun yang datang ke dalam wilayah suatu budaya juga akan takluk ditangan budaya lokal. Agama pendatang (Islam dan Kristen) hanya kelihatan dipermukaan, tetapi hakikatnya adalah kebudayaan lokal (Niels Mulder, 1999). Namun di dalam konteks ini, yang dimaksud adalah menempatkan agama dalam aras konteks lokalitasnya, yaitu agama sebagai sesuatu yang universal tetapi memiliki corak particular. Agama adalah moralitas yang melazimi berbagai tindakan sosial masyarakatnya. Ia akan bermakna manakala menjadi dasar moralitas dari suatu tindakan. Agama akan kehilangan relevansinya jika ia tidak lagi mampu menjadi dasar moralitas di dalam suatu masyarakat.

Agama juga harus ditempatkan dalam konstruks lokalitasnya. Tidak ada yang dapat mengingkari kebenaran agama secara universal, namun agama juga menyangkut bagaimana ia diterjemahkan oleh masyarakatnya. Agama yang merupakan wahyu Tuhan, ketika berada di tangan manusia maka ia akan menjadi agama manusia. Kebenaran agama adalah kebenaran yang menjadi milik manusia atas dasar tafsirannya tentang ajaran Tuhan pada agama dimaksud. Jadi, *truth claim* kebenaran agama hakikatnya adalah *truth claim* kebenaran hasil konstruksi manusia.

Dari konsep lokalisasi agama ini, kiranya dapat dirumuskan penjabarannya sebagai berikut: *pertama*, menampilkan ajaran Islam yang memiliki moralitas universal. Yang diusung di dalam universalitas adalah moralitas agamanya. Agama apapun akan mengajarkan kemanusiaan, cinta dan kasih sayang, keadilan, kesetaraan, keselamatan dan perdamaian. Persoalan kemanusiaan adalah persoalan universal, sehingga harus diusung oleh semua pemeluk agama. *Kedua*, menggalang pemahaman agama yang tidak sempit dengan klaim kebenaran yang eksklusif. Kesadaran itu bersumber dari pemahaman bahwa ada perbedaan

teologis dan ritual yang tidak terbantahkan, tetapi juga ada dimensi humanitas yang dapat dipertemukan. Faham agama yang eksklusif akan berimplikasi terhadap penyangkalan diversitas kepemelukan agama yang memang menjadi keniscayaan didunia ini. *Ketiga,* mengembangkan sikap keberagaman yang moderat. Moderatisme adalah sikap keberagamaan yang cenderung memberikan ruang bagi yang lain untuk hidup.

Melalui sikap moderat, maka orang lain dengan keyakinan berbeda, pandangan hidup berbeda dan gaya hidup berbeda adalah suatu kewajaran dan kemungkinan di dalam kehidupan.

Dengan memahami prinsip hidup bersama di tengah perbedaan, maka hubungan agama-agama yang selamat dan damai kiranya akan mendapatkan ruang hidup yang memungkinkan.

H. Afiliasi Paham Radikal dalam Lingkungan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan wadah bagi mahasiswa yang memiliki banyak keanekaragam potensi yang dimiliki setiap perorangannya. Baik itu bakat, keahlian, pengetahuan, kepemimpinan, dan intelektual. Disamping itu sebenarnya mahasiswa masih mencari kearah mana orientasi masa depan yang akan ditempuh. Sehingga mereka masih memerlukan beberapa pengaruh yang dapat menunjang dan memfasilitasi prinsip dan jati diri yang sedang dicari.

Oleh sebab itulah, ada beberapa kelompok radikal yang memanfaatkan kondisi mahasiswa yang masih labil untuk dipengaruhi dengan konsep radikalisme yang mereka bawakan. Padahal sejatinya konsep radikalisme tidak sepenuhnya mengarah pada kekerasan, pemaksaan, ataupun menjurus hal-hal yang negatif.

"Radikalisme itu adalah suatu perubahan yang cepat, tak semua negatif, radikalisme yang destruktif adalah yang tak boleh ditiru, justru semangat mahasiswa yang radikal terkadang

dibutuhkan untuk perubahan ke arah yang lebih baik," (Jusuf Kalla, Okezone.com 19/05/11).

Generasi muda yang masih penuh gairah dalam menuntut ilmu tentulah sangat membanggakan. Apalagi jika dapat meraih suatu prestasi atau aktif dalam berbagai organisasi yang nasionalis yang barang kali bisa memfasilitasi rasa nasionalisme pada bangsa ini. Itulah mungkin yang diharapkan oleh Jusuf Kalla secara tersirat.

Namun kejadian belakangan ini sangat jauh dari apa yang diharapkan. Kasus terjadinya bom buku di Utan Kayu tanggal 15 Maret 2011 yang sasarannya adalah Ulil Absar Abdala, anggota Jaringan Islam Liberal, sampai temuan terakhir tanggal 26 April 2011, ditemukannya bom dipintu air Cililitan. Kegiatan teror dan radikal ini meresahkan berbagai kalangan masyarakat. Yang mengejutkan banyak pihak, ternyata sebagian besar pelaku bom buku dan perencana bom Serpong merupakan lulusan perguruan tinggi, bahkan diantaranya lulusan perguruan tinggi Islam. Pelaku jelas-jelas menunjukkan pemahaman keagamaan Islam dengan cara sempit, bercorak eksklusif, dan keras. (Lutfi Zanwar Kurniawan, hmimpofeuii.blogspot.com, 2011)

Ada lagi kejadian yang menyebutkan sebelas mahasiswa menghilang di Malang, Jawa Timur. Kemudian muncul kabar adanya peristiwa penyekapan mahasiswa di Universitas Diponegoro Semarang. Kampus dan mahasiswa seakan menjadi lahan dan sasaran utama kelompok NII untuk merekrut anggotanya. (Radar Lampung, 05/05/2011) Kampus yang selama ini dikenal sebagai tempat persemaian manusia berpandangan kritis, terbuka, dan intelek, ternyata tidak bisa imun terhadap pengaruh ideologi radikalisme. Radikalisme menyeruak menginfiltrasi kalangan mahasiswa di berbagai kampus. Dari masa ke masa di lingkungan kampus hampir selalu ada kelompok radikal baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.

Kasus seperti diatas dapat ditemukan dalam skala berbeda di banyak perguruan tinggi. Beragam penelitian dan pengakuan

mereka yang keluar dari sel-sel radikal dan ekstrim mengisyaratkan, mahasiswa perguruan tinggi umum lebih rentan terhadap *recruitment* daripada mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi agama Islam. Gejala ini jelas berkaitan dengan kenyataan bahwa cara pandang mahasiswa perguruan tinggi umum khususnya bidang sains dan teknologi, cenderung hitam putih. Sedangkan mahasiswa perguruan tinggi agama Islam yang mendapat keragaman perspektif tentang Islam cenderung lebih terbuka dan bernuansa (Azyumardi Azra, Kompas, 27/4/11)

Modus perekrutan yang biasa dilakukan oleh jaringan tersebut secara umum seperti berikut:

1. Mengajak dengan alasan menemui teman yang baru kembali dari Timur Tengah atau teman yang mendapat pencerahan lewat seminar tentang bangkitnya Islam.
2. Mengajak dengan alasan mencarikan kerja.
3. Mengajak ke rumah teman atau semacamnya.
4. Setiap jamaah memiliki target 10 orang untuk dihadirkan setiap bulan, umumnya teman kuliah, SMU, SMP dan SD.
5. Bagi perekrut tanpa target, umumnya "*hunting*" di kampus-kampus, mal dan toko buku.
6. Semua modus berakhir di Malja (kantor/markas) dan proses doktrinasi akan dilakukan di dalam kamar tertutup.
7. Pemberi materi seorang laki-laki, umumnya seorang *Mas'ul* (pimpinan).

Selain itu dalam usaha perekrutannya, jaringan NII memiliki beberapa karakteristik yang bisa dikenali:

1. Untuk merekrut menggunakan dua orang jamaah, satu orang pemancing dan lainnya pengajak.
2. Pemancing bertugas mengawasi dan mengawal serta memotivasi calon jamaah.
3. Pemancing berpura-pura sebagai calon jamaah.

4. Pemancing dan pengajak mengawal calon jamaah hingga tahap hijrah, termasuk menginap di rumah calon jamaah dan pencarian dana untuk shadaqah hijrah.
5. Umumnya perekrut melakukan screening lewat dialog tentang gerakan sesat untuk mengukur pengetahuan calon jamaah tentang NII.
6. Yang dihindari oleh perekrut adalah anak polisi dan anak TNI.

Jika seorang mahasiswa telah terpengaruh oleh paham seperti itu dan telah berhasil direkrut oleh jaringan NII, dia akan terjebak dengan banyak kewajiban dan kepentingan. Misalnya saja seperti kewajiban menyetor dana setiap hari. Hal ini tentu akan memaksa mereka melakukan tindakan kriminal pada lingkungannya. Mencuri dari orang diluar kelompok, menipu orang tua dengan alasan menghilangkan laptop, HP, merusakkan barang teman, membantu operasi orang tua teman, dll. Pada akhirnya, yang mereka hadapi hanyalah tindakan yang merugikan orang banyak dan diri sendiri. Perkuliahanpun rela mereka tinggalkan hanya untuk menjalani aliran yang tak berpedoman secara benar kepada syariat-syariat Islam sesungguhnya.

I. Deradikalisasi Kampus

Perguruan Tinggi adalah suatu komunitas ilmiah. Suatu komunitas yang memiliki karakteristik akademik. Disinilah tempat dimana produk intelektual dilahirkan, dikembangkan dan diimplementasikan. Dengan kata lain perguruan tinggi merupakan laboratorium bagi masyarakat, yang memberikan kontribusi bagi terciptanya proses pemberdayaan berfikir sesuai dengan khasanah ilmu dan kapasitas yang dimiliki untuk dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Esensi peran dan fungsi perguruan tinggi tersebut tertuang ke dalam pola orientasi yang menjadi bagian dari kegiatan akademik atau yang biasa dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian). Berbicara tentang pendidikan, maka perguruan tinggi bukan hanya menciptakan suatu mekanisme kegiatan belajar-mengajar secara formal saja. Tetapi ia juga harus mampu menumbuh-kembangkan nilai di dalam pendidikan. Nilai yang dimaksud itu adalah bahwa didalam pendidikan terdapat budaya dan etika yang harus dipegang. Karena pendidikan hanya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks itulah maka pendidikan (khususnya di perguruan tinggi) harus setidaknya mengambil ikhtiar dari hakekat ilmu, yaitu dikaji secara ilmiah dan dianalisa secara kontekstual agar bermanfaat bagi individu, masyarakat bangsa dan negara.

Berkaitan dengan pengaruh radikalisme yang belakangan ini menyeruak, maka perguruan tinggi mempunyai tanggungjawab besar dalam menangkal dampak negatif dari jaringan radikal. Sebagai garda depan dalam memantau perkembangan mahasiswa dari berbagai aspek, lembaga pendidikan ini diharapkan mempunyai orientasi yang jelas dan tepat dalam menanamkan nilai nasionalisme yang benar kepada mahasiswanya. Namun bukan hanya pihak lembaga pendidikan saja yang harus turut andil dalam menyikapi tuntutan tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga memiliki tanggungjawab penuh, khususnya departemen pendidikan pada masalah ini. Sistem pendidikan yang kurang maksimal dan kurang mampu memfasilitasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan ajaran agama secara tepat menjadi celah bagi jaringan radikal untuk menyebarkan pemahamannya.

Semenjak runtuhnya orde baru, penataran P4 yang saat itu memang terasa dipaksakan pada akhirnya dihentikan dan ditiadakan. Namun bukan dampak positif yang berkembang dimasyarakat. Akan tetapi sikap dan moral bangsa yang terkesan

lebih bebas dan tanpa memiliki pedoman sedikitpun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persatuan dan kesatuan bangsa pun terasa mulai menipis dengan makin maraknya aksi perkelahian, tawuran antar kelompok, bahkan pemberontakan yang mengarah pada keinginan keluar dari NKRI ini. Makin parahnya lagi, sikap radikal yang tak bermoral tersebut telah merambah ke ruang lingkup pendidikan di Indonesia. Tawuran antar pelajar SMA ataupun mahasiswa sudah menjadi hal yang biasa bahkan menjadi konsumsi bagi beberapa oknum. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena generasi muda yang kelak menjadi pemimpin bangsa hanya memiliki moral yang brutal dalam diri mereka.

Untuk itulah diperlukannya revitalisasi mata kuliah yang bersifat ideologis pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan agama (dengan tidak menerapkan sistem yang memaksa seperti penataran P4). Dengan memahami pancasila mahasiswa diarahkan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan ke-Indonesiaan, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Kemudian melalui pendidikan agama, akan diarahkan dalam penguatan perspektif keagamaan-kebangsaan dan diorientasikan untuk penguatan sikap intelektual tentang keragaman agama serta toleransi intra agama dan antar agama serta antara umat beragama dengan negara. Sehingga mereka akan memiliki prinsip dan pandangan yang jelas dalam kehidupan berbangsa ini. Juga mereka akan mampu untuk lebih memilih dan memilah paham-paham radikal yang berkembang di masyarakat karena telah mempunyai pemahaman yang cukup berkaitan dengan korelasi agama dengan kenegaraan.

Selain dari aspek kurikulum yang patut diajarkan di lingkungan kampus, perlu juga upaya pendorong agar organisasi yang terbentuk di perguruan tinggi lebih efektif diikuti oleh mahasiswa. Karena, dari lingkup organisasi inilah mahasiswa akan benar-benar terlatih untuk hidup dalam suatu masyarakat yang majemuk. Dalam suatu masyarakat yang mempunyai beragam

cara berinteraksi, memiliki berbagai macam ide kreatifitas, dan pandangan-pandangan mengenai permasalahan negara. Yang tentunya semua aspek tersebut dibimbing ke arah yang positif dan bermanfaat. Sehingga mereka akan terlatih jiwa kepemimpinan, kemufakatan, dan nasionalisme kebangsaan.

J. Roadmap Deradikalisasi

Kekerasan sebagai ciri utama kelompok radikal melakukan aksinya. Tindak kekerasan yang terjadi selama tahun 2011-2012 dilihat dari faktor penyebabnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Politik
   Berkaitan dengan tuntutan masyarakat Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah tentang pembagian sumber daya, ketidakjelasan upaya penegakan hukum, dll.
2. Agama
   Berkaitan tekanan kelompok mayoritas terhadap minoritas dalam hal pemberian ijin tempat ibadah, *sweeping* yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) ke wilayah-wilayah yang dipersepsikan maksiat, *sweeping* yang dilakukan FPI ke tempat ibadah Islam aliran Ahmadiah, dll.
3. Sosial Ekonomi
   Penganiayaan kelompok suku/agama/ras/golongan minoritas oleh kelompok mayoritas, kasus-kasus konflik yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, pengusiran pedagang kaki lima (PKL) oleh aparat pemerintah, tumbuhnya supermarket skala besar/pasar moderen, intimidasi masyarakat yang dilakukan aparat pemerintah/pengusaha terhadap penguasaan lahan, dll.

Meningkatnya secara kuantitas tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah, pengusaha, atau masyarakat mengindikasikan bahwa benih-benih radikal tumbuh di ranah publik. Bila hal ini tidak ditangani secara intensif, tindak kekerasan ini cepat berubah dalam sikap radikal. Penanganan tindak

kekerasan dalam skala kecil bila dilakukan secara intensif tentu akan lebih mudah dibandingkan ketika sudah menjadi besar. Pembiaran tindak kekerasan oleh negara sekecil apapun, hendaknya segera diselesaikan dalam ranah hukum dan pembinaan oleh negara secara berkelanjutan.

Penanganan kelompok-kelompok radikal dewasa ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan cara seperti menghadapi ancaman musuh atau ancaman pertahanan keamanan konvensional dengan mengangkat senjata. Kekerasan dan tindakan radikal tidak selamanya harus dihadapi dengan cara kekerasan pula, perlu dilihat kasus perkasus. Mengapa? Sebab sikap radikal menyangkut pola pikir, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan, pemikiran, dan strategi baru yang dapat diterima oleh kelompok radikal. Pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh negara, tidak saja akan memberi kesan negatif pada negara tetapi juga menimbulkan banyak korban baik material ataupun immaterial. Oleh karena itu perlu digunakan cara atau pola baru yang dapat merangkul kelompok-kelompok radikal.

Ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu, seakan-akan paham, sikap, dan perilaku radikal tidak pernah habis di Indonesia. Keberadaan kelompok radikal ini semakin hari semakin canggih, baik dari segi kualitas ataupun kuantitasnya. Kelompok-kelompok radikal ini lebih cerdas, sistematis, dan terorganisir dengan baik, lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan situasi dan kondisi. Secara kuantitas, jumlah yang terlibat semakin besar dengan skop yang lebih luas; sedangkan dari segi kualitas, kelompok radikal ini cerdas memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk merancang hal-hal yang sifatnya radikal. Misalnya mampu menggunakan kepandaiannya dalam ilmu fisika atau kimia untuk merakit bom, merakit senjata, dll. Pembiaran yang dilakukan oleh negara ketika kelompok radikal ini kecil, maka di kemudian hari hal tersebut akan menjadi bom waktu. Contoh: Kasus Baasyir dari Pe-

santren Ngruki sebagai tertuduh atau otak dibalik kasus pengeboman di Indonesia. Berbagai kelompok radikal diberantas oleh negara, tetapi seakan kelompok radikal ini tidak akan pernah habis.

Kelompok radikal muncul sebagai perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap akan merugikan kelompoknya. Cara-cara dialog, persuasif atau cara diplomatis seringkali tidak dapat memberikan hasil secara cepat, sehingga cara kekerasan dianggap lebih cepat dalam mencapai tujuan. Derasnya arus informasi, kuatnya modal kapitalisme, budaya konsumerisme yang terus meningkat dan hal-hal yang berbau kapital/Barat seringkali menjadi faktor pengikat diantara kelompok radikal atau dapat juga disebut faktor penarik seseorang bergabung ke dalam kelompok radikal. Indoktrinasi yang dilakukan seringkali mengatasnamakan agama, sehingga dianggap paling tepat untuk menanamkan sikap kebencian dan permusuhan kepada agama atau kelompok lain.

Radikalisme apapun bentuknya, tidak hanya terbatas pada radikalisme yang mengatasnamakan agama, bila ditelusuri pasti memiliki akar. Akar radikalisme ini yang seharusnya dipahami oleh pemerintah dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan negara. Dewasa ini penanganan kelompok radikalisme dengan menggunakan perang terbuka tidak mampu menumpas sampai keakarnya. Ingat penanganan kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Konflik Poso, Organisasi Papua Merdeka (OPM), dll. tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Cara kekerasan ternyata tidak efektif untuk mencabut akar seseorang atau kelompok melakukan perilaku radikal, tetapi melalui dialog maka penyelesaian kasus tersebut dapat dilihat hasilnya dan tidak lagi menimbulkan korban.

Pengalaman pemerintah menangani GAM selama masa Orde Baru merupakan pembelajaran demokrasi yang baik bagi negara dalam menangani kasus radikal. Selama masa Orde Baru, penanganan melalui cara-cara persenjataan atau perang terbuka,

ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya yang terjadi adalah banyak memakan korban baik bagi GAM atau negara, serta menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Penyelesaian secara dialog justru efektif untuk menyelesaikan akar radikalisme GAM, diantaranya: melalui pemberian otonomi khusus, peninjauan kembali proporsi bagi hasil sumberdaya antara pemerintah pusat dan daerah, dll. Sejarah menunjukkan penanganan radikalisme bila tidak sampai mencabut akar-akarnya, maka dapat dikatakan negara gagal memutus mata rantai gerakan radikalisme. Kesulitan yang dihadapi negara diantaranya adalah banyaknya akar yang membuat gerakan radikal ini tumbuh subur, dan negara kadang tidak mampu untuk membacanya. Oleh karena itu diperlukan dialog yang intensif antara negara dan masyarakat atau kelompok-kelompok radikal.

Pembiaran negara terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat baik menyangkut masalah hukum, keamanan, ekonomi, sosial budaya, dll atau bahkan masukan atau kritik masyarakat yang tidak ditanggapi negara secara proporsional merupakan contoh bahwa negara melakukan pembiaran terhadap masyarakat. Masyarakat istilahnya hanya didekati atau diajak berdialog ketika menjelang pemilu menunjukkan adanya pragmatisme pemerintah terhadap kekuasaan, namun setelah berkuasa cenderung melupakan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Janji-janji atau program penguasa dapat dengan mudahnya dilupakan, dan masyarakat berjuang menyelesaikan permasalahannya sendiri. Akumulasi permasalahan yang dihadapi masyarakat ini, dapat menjadi akar tumbuhnya radikalisme.

Masyarakat atau kelompok yang terpinggirkan oleh negara ini bila diakumulasi diindoktrinasi melalui ideologi atau doktrin yang dapat mempersatukan, maka hal ini dapat memperkuat akar radikalisme. Melalui cara indoktrinasi ini, anggota kelompok radikal dapat melakukan *brain wash* sehingga cara-cara

revolusioner diperbolehkan untuk mencapai tujuan perjuangannya. Berbagai kasus pengeboman yang dilakukan oleh pelaku yang tertangkap pada kasus-kasus pengeboman di Jawa atau kasus teroris menunjukkan bahwa pelaku sebagian besar berasal dari golongan menengah ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kesenjangan ekonomi yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga mengakarkan rasa kebencian anggotanya kepada sistem perekonomian kapitalisme Barat yang ada. Cara ini dikemas demikian hebatnya hingga menimbulkan rasa permusuhan terhadap suku, agama, ras, antar golongan lainnya yang tidak sepaham. *Brain wash* ini dilakukan dengan berbagai macam cara, dan cara yang dianggap efektif adalah cara-cara ideologis. Misalnya melakukan pembunuhan dapat dianggap jihad, sehingga tidak segan-segan kelompok radikal melakukan teror meskipun harus mengorbankan diri sendiri melalui bom bunuh diri.

Strategi penanganan kelompok radikal ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Permasalahan ideologi, tentunya juga harus diselesaikan dengan persoalan ideologi yang harus didukung oleh kebijakan negara. Hilangnya nilai-nilai kebersamaan, meningkatnya rasa individualisme di kalangan masyarakat, kurangnya rasa kemanusiaan dan sikap toleran terhadap orang lain menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses pendidikan negara. Tingkat religius masyarakat Indonesia yang secara fisik tinggi, ternyata tidak berkorelasi signifikan terhadap perilaku masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dapat menjadi pegangan negara dan masyarakat dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat hanya menjadi slogan yang didogmakan. Nilai-nilai Pancasila ini perlu dibumikan kembali dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penulis meyakini nilai-nilai dasar negara Pancasila dapat membendung ancaman radikalisme.

Senada dengan Penulis, Latif (2011) menyatakan bahwa berkembangnya radikalisme dapat terjadi karena faktor sebagai berikut:

1. Keagamaan dan kebudayaan, hal ini diperlukan mengingat banyak gerakan dan ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia tanpa ada filter kebudayaan yang kuat.
2. Rapuhnya nilai-nilai keagamaan. Agama dipandang dan dilaksanakan sebagai sebuah perilaku legal formalistik.
3. Macetnya pergaulan yang berkemajemukan, artinya bangsa Indonesia ini bangsa yang plural tetapi sikap kita sering monokultural.
4. Politik yang menjauh dari masyarakat, hal ini dapat dilihat pada cara pengambilan keputusan politik banyak yang berimplikasi pada tereliminasinya kelompok tertentu dari politik.
5. Munculnya terorisme karena tidak berjalannya *sense of conception of justice.* Terorisme muncul karena skeptisisme terhadap demokrasi, dan demokrasi dianggap sebagai sistem kafir.

Menghadapi kelompok radikalisme ini, mengambil analisis Althusserian dalam Gidden dan Held (1987:84-107) maka negara/pemerintah dapat memanfaatkan dua instrumen pokok untuk memperkuat kekuasaannya dan sekaligus memperlemah kelompok radikal. Caranya dengan membuat instrumen *Ideological State Aparatus (ISA)* dan *Repressive State Apparatus (RSA).* ISA dapat dioperasionalkan melalui cara persuasif dan acuan untuk melaksanakan RSA. Implementasi RSA ini berbentuk peraturan perundang-undangan dan pemberlakuan hukum secara tegas sampai dengan perlakuan kekerasan bagi kelompok radikal. Namun demikian penggunaan kekerasan perlu dibatasi mengingat cara ini tidak efektif untuk memberantas radikalisme sampai seakar-akarnya. Penggunaan cara-cara kekerasan dapat dianalogikan dengan memangkas sebuah pohon, sehingga

akarnya masih tetap hidup, bahkan memungkinkan untuk hidup kembali lebih kuat dari sebelumnya.

Penghayatan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui: rekonstruksi budaya, rekonstruksi pendidikan formal, atau reinterpretasi ajaran agama. Rekonstruksi budaya misalnya dapat dilakukan dengan merubah budaya kekerasan yang selama ini berkembang menjadi budaya toleran. Rekonstruksi budaya ini juga perlu diperkuat dengan rekonstruksi kurikulum pendidikan formal. Disinyalir kurikulum pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi mengalami disorientasi terhadap ajaran-ajaran toleransi, yang berkembang justru ajaran-ajaran fundamentalisme yang mengerikan. Sedangkan reinterpretasi ajaran agama sangat diperlukan mengingat saat ini agama terasa kering dan miskin nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, dan melahirkan sikap fanatisme yang menakutkan. Rekonstruksi budaya dan interpretasi budaya dalam analisis Althusserian dapat dikategorikan sebagai upaya negara dalam melakukan ISA sedangkan rekonstruksi kurikulum pendidikan formal atau kebijakan-kebijakan negara yang dikeluarkan pemerintah dikategorikan sebagai RSA. Cara-cara deradikalisasi oleh negara ini harus didukung secara komprehensif oleh infrastruktur yang ada.

Misalnya deradikalisasi dalam Islam perlu dilakukan secara komprehensif, misalnya melalui dakwah kebudayaan sebagai antitesis sekaligus sintesis meningkatnya radikalisme Islam. Pendekatan yang dilakukan dapat dilakukan berbagai macam cara, contohnya: menganjurkan membaca sejarah Islam secara holistik, obyektif, dan komprehensif (tidak parsial). Bukan sejarah Islam dipahami, dimaknai, dan dipolitisir sebagai pembenaran terhadap paham, sikap, atau perilaku radikal. Radikalisme ini dapat berlaku dalam semua agama (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Yahudi), tidak hanya dalam Islam.

Kelompok radikal atau teroris jelas membatasi warga negara melakukan partisipasi politik, terlebih bagi golongan minoritas.

Golongan minoritas senantiasa menjadi sasaran kelompok-kelompok radikal keagamaan. Oleh karena itu negara perlu melakukan kontrol untuk menumbuhkan kelembagaan politik yang demokratis yang mampu menampung partisipasi masyarakat. Tumbuhnya beberapa rumah aspirasi, rumah perubahan, rumah singgah, dll. Merupakan salah satu contoh yang dapat menjembatani kebuntuan politik dan ekonomi. Saluran-saluran seperti ini bisa lebih diberdayakan oleh negara sebagai salah satu cara merangsang partisipasi politik warga negara. Saluran-saluran politik dalam parpol yang selama ini kurang berperan dalam menampung aspirasi masyarakat perlu dibina oleh negara agar dapat menjalankan fungsinya untuk mengartikulasi, menampung dan merepresentasikan berbagai kepentingan yang berkembang di masyarakat. Cara ini dianggap efektif untuk mendekatkan parpol ke masyarakat. Adanya hubungan kedekatan antara parpol dengan masyarakat, maka parpol dapat berperan menjadi saluran berbagai informasi untuk memberikan pendidikan politik minimal warga negara sadar akan hak dan kewajibannya. Penguatan negara pada lembaga-lembaga untuk membangun *civil society* ini sangat diperlukan untuk membendung derasnya arus informasi yang ada. Radikalisme merupakan ancaman nyata mewujudkan *civil society.*

BAB III
METODE KAJIAN

Kajian pada buku ini berfokus pada persepsi dan sikap Pengurus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap radikalisme Islam. Dengan demikian buku ini tidak mengkaji aspek normatif dari radikalisme Islam. Buku ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian atas persepsi atau sikap tertentu terhadap radikalisme Islam. Buku ini hanya bermaksud memberikan gambaran apa adanya mengenai persepsi elit Muhammadiyah dan NU di Propinsi Jawa Tengah terkait dengan radikalisme Islam di Indonesia

A. Subjek Kajian

Subyek kajian dalam buku ini adalah para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah meliputi para Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

Buku ini mengambil 30 orang responden, masing-masing 15 dari Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan 15 dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Profil subjek Persepsi dan Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

Adapun profil responden dari elit Muhammadiyah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Rekapitulasiresponden Elit Muhammadiyah Berdasar Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Profesor/Guru Besar	4	26,7%
2.	Strata 3 (S3)	5	33,3%
3.	Strata 2 (S2)	6	40%
4.	Strata 1 (S1)	-	0%
Jumlah		15	100%

Grafik 1.1
Data Rekapitulasir Responden Elit Muhammadiyah Berdasar Tingkat Pendidikan

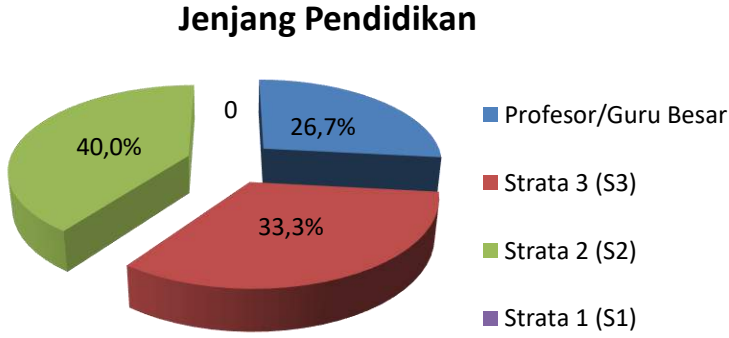

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa responden dari unsur elit Muhammadiyah Jawa Tengah tentang Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme Islam di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan dapat dipaparkan sebagai berikut: responden berjenjang professor/guru besar sebanyak 26,7% atau sebanyak 4 orang dari 15 responden. 33,3% berjenjang pendidikan strata 3 (S3) atau sebanyak 5 orang dari 15 responden. Dan 40% berjenjang pendidikan Strata 2 (S2) atau sebanyak 6 orang dari 15 responden.

Tabel 1.2
Data Rekapitulasi Responden Elit Muhammadiyah Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1.	Ketua Umum	1	6,7%
2.	Ketua Bidang/Wakil Ketua	11	73,3%
3.	Sekretaris/Wakil Sekretaris	2	13,3%
4.	Bendahara	1	6,7%
Jumlah		15	100%

Grafik 1.2
Data Rekapitulasi Responden Elit Muhammadiyah Berdasarkan Jabatan

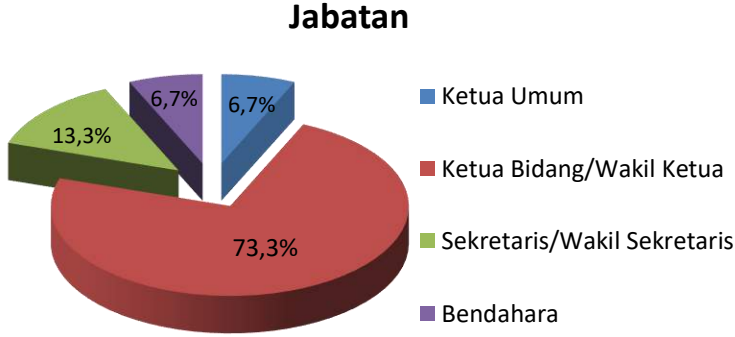

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa responden dari unsur elit Muhammadiyah Jawa Tengah tentang Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme Islam di Indonesia berdasarkan Jabatan dapat dipaparkan sebagai berikut: responden dengan jabatan wakil ketua sebanyak 73,3% atau 11 orang dari 15 responden. 13,3% memegang jabatan sekretaris/wakil sekretaris atau

sebanyak 2 orang dari 15 responden. Dan sebesar 6,7% memegang jabatan ketua umum dan bendahara atau masing-masing 1 orang dari 15 responden.

Tabel 1.3
Data Rekapitulasi Responden Elit Muhammadiyah Berdasarkan Jenis Organisasi

No.	Organisasi	Jumlah	Prosentase
1.	PWM Jateng	4	26,6%
2.	PWM Majlis	7	46,8 %
3.	PWM Lembaga	4	26,6%
Jumlah		15	100%

Grafik 1.3
Data Rekapitulasi Responden Elit Muhammadiyah Berdasarkan Jenis Organisasi

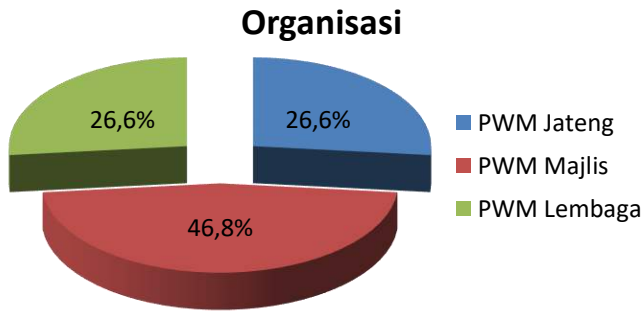

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa responden dari unsur elit Muhammadiyah Jawa Tengah tentang persepsi dan sikap terhadap radikalisme Islam di Indonesia berdasarkan jenis organisasi dapat dipaparkan sebagai berikut: responden dengan organisasi Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jateng sebesar 26,6% atau sebanyak 4 orang dari 15 responden. Sebanyak 46,8% dari PWM Majlis atau sebanyak 7 orang dari 15 responden.

selanjutnya 26,6% atau sebanyak 4 orang dari 15 responden dari organisasi PWM Lembaga.

Sedangkan profil responden dari elit Nahdlatul Ulama Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Rekapitulasi Responden Elit Nahdlatul Ulama Berdasar Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	Profesor/Guru Besar	1	6,7%
2.	Strata 3 (S3)	5	33,3%
3.	Strata 2 (S2)	5	33,3%
4.	Strata 1 (S1)	4	26,7%
Jumlah		15	100%

Grafik 2.1
Data Rekapitulasiresponden Elit Nahdlatul Ulama Berdasar Tingkat Pendidikan

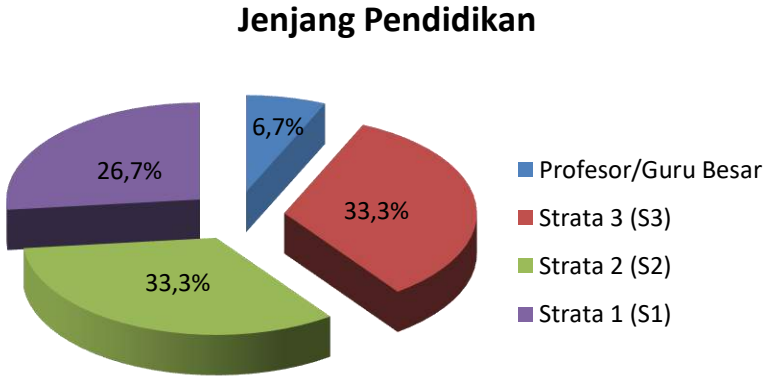

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa responden dari unsur elit Nahdlatul Ulama Jawa Tengah tentang Persepsi dan

Sikap terhadap Radikalisme Islam di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan dapat dipaparkan sebagai berikut: responden berjenjang professor/guru besar sebanyak 6,7% atau 1 orang dari 15 responden. 33,3% berjenjang pendidikan strata 3 (S3) dan Strata 2 (S2) atau masing-masing 5 orang dari 15 responden. Dan 26.7% berjenjang pendidikan Strata 1 (S1) atau sebanyak 4 orang dari 15 responden.

Tabel 2.2
Datarekapitulasi Responden Elit Nahdlatul Ulama Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1.	Ketua Umum/Syuriyah	2	13,4%
2.	Ketua Bidang/Wakil Ketua	5	33,3%
3.	Sekretaris/Wakil Sekretaris	3	20%
4.	Anggota/Departemen	5	33,3%
Jumlah		15	100%

Grafik 2.2
Datarekapitulasi Responden Elit Nahdlatul Ulama Berdasarkan Jabatan

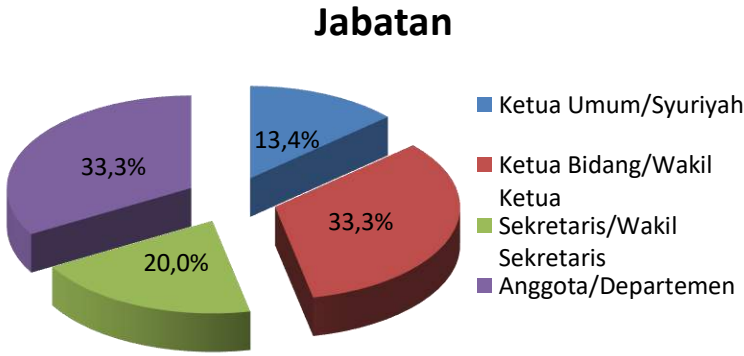

Berdasarkan grafik diatas dijelaskan bahwa responden dari unsur elit Nahdlatul Ulama Jawa Tengah tentang Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme Islam di Indonesia berdasarkan Jabatan dapat dipaparkan sebagai berikut: responden dengan jabatan Ketua Umum/Syuriyah sebanyak 13,4% atau 2 orang dari 15 responden. 33,3% memegang jabatan Ketua Bidang/Wakil Ketua dan Departemen/Anggota atau masing-masing 5 orang dari 15 responden. Dan 20% atau sebanyak 3 orang dari 15 responden memegang jabatan sekretaris/wakil sekretaris.

Tabel 2.3
Data Rekapitulasi Responden Elit Nahdlatul Ulama Berdasarkan Jenis Organisasi

No.	Organisasi	Jumlah	Prosentase
1.	PWNU Jateng	3	20%
2.	LP Ma'arif Jateng	6	40 %
3.	RMI NU Jateng	2	13,3%
4.	Lajnah Falakiyyah Jateng	1	6,7%
5.	IPNU/IPPNU Jateng	3	20%
Jumlah		15	100%

Berdasarkan grafik 2.3 dijelaskan bahwa responden dari unsur elit Nahdlatul Ulama Jawa Tengah tentang Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme Islam di Indonesia berdasarkan Jenis Organisasi dapat dipaparkan sebagai berikut: responden dengan organisasi LP Ma'arif Jateng sebanyak 40% atau sebanyak 6 orang dari 15 responden. Sebanyak 20% dai organisasi PWNU dan IPNU/IPPNU Jateng atau masing-masing 3 orang dari 15 responden. selanjutnya sebanyak 13,3% atau 2 orang dari 15 responden dari organisasi RMI NU Jateng. Dan sebesar 6,7% dari organisasi Lajnah Falakiyah NU Jateng atau sebanyak 1 orang dari 15 responden.

Grafik 2.3
Data Rekapitulasi Responden Elit Nahdlatul Ulama Berdasarkan Jenis Organisasi

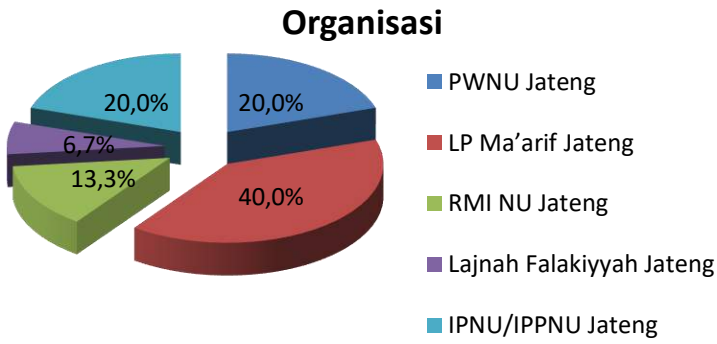

B. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan mengumpulkan data melalui metode angket, wawancara dan dokumentasi.

Angket dilakukan untuk mendapatkan data secara kuantitatif persepsi dan sikap elit Muhammadiyah dan NU terhadap isu radikalisme Islam.

Wawancara dilakukan dengan para Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan NU Jawa Tengah untuk mengetahui persepsi dan sikap mereka tentang radikalisme Islam secara lebih mendalam.

Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui keputusan-keputusan organisasi Muhammadiyah dan NU terkait dengan isu radikalisme Islam di Indonesia, tulisan-tulisan para elit Muhammadiyah dan NU Jawa Tengah di media massa atau teks-teks khutbah yang mereka tulis.

C. Metode Analisis

Kajian dalam buku ini mengunakan mengunakan kuantitatif yang bertujuan untuk menemukan gambaran mengenai persepsi

dan sikap elit Muhammadiyah dan NU di Jawa Tengah terhadap isu radikalisme Islam di Indonesia.

Jawaban responden yang diperoleh dari angket kemudian dianalisis secara bertahap sesuai dengan rumusan masalah.

Untuk mengetahui bagaimana persepsi dan sikap elit Muhammadiyah, jawaban angket dari responden Pengurus Wilayah Muhammadiyah dianalisis perbutir soal. Ini dilakukan untuk mengetahui trend jawaban elit Muhammadiyah pada butir tersebut. Setelah itu ada perhitungan trend jawaban elit Muhammadiyah untuk setiap sub-variabel dan akhirnya untuk keseluruhan jawaban. Prosedur yang sama juga dilakukan untuk mengetahui persepsi dan sikap elit NU terkait radikalisme Islam di Indonesia.

Untuk membandingkan persepsi dan sikap elit Muhammadiyah dan NU di Jawa Tengah terkait dengan radikalisme Islam, jawaban setiap butir soal dari elit Muhammadiyah dan NU disandingkan, sehingga terlihat perbedaan atau persamaannya. Setelah itu disandingkan trend jawaban persubvariabel dari elit Muhammadiyah dan NU. Akhirnya disandingkan trend keseluruhan jawaban dari elit Muhammadiyah dan NU.

D. Kajian Sebelumnya

Buku ini bukanlah kajian pertama yang mengkaji radikalisme yang dikaitkan dengan agama Islam di Indonesia. Cukup banyak studi yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tentang topik tersebut dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Berikut ini disajikan beberapa studi terkait sebelumnya dengan harapan dapat diketahui aspek kebaruan dari studi ini.

Jamhari dan kawan-kawan telah melakukan kajian terhadap 4 (empat) organisasi massa Islam yang teridentifikasi sebagai kelompok Salafi Radikal di Indonesia, meliputi Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad Ahlus Sunnah Waljamaah, Front Pembela Islam, Hizbuttahrir Indonesia (HTI). Masing-masing dijelaskan

mengenai latar belakang berdirinya, tokoh-tokoh pendirinya, struktur organisasi dan tujuan pendirian sekaligus program-program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut.

Studi ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji kelompok-kelompok radikal Islam tersebut, tetapi akan mengkaji bagaimana kelompok Islam memahami radikalisme Islam tersebut dan sikap mereka terhadap radikalisme Islam. Kajian ini penting untuk melihat seberapa besar sebenarnya dukungan kelompok-kelompok mayoritas umat Islam di negeri ini terhadap radikalisme Islam.

Yusuf Qardawi mengkaji cara beragama kelompok Islam radikal dari sudut pandang ortodoksi Islam. Qardawi mendapatkan bahwa kelompok-kelompok Islam radikal telah melakukan langkah-langkah yang melampaui batas, melebihi apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam. Qardawi menekankan perlunya umat Islam untuk menempuh jalan moderat sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Qur'an.

Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian dalam buku ini tidak mengkaji radikalisme Islam dari sudut pandang norma-norma Islam. Tujuan kajian di sini bukan untuk menghakimi kelompok radikal Islam, benar atau salah. Studi ini akan secara objektif menggambarkan bagaimana kelompok Islam mayoritas dalam hal ini para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah memahami radikalisme Islam dan sikap mereka terhadap radikalisme Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta tentang *Radikalisme di Kalangan Pelajar se-Jabodetabek* sangat mengagetkan. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 terhadap guru PAI dan siswa (SMP dan SMA) di Jabodetabek menunjukkan bahwa 49% siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama.

Benih-benih radikalisme Agama di Masjid merupakan laporan dari dua penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, antara tahun 2008-2009. Fokus penelitian ini adalah pemetaan ideologi masjid di DKI Jakarta dan Solo. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masjid di DKI Jakarta masih mengusung gagasan dan pemikiran Islam moderat, sebagian kecil lainnya menyuarakan gagasan Islam radikal. Sementara dari sepuluh masjid yang diteliti di Solo menunjukkan bahwa untuk beberapa derajat masjid di kota Solo telah digunakan untuk sarana penyebaran gagasan Islam radikal.

Achmad Gunaryo dkk, melakukan penelitian dengan judul Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal dalam Pembelajaran PAI pada Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kota Semarang. Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran Islam yang radikal sudah menyebar ke pelajar pada tingkat Sekolah Menengah. penulis merekomendasikan penguatan pemahaman Islam moderat di kalangan siswa untuk mencegah penyebaran radikalisme di kalangan pelajar.

BAB IV
RADIKALISME ISLAM DALAM PANDANGAN ELIT MUHAMAMDIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Dalam Bab ini penulis memaparkan temuan-temuan studi tentang persepsi dan sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia dengan rincian sebagai berikut *Pertama* tentang hasil kajian yang terdiri dari: (1) Persepsi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap radikalisme Islam di Indonesia, (2) Sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap radikalisme Islam di Indonesia, dan (3) Perbandingan persepsi dan sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap radikalisme Islam di Indonesia. *Kedua* Pembahasan tentang persepsi dan sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia.

A. Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa Tengah

Hasil studi tentang persepsi elit Muhammadiyah Jawa Tengah terhadap radikalisme Islam di Indonesia, penulis mendiskripsikan antara lain a. *Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia*, b. *Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme*, c. *Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam dan d. Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme*.

a. Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia

Para elit Muhammadiyah di Jawa tengah sebanyak 40% menyatakan bahwa Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya adalah sesuai. Selain itu elit Muhammadiyah di Jawa Tengah juga menyatakan setuju atau sudah sesuai bahwa di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam sebanyak 67% atau 10 dari 15 responden menyatakan sesuai. Kemudian sebanyak 87% responden juga sepakat bahwa Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham radikal. Pada bagian lain elit Muhammadiyah di Jawa Tengah juga sebanyak 54% menyatakan mendekati sesuai bahwa radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Kemudian para responden melanjutkan bahwa Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah masing–masing sebanyak 47 % menyatakan sesuai dan mendekati sesuai. Adapun deskripsi menyeluruh tentang persepsi terkait keberadaan radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini

Tabel 1.1.1
Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa tengah terkait Keberadaan Radikalisme Islam di Indonesia

A.	Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia	S	MS	KS	TS
1.	Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya	6	3	1	5
2.	Di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan	10	1	1	3

	radikalisme atas nama agama Islam				
3.	Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham radikal	13	2	0	0
4.	Radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda	2	8	4	1
5.	Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah	7	7	1	0
	Jumlah	38	21	7	9
	Prosentase	50.7%	28%	9.3%	12%

Grafik 1.1.1
Persepsi Elit Muhammadiyah di Jawa Tengah terkait Keberadaan Radikalisme Islam di Indonesia

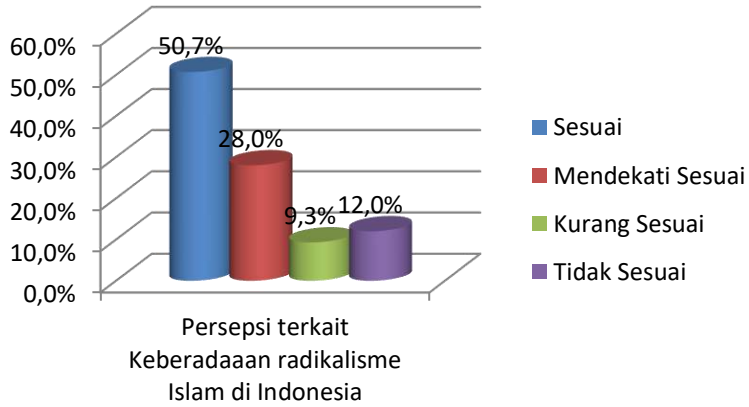

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa persepsi elit Muhammadiyah di Jawa Tengah terkait keberadaan radikalisme Islam di Indonesia sudah sesuai dengan uraian meliputi 50,7% sesuai, 28% mendekati sesuai, dan 12% tidak sesuai

serta 9,3% kurang sesuai dengan uraian sebagai berikut: Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya; Di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam; Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham radikal; Radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda; Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah.

b. Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme

Para elit Muhammadiyah di Jawa tengah sebanyak 73,3% menyatakan bahwa persepsi terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik dinyatakan mendekati Sesuai (11 responden), kemudian sebanyak 73,3% atau mendekati Sesuai (11 responden) masyarakat menyatakan bahwa persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi, selanjutnya persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama sebanyak 60% menyatakan mendekati Sesuai (9 responden), dan persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya 53,3% menyatakan Sesuai (8 responden), selain itu persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam 60% menyatakan mendekati sesuai (9 responden). Adapun deskripsi menyeluruh tentang persepsi terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.1.2
Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa Tengah Terkait Faktor yang Mendorong Radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme di Indonesia	S	MS	KS	TS

B.	Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme				
1.	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik	1	11	2	1
2	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi	1	11	3	0
3	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama	2	9	2	2
4	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya	8	6	1	0
5	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam	2	9	3	1
	Jumlah	**14**	**46**	**11**	**4**
	Prosentase	**18.7%**	**61.3%**	**14.7%**	**5.3%**

Grafik 1.1.2 menjelaskan bahwa Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme sudah sesuai dengan perincian 61,3% mendekati sesuai, 18,7% sesuai, 14,7% kurang sesuai dan 5,3% tidak sesuai, dengan uraian sebagai berikut: Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam.

Grafik 1.1.2
Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa tengah terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia

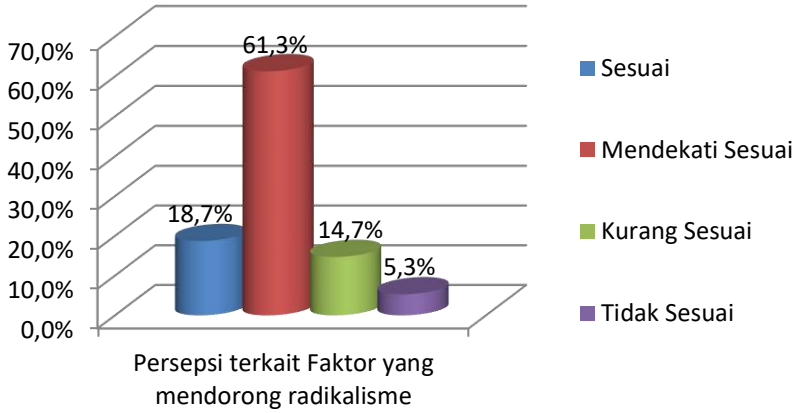

c. Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam

Para elit Muhammadiyah di Jawa tengah sebanyak 80% menyatakan bahwa Persepsi terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia tentang tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun mendapat respon dikatakan oleh 12 responden tidak Sesuai, kemudian persepsi tentang Islam menolak radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat menyatakan sebanyak 73,3% dikatakan Sesuai atau 11 responden, selanjutnya persepsi tentang tindakan radikal diperbolehkan pada saat–saat tertentu para elit Muhammadiyah menyatakan Sesuai sebesar 33,3% (5 responden), selain itu sebanyak 40% menyatakan kurang Sesuai dan tidak Sesuai (sama-sama 6 responden) terhadap persepsi tentang tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar, serta sebanyak 86,7% sepakat tidak Sesuai bahwa persepsi tentang Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan. Adapun deskripsi menyeluruh tentang persepsi terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.1.3
Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa tengah terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme di Indonesia	S	MS	KS	TS
C	Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam				
1.	Tindakan radikal itu diper-bolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun	0	1	2	12
2.	Islam menolak radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat	11	2	2	0
3.	Tindakan radikal diper-bolehkan pada saat – saat tertentu	5	3	4	3
4.	Tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar	1	2	6	6
5.	Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diper-bolehkan	0	0	2	13
	Jumlah	17	8	16	34
	Prosentase	22.7%	10.7%	21.3%	45.3%

Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam di Indonesia adalah tidak sesuai hal ini dapat dilihat dari persepsi responden sebagai berikut 45,3% tidak sesuai dan 22,7% sesuai kemudian 21,3% kurang sesuai serta 10,7% mendekati sesuai, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun; Islam mendukung radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat; Tindakan radikal di-perbolehkan pada saat–saat tertentu; Tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar; Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan.

Grafik 1.1.3
Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa Tengah terkait Keabsahan Radikalisme Islam di Indonesia

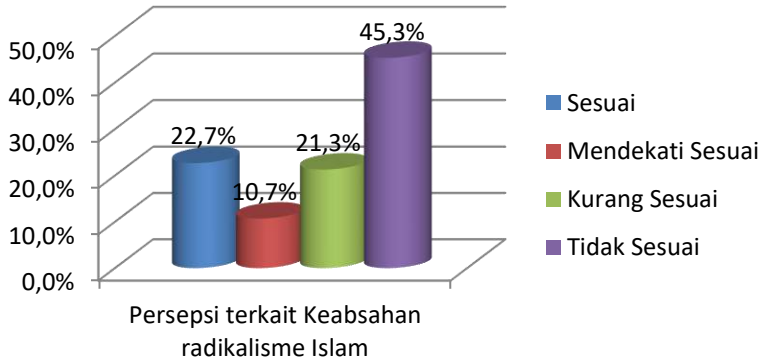

d. Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme

Para elit Muhammadiyah di Jawa tengah sebanyak 53,3% menyatakan bahwa Persepsi terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia tentang tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat dinyatakan Sesuai (8 responden), kemudian persepsi tentang tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat sebanyak 46,7% elit Muhammadiyah menyatakan sesuai atau sebanyak 7 responden, selanjutnya sebanyak 53,3% (8 responden) menyatakan persepsi tentang tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat, selain itu sebanyak 60% elit Muhammadiyah berpendapat bahwa persepsi tentang tindakan organisasi Keagamaan (Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat, disisi lain juga terdapat 80% elit Muhammadiyah menyatakan telah sesuai kalau persepsi tentang Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan. Adapun deskripsi me-

nyeluruh tentang persepsi terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.1.4
Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa Tengah terkait Respon terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme di Indonesia	S	MS	KS	TS
D	**Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme**				
1	Tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	8	2	4	1
2	Tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	7	4	3	1
3	Tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	8	4	3	0
4	Tindakan organisasi Keagamaan (NU dan Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	9	5	1	0
5	Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan	12	1	2	0
	Jumlah	**44**	**16**	**13**	**2**
	Prosentase	**58.7%**	**21.3%**	**17.3%**	**2.7%**

Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme mendekati sesuai dengan 58,7% sesuai, 21,3% mendekati sesuai, 17,3 % kurang sesuai dan 2,7% tidak sesuai, dengan uraian sebagai berikut: Tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan

Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan organisasi Keagamaan (Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan.

Grafik 1.1.4
Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa Tengah terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia

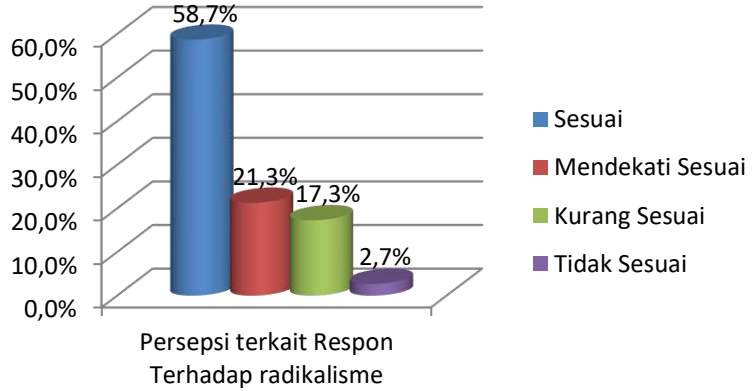

B. Persepsi Elit Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

Hasil studi tentang persepsi elit Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap radikalisme Islam di Indonesia, penulis mendiskripsikan antara lain a. *Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia*, b. *Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme*, c. *Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam dan d. Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme*.

a. Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia

Mayoritas atau sebanyak 73, 4 % para elit Nahdlatul Ulama di Jawa tengah menyatakan bahwa Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya adalah sesuai. Selain itu elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah juga menyatakan setuju atau sudah sesuai bahwa di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam sebanyak 60% atau 9 dari 15 responden menyatakan sesuai. Kemudian sebanyak 87% responden juga sepakat bahwa Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham radikal. Pada bagian lain elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah juga sebanyak 54% menyatakan setuju atau sudah sesuai bahwa Radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Kemudian para responden melanjutkan bahwa Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah sebanyak 67 % menyatakan sesuai dan lainnya mendekati sesuai. Adapun deskripsi mendalam tentang persepsi terkait keberadaan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.2.1
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia

A.	**Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia**	**S**	**MS**	**KS**	**TS**
1.	Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya	11	2		2
2.	Di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam	9	4		2
3.	Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham radikal	13	1	1	

4.	Radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda	8	1	3	3
5.	Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah	10	5		
	Jumlah	**51**	**13**	**4**	**7**
	Prosentase	**66%**	**17,3%**	**5,3%**	**9,4%**

Grafik 1.2.1
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia

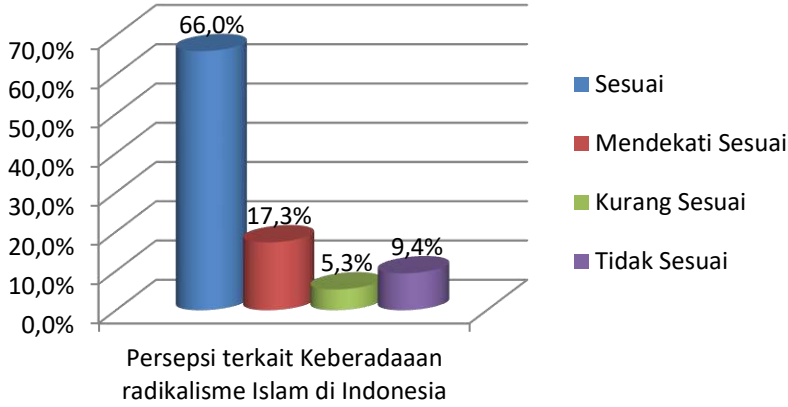

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa persepsi elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait keberadaan radikalisme Islam di Indonesia sudah sesuai dengan uraian 66% sesuai, 17,3% mendekati sesuai, dan 9,4% tidak sesuai serta 5,3% kurang sesuai dengan uraian sebagai berikut: Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya; Di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam; Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham

radikal; Radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda; Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah.

b. Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme

Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia terdapat 60% yang menyatakan bahwa radikalisme didorong oleh kepentingan politik atau sebanyak 9 responden yang menyatakan sesuai, kemudian persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi yang menyatakan sesuai sebanyak 53,3% atau 8 responden, selanjutnya persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama sebanyak 40% sepakat menyatakan Sesuai atau 6 responden, selain itu persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya dikatakan sesuai oleh 73,3% elit NU atau 11 responden, serta persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam juga dikatakan sesuai oleh 66,7% elit NU atau 10 responden. Adapun deskripsi mendalam tentang persepsi terkait factor yang mendorong Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.2.2
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme di Indonesia	S	MS	KS	TS
B.	Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme				
1.	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik	9	5	1	
2	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi	8	5	2	
3	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama	6	2	3	4

4	Radikalisme Islam di Indonesia di-dorong oleh kondisi psikologis para pelakunya	11	3		1
5	Radikalisme Islam di Indonesia di-dorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam	10	4	1	
	Jumlah	44	19	7	5
	Prosentase	58,7%	25,3%	9,3%	6,7%

Grafik 1.2.2
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait factor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia

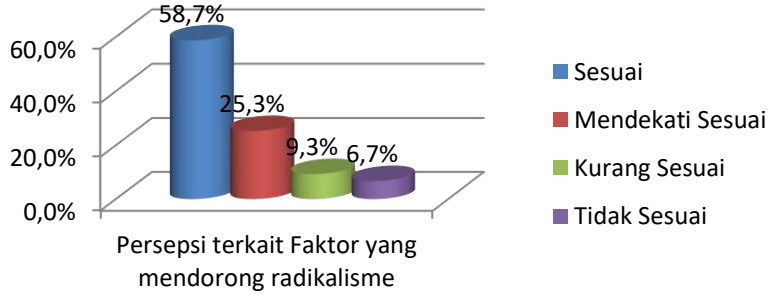

Grafik diatas menjelaskan bahwa Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme sudah sesuai dengan perincian 58% sesuai, 25,3% mendekati sesuai, 9,3% kurang sesuai dan 6,7% tidak sesuai dengan uraian sebagai berikut: Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam.

c. Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam

Mayoritas atau sebanyak 93,3% elit Nahdlatul Ulama sepakat tidak setuju/menyatakan tidak sesuai bahwa Persepsi terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia tentang tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun (sebanyak 14 responden), akan tetapi 93,3% elit Nahdlatul Ulama atau sebanyak 14 responden sepakat/setuju bahwa persepsi tentang Islam menolak radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat menyatakan, selanjutnya persepsi tentang tindakan radikal diperbolehkan pada saat–saat tertentu sebanyak 33,3% menyatakan Tidak Sesuai (5 responden), kemudian persepsi tentang tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar terdapat 86,7% yang menyatakan tidak Sesuai (13 responden), serta persepsi tentang Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan semua responden menyatakan 100% tidak setuju. Adapun deskripsi mendalam tentang persepsi terkait keabsahan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.2.3
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait factor keabsahan radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme di Indonesia	S	MS	KS	TS
C	Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam				
1.	Tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun			1	14
2.	Islam menolak radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat	14	1		
3.	Tindakan radikal diperbolehkan pada saat-saat tertentu	4	3	3	5
4.	Tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar	1		1	13

5.	Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan				15
	Jumlah	38	9	9	79
	Prosentase	28,2%	6,7%	6,7%	58,5%

Grafik 1.2.3
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait factor keabsahan radikalisme Islam di Indonesia

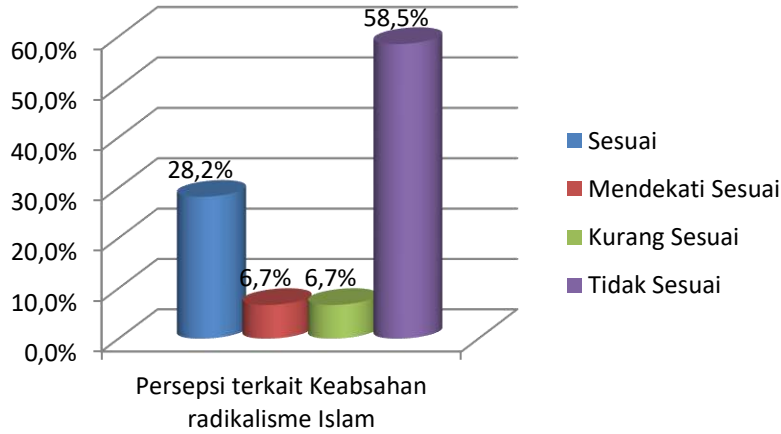

Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam di Indonesia adalah tidak sesuai hal ini dapat dilihat dari persepsi responden sebagai berikut 58,5% tidak sesuai dan 28,2% sesuai dan mendekati sesuai serta kurang sesuai sama-sama 6,7% yang dapat diuraikan sebagai berikut: Tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun; Islam mendukung radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat; Tindakan radikal diperbolehkan pada saat-saat tertentu; Tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar; Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan; Islam mendukung radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat; Tindakan radikal diperbolehkan pada saat-saat tertentu; Tindakan radikal bagian dari

amal makruf nahi munkar; Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan.

d. Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme

Sebanyak 86,7% elit Nahdlatul Ulama atau sebanyak 13 responden menyatakan hampir sesuai/mendekati sesuai terhadap Persepsi terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia tentang tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat, kemudian persepsi tentang tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat juga dinyatakan 73,3% elit NU mendekati sesuai (11 responden), selanjutnya persepsi tentang tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat dikatakan oleh 53,3% elit NU yang menyatakan mendekati sesuai (8 responden), selain itu sebanyak 73,3% atau 11 responden elit NU menyatakan sesuai terhadap persepsi tentang tindakan organisasi Keagamaan (Nahdlatul Ulama) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat, serta sebanyak 60% atau 9 responden elit NU juga menyatakan sesuai terhadap persepsi tentang Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan. Adapun deskripsi mendalam tentang persepsi terkait keabsahan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.2.4
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme di Indonesia	S	MS	KS	TS
D	Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme				
1	Tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	1	13	1	

2	Tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	3	11	1	
3	Tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	6	8	1	
4	Tindakan organisasi Keagamaan (NU dan Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	11	4		
5	Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan	9	5	1	
	Jumlah	30	41	4	
	Prosentase	40%	54,7%	5,4%	

Grafik 1.2.4
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia

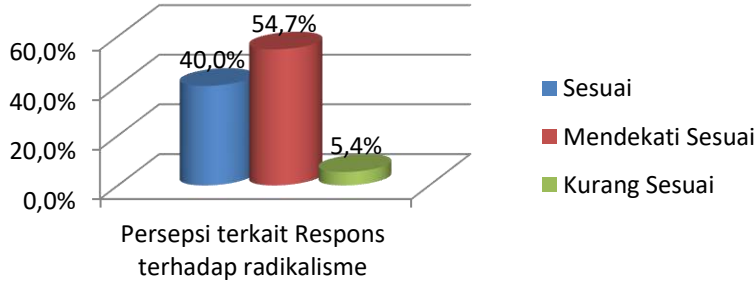

Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme mendekati sesuai dengan 54,7% mendekati sesuai, 40% sesuai, dan 5,4 % kurang sesuai dengan uraian sebagai berikut: Tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia

sudah tepat; Tindakan organisasi Keagamaan (NU dan Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan.

C. Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

Hasil komparasi tentang persepsi elit Muhammadiyah Jawa Tengah terhadap radikalisme Islam di Indonesia, penulis mendiskripsikan antara lain a. *Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia*, b. *Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme*, c. *Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam dan d. Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme*.

a. Komparasi persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia

Para elit Muhammadiyah di Jawa tengah sebanyak 40% menyatakan bahwa Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya adalah sesuai, sedangkan para elit Nahdlatul Ulama sebanyak 73,3% menyatakan hal tersebut sesuai. Selain itu elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah juga sama-sama menyatakan setuju atau sudah sesuai bahwa di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam dengan prosentase masing-masing sebanyak 67% dan 60% menyatakan sesuai. Kemudian sebanyak 86,7% responden dari kalangan elit Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama sama-sama sepakat bahwa Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham radikal. Pada bagian lain elit Muhammadiyah di Jawa Tengah juga sebanyak 53,3% menyatakan mendekati sesuai bahwa radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda namun para elit Nahdlatul Ulama sebanyak 53,3% menyatakan sesuai. Kemudian para responden dari elit Muhammadiyah melanjutkan bahwa

Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah masing–masing sebanyak 46,7 % menyatakan sesuai dan mendekati sesuai, sedangkan elit Nahdlatul Ulama sebanyak 66,7% menyatakan sesuai. Adapun deskripsi menyeluruh tentang komparasi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait persepsi keberadaan radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini

Tabel 1.3.1
Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa tengah terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia	Elit Muhammadiyah				Elit Nahdlatul Ulama			
		S	MS	KS	TS	S	MS	KS	TS
1.	Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya	40%	20%	6.67%	33.3%	73.3%	13.3%	0	13.3%
2.	Di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam	66.7%	6.67%	6.67%	20%	60%	26.7%	0	13.3%
3.	Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham radikal	86.7%	13.3%	0	0	86.7%	6.67%	6.67%	0
4.	Radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda	13.3%	53.3%	26.7%	6.67%	53.3%	6.67%	20%	20%
5.	Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah	46.7%	46.7%	6.67%	0	66.7%	33.3%	0	0

	Prosentase Rata-Rata	50.7%	28%	9.3%	12%	66%	17,3%	5,3%	9,4%

Grafik 1.3.1
Prosentase Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia

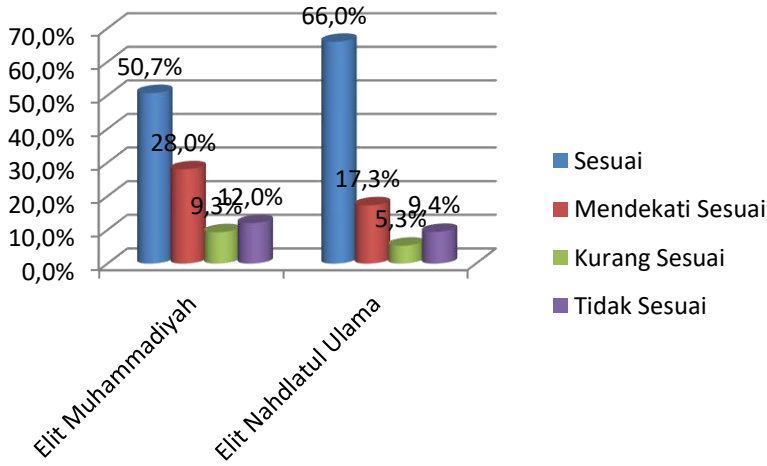

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa persepsi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait keberadaan radikalisme Islam di Indonesia keduanya sepakat/sudah sesuai dengan uraian masing-masing 50,7% dan 66% sesuai, 28% dan 17,3% mendekati sesuai, serta 12% dan 9,4% tidak sesuai terakhir 9,3% dan 5,3% kurang sesuai, dengan uraian sebagai berikut: Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya; Di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam; Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak

mengikuti faham radikal; Radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda; Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah.

b. Komparasi persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme

Para elit Muhammadiyah di Jawa tengah sebanyak 73,3% menyatakan bahwa persepsi terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik dinyatakan mendekati Sesuai, sedangkan elit Nahdlatul Ulama sebesar 60% menyatakan sesuai. Kemudian sebanyak 73,3% elit Muhammadiyah menyatakan mendekati Sesuai bahwa masyarakat menyatakan bahwa persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi, sedangkan elit Nahdlatul Ulama 53,3% menyatakan sesuai. Selanjutnya persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama dikatakan oleh elit Muhammadiyah sebanyak 60% responden menyatakan mendekati Sesuai, sedangkan elit Nahdlatul Ulama sebanyak 40% menyatakan sesuai. Dan persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya para elit Muhammadiyah sebanyak 53,3% dan elit Nahdlatul Ulama sebanyak 73,3% menyatakan Sesuai. Selain itu persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam 60% elit Muhammadiyah menyatakan mendekati sesuai sedangkan elit Nahdlatul Ulama sebesar 66,7% menyatakan sesuai. Adapun diskripsi menyeluruh tentang komparasi para elit Muhammadiyah dan elit Nahdlatul Ulama terkait persepsi faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.3.2
Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama Jawa tengah terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme di Indonesia	Elit Muhammadiyah					Elit Nahdlatul Ulama			
		S	MS	KS	TS		S	MS	KS	TS
1.	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik	6.67%	73.3%	13.3%	6.67%		60%	33.3%	6.67%	0
2	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi	6.67%	73.3%	20%	0		53.3%	33.3%	13.3%	0
3	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama	13.3%	60%	13.3%	13.3%		40%	13.3%	20%	26.7%
4	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya	53.3%	40%	6.67%	0		73.3%	20%	0	6.67%
5	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam	13.3%	60%	20%	6.67%		66.7%	26.7%	6.67%	0
	Prosentase Rata-Rata	18.7%	61.3%	14.7%	5.3%		58,7%	25,3%	9,3%	6,7%

Grafik 1.3.2 menjelaskan bahwa Komparasi Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme para elit Muhammadiyah dengan perincian 61,3% mendekati sesuai, 18,7% sesuai, 14,7% kurang sesuai dan 5,3% tidak sesuai, sedangkan para elit Nahdlatul Ulama memiliki perincian 58,7% sesuai, 25,3% mendekati sesuai, 9,3% kurang sesuai dan 6,7% tidak sesuai, dengan uraian sebagai berikut: Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya;

Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam.

Grafik 1.3.2
Prosentase Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa tengah terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia

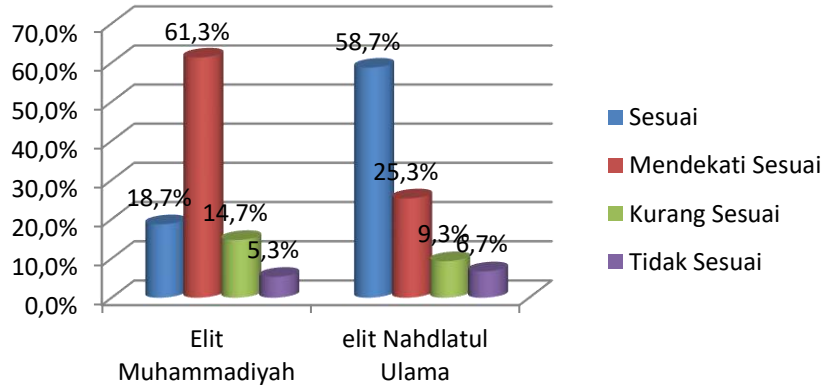

c. Komparasi persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam

Para elit Muhammadiyah di Jawa tengah sebanyak 80% menyatakan bahwa Persepsi terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia tentang tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun merupakan tindakan tidak Sesuai dan elit Nahdlatul Ulama juga menyatakan hal yang sama sebesar 93,3% responden. Kemudian persepsi tentang Islam menolak radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat menyatakan sebanyak 73,3% dikatakan Sesuai elit Muhammadiyah dan 93,3% oleh elit Nahdlatul Ulama. Selanjutnya persepsi tentang tindakan radikal diperbolehkan pada saat–saat tertentu para elit Muhammadiyah menyatakan Sesuai sebesar 33,3%, akan tetapi elit Nahdlatul Ulama menyatakan hal tersebut tidak sesuai sebesar 33,3%. Selain itu sebanyak 40% elit Muhammadiyah menyatakan kurang Sesuai dan tidak Sesuai (sama-sama 6 responden)

terhadap persepsi tentang tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar, sedangkan elit Nahdlatul Ulama dengan tegas menyatakan tidak sesuai sebesar 86,7%. Serta sebanyak 86,7% elit Muhammadiyah sepakat tidak Sesuai bahwa persepsi tentang Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan dan elit Nahdlatul Ulama menyatakan sepakat 100% terhadap pernyataan tersebut. Adapun deskripsi menyeluruh tentang komparasi elit Muhammadiyah dan elit Nahdlatul Ulama terkait persepsi keabsahan radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.3.3
Komparasi persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa tengah terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme di Indonesia	Elit Muhammadiyah					Elit Nahdlatul Ulama			
		S	S	MS	KS		TS	MS	KS	TS
1.	Tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun	0	6.67%	13.3%	80%		0	0	6.67%	93.3%
2.	Islam menolak radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat	73.3%	13.3%	13.3%	0		93.3%	6.67%	0	0
3.	Tindakan radikal diperbolehkan pada saat-saat tertentu	33.3%	20%	26.7%	20%		26.7%	20%	20%	33.3%
4.	Tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar	6.67%	13.3%	40%	40%		6.67%	0	6.67%	86.7%
5.	Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan	0	0	13.3%	86.7%		0	0	0	100%
	Prosentase Rata-Rata	22.7%	58,7%	25,3%	9,3%		28,2%	6,7%	6,7%	58,5%

Grafik 1.3.3
Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa tengah terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia

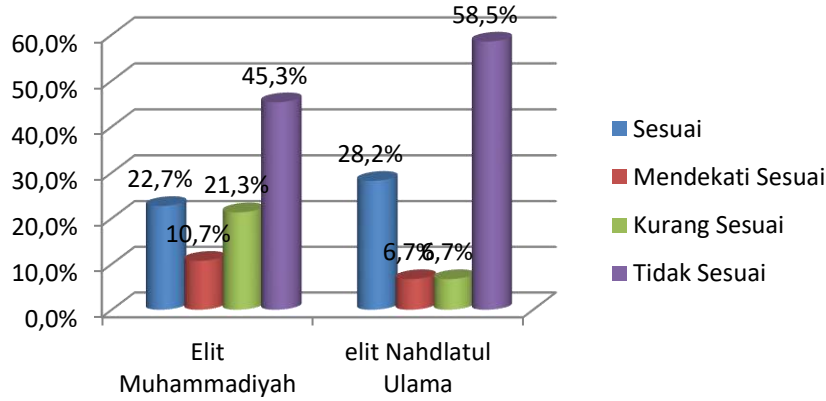

Para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait Persepsi Keabsahan radikalisme Islam di Indonesia adalah sama-sama sepakat hal tersebut tidak sesuai, hal ini dapat dilihat dari persepsi responden sebagai berikut 45,3% 58,5% tidak sesuai dan 22,7% dan 28,2% sesuai kemudian 21,3% dan 6,7% kurang sesuai serta 10,7% dan 6,7% mendekati sesuai, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun; Islam mendukung radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat; Tindakan radikal diperbolehkan pada saat–saat tertentu; Tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar; Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan.

d. Komparasi Persepsi terkait Respons terhadap Radikalisme

Para elit Muhammadiyah di Jawa tengah sebanyak 53,3% menyatakan bahwa Persepsi terkait respon terhadap radikalisme

Islam di Indonesia tentang tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat dinyatakan Sesuai namun elit Nahdlatul Ulama sebesar 86,7% menyatakan mendekati sesuai. Kemudian persepsi tentang tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat sebanyak 46,7% elit Muhammadiyah menyatakan sesuai dan elit Nahdlatul Ulama sebesar 73,3% menyatakan mendekati sesuai. Selanjutnya sebanyak 53,3% elit Muhammadiyah menyatakan persepsi tentang tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat, sedangkan elit Nahdlatul Ulama sebanyak 53,3% menyatakan mendekati sesuai. Selain itu sebanyak 60% elit Muhammadiyah dan 73,3% elit Nahdlatul Ulama sama-sama berpendapat bahwa persepsi tentang tindakan organisasi Keagamaan (Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat. Disisi lain juga terdapat 80% elit Muhammadiyah dan 60% elit Nahdlatul Ulama juga menyatakan telah sesuai kalau persepsi tentang Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan. Adapun deskripsi menyeluruh tentang komparasi elit Muhammadiyah dan elit Nahdlatul Ulama terkait persepsi respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.3.4
Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah Jawa tengah dan Nahdlatul ulama terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi dan Sikap terhadap Radikalisme di Indonesia	Elit Muhammadiyah					Elit Nahdlatul Ulama			
		S	MS	KS	TS		TS	MS	KS	TS
1	Tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap	53.3 %	13.3 %	26.7 %	6.67 %		6.67 %	86.7 %	6.67 %	0

	radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat									
2	Tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	46.7 %	26.7 %	20%	6.67 %		20%	73.3 %	6.67 %	0
3	Tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	53.3 %	26.7 %	20%	0		40%	53.3 %	6.67 %	0
4	Tindakan organisasi Keagamaan (NU dan Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	60%	33.3 %	6.67 %	0		73.3 %	26.7 %	0	0
5	Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan	80%	6.67 %	13.3 %	0		60%	33.3 %	6.67 %	0
	Prosentase Rata-Rata	58.7 %	21.3 %	17.3 %	2.7%		40%	54,7 %	5,4%	0

Komparasi antara Elit Muhammadiyah terkait Persepsi Respons terhadap radikalisme dapat dipaparkan sebagai berikut; 58,7% sesuai, 21,3% mendekati sesuai, 17,3 % kurang sesuai dan 2,7% tidak sesuai, sedangkan elit Nahdlatul ulama yaitu; 54,7% Mendekati sesuai, 40% sesuai, dan 5,4% kurang sesuai, dengan uraian sebagai berikut: Tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan organisasi Keagamaan (Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Penanggulangan

radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan.

Grafik 1.3.4
Prosentase Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa tengah terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia

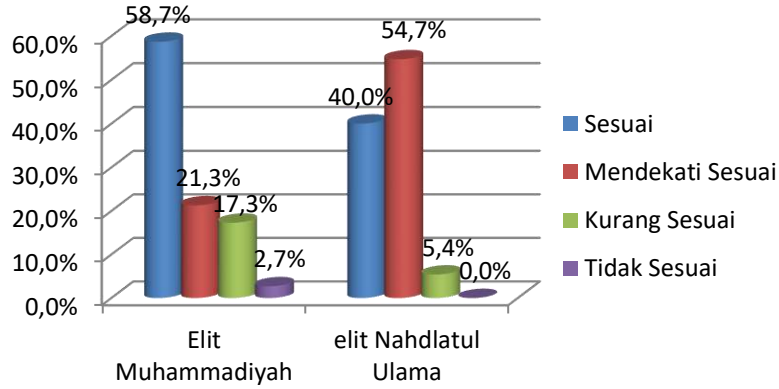

D. Sikap Elit Muhammadiyah Jawa Tengah

a. Sikap terhadap Alasan Radikalisme Islam

Sebesar 30,7% elit Muhammadiyah atau sebanyak 4 responden memberikan sikap tidak setuju terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia tentang Negara wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah memperoleh respon, kemudian sikap elit Muhammadiyah tentang Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik sebesar 60% (9 responden) menyatakan cukup setuju, selanjutnya 53,3% elit Muhammadiyah atau 8 responden juga menyatakan sikap cukup setuju bahwa Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam, selain itu sebanyak 66,7% elit Muhammadiyah atau 10 responden menyatakan sikap tidak setuju bahwa mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan. Adapun

deskripsi mendalam tentang sikap alasan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.4.1
Persepsi Elit Muhammadiyah di Jawa Tengah terkait sikap terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia

No	Sikap terhadap Alasan Radikalisme Islam	S	CS	KS	TS
1	Negara Wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah	3	4	2	4
2	Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik	6	9	0	0
3	Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam	5	8	1	1
4	Mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan	1	2	2	10
	Jumlah	15	23	5	15
	Prosentase	25.9%	39.7%	8.6%	25.9%

Grafik diatas menunjukkan sikap cukup setuju dengan rincian cukup setuju 39,7% kemudian setuju dan tidak setuju samasama 25,9% serta pilihan responden kurang setuju sebesar 8,6% dengan deskripsi sebagai berikut: Negara Wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah; Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik; Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam; Mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan.

Grafik 1.4.1
Persepsi Elit Muhammadiyah di Jawa Tengah terkait sikap terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia

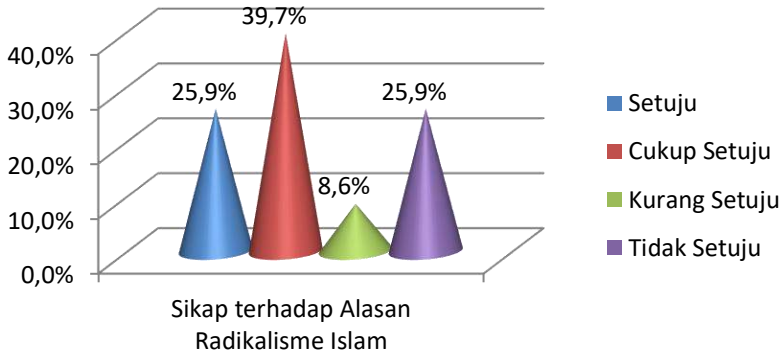

b. Sikap terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme

Sikap elit Muhammadiyah sebesar 73,3% atau 11 responden menyatakan tidak setuju terhadap cara mencapai tujuan radikalisme tentang Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran mendapat respon, kemudian sebesar 66,7% atau sebanyak 10 responden elit Muhammadiyah juga menyatakan sikap tidak setuju terhadap Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik mendapat respon, selanjutnya sebesar 66,7% sebanyak 10 responden dari kalangan elit Muhammadiyah juga menyatakan sikap tidak setuju kalau merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam, selain itu sikap tidak setuju juga sebesar 46,7% atau sebanyak 7 responden elit muhammadiyah kalau bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk, disamping itu sikap tentang membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan telah mendapatkan respon tidak setuju sebesar 86,7% atau sebanyak 13 responden dari kalangan elit muhammadiyah, serta sikap tentang meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah memperoleh respon tidak setuju

sebesar 80% atau sebanyak 12 responden. Adapun deskripsi mendalam tentang sikap cara mencapai tujuan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.4.2
Persepsi Elit Muhammadiyah di Jawa Tengah terkait sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme Islam di Indonesia

No	Sikap terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme	S	CS	KS	TS
1	Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran	0	2	2	11
2	Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik	0	0	5	10
3	Merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam	0	0	5	10
4	Bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk	3	1	4	7
5	Membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan	0	0	2	13
6	Meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah	0	1	2	12
	Jumlah	3	4	20	63
	Prosentase	3.3%	4.4%	22.2%	70%

Grafik 1.4.2 menjelaskan bahwa sikap tidak setuju terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme dengan jalan dengan uraian 70% tidak setuju, 22,2% kurang setuju dan cukup setuju sebesar 4,4% serta setuju hanya 3,3% yang dapat diuraikan sebagai berikut: Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran; Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik; Merampas harta

orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam; Bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk; Membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan; Meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah.

Grafik 1.4.2
Persepsi Elit Muhammadiyah di Jawa Tengah terkait sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme Islam di Indonesia

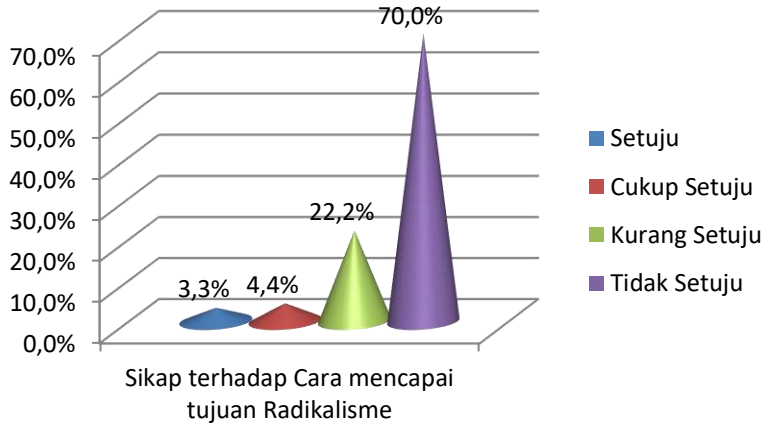

c. Sikap terhadap Pemberantasan Radikalisme Islam

Sikap elit Muhammadiyah sebanyak 40% mengatakan setuju dan cukup setuju terhadap pemberantasan radikalisme Islam tentang Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia, pernyataan setuju dan cukup setuju tersebut sama-sama dari 6 responden, kemudian sebesar 66,7% atau sebanyak 10 responden dari elit Muhammadiyah menyatakan sikap setuju tentang para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat memperoleh respon, selanjutnya sebesar 46,7% atau sebanyak 7 responden dari elit Muhammadiyah menyatakan sikap kurang setuju tentang ustadz-ustadz yang terindikasi

menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di Indonesia dinyatakan, disamping itu sebesar 53,3% atau sebanyak 8 responden dari elit Muhammadiyah menyatakan sikap cukup setuju tentang pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam, serta sebesar 60% atau sebanyak 9 responden dari elit Muhammadiyah menyatakan sikap cukup setuju tentang lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup. Adapun deskripsi mendalam tentang sikap pemberantasan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.4.3
Persepsi Elit Muhammadiyah di Jawa Tengah terkait sikap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

No	Pemberantasan Radikalisme Islam	S	CS	KS	TS
1	Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia	6	6	1	2
2	Para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat	10	2	1	2
3	Ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di indonesia	3	5	7	0
4	Pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam	6	8	1	0
5	Lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup.	0	9	5	1
	Jumlah	25	30	15	5
	Prosentase	33.3%	40%	20%	6.7%

Grafik 1.4.3 menunjukkan bahwa sikap cukup setuju terhadap pemberantasan radikalisme Islam dengan rincian prosen-

tase 40% responden memilih cukup setuju, 33,3% memilih setuju, 20% memilih kurang setuju dan 6,7% memilih setuju dengan cara: Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia; Para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat; Ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di Indonesia; Pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam; Lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup.

Grafik 1.4.3
Persepsi Elit Muhammadiyah di Jawa Tengah terkait sikap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

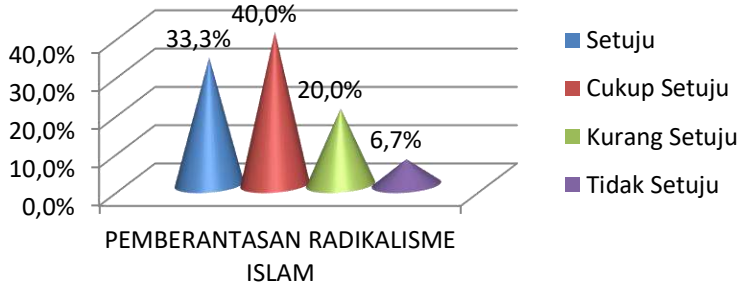

E. Sikap Elit Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

a. Sikap terhadap Alasan Radikalisme Islam

Sikap elit Nahdlatul Ulama sebesar 66,7% atau sebanyak 10 responden menyatakan sikap tidak setuju terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia tentang Negara wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah, kemudian sebesar 53,3% atau sebanyak 8 responden menyatakan sikap kurang setuju tentang umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik, selanjutnya sebesar 40% atau sebanyak 6 responden menyatakan sikap kurang setuju tentang ekonomi di Indonesia

harus dikuasi oleh umat Islam, dan sebesar 93,3% atau sebanyak 14 responden menyatakan sikap tidak setuju tentang mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan. Adapun deskripsi mendalam tentang sikap terhadap alasan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.5.1
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia

E	Sikap terhadap Alasan Radikalisme Islam	S	CS	KS	TS
1	Negara Wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah		1	4	10
2	Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik	4	2	8	1
3	Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam	4	5	6	
4	Mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan			1	14
	Jumlah	8	8	19	25
		13,3%	13,3%	31,7%	41,7%

Grafik 1.5.1 menunjukkan sikap tidak setuju dengan rincian tidak setuju 41, 7 % kurang setuju 31, 7% dan pilihan responden setuju dan cukup setuju masing-masing 13,3% dengan deskripsi sebagai berikut: Negara Wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah; Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik; Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam; Mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan.

Grafik 1.5.1

Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia

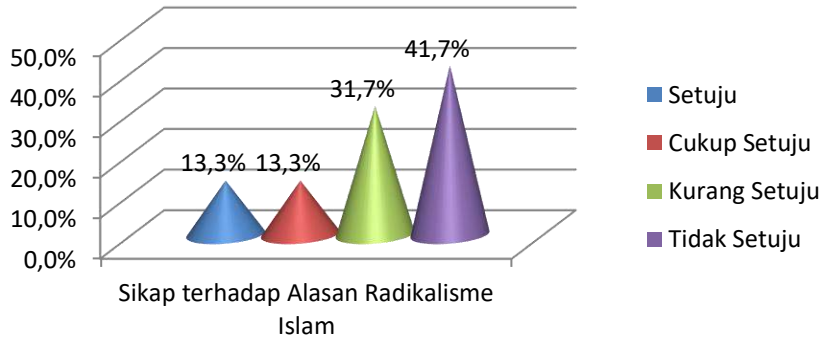

b. Sikap terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme

Sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme tentang tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran mendapat respon sikap tidak setuju dari elit Nahdlatul Ulama sebesar 93,3% atau sebanyak 14 responden, kemudian sebesar 86,7% atau sebanyak 13 responden dari elit Nahdlatul Ulama menyatakan sikap tidak setuju tentang perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik, selanjutnya sebesar 73,3% atau sebanyak 11 responden dari elit Nahdlatul Ulama menyatakan sikap tidak setuju tentang merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam, disamping itu elit Nahdlatul Ulama menyatakan sikap tidak setuju tentang bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk sebesar 60% atau sebanyak 9 responden, selain itu elit Nahdlatul Ulama juga menyatakan sikap tidak setuju tentang membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan memperoleh respon sebesar 86,7% atau sebanyak 13 responden, terakhir sebesar 93,3% atau sebanyak 14 responden dari elit Nahdlatul Ulama menyatakan sikap tidak setuju tentang

meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah. Adapun deskripsi mendalam tentang sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.5.2
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme Islam di Indonesia

F	Sikap terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme	S	CS	KS	TS
1	Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran			1	14
2	Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik			2	13
3	Merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam			4	11
4	Bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk		1	5	9
5	Membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan	1		1	13
6	Meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah			1	14
	Jumlah	1	1	14	74
	Prosentase	1,1%	1,1%	15,6%	82,3%

Grafik 1.5.2
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme Islam di Indonesia

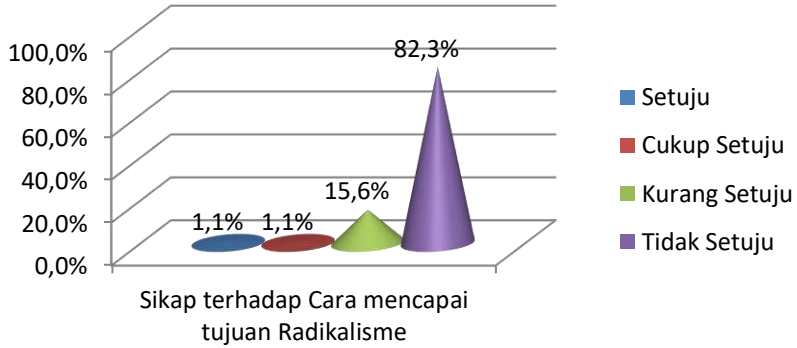

Grafik diatas menjelaskan bahwa sikap tidak setuju terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme dengan jalan dengan uraian 82,3% tidak setuju, 15,6% kurang setuju dan setuju cukup setuju masing-masing 1,1 % yang dapat diuraikan sebagai berikut: Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran; Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik; Merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam; Bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk; Membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan; Meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah.

c. Sikap terhadap Pemberantasan Radikalisme Islam

Para elit Nahdlatul Ulama sebesar 80% atau sebanyak 12 responden menyatakan sikap setuju terhadap pemberantasan radikalisme Islam tentang Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia, selain itu sebesar 86,7% atau sebanyak 13 responden dari elit Nahdlatul Ulama juga menyatakan sikap setuju tentang para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat, selanjutnya elit Nahdlatul Ulama juga menyatakan sikap setuju tentang ustadz-ustadz yang terindikasi

menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di Indonesia dengan respon sebesar 73,3% atau sebanyak11 responden, kemudian sebesar 80% atau sebanyak 12 responden dari elit Nahdlatul Ulama menyatakan sikap cukup setuju tentang pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam, serta sikap setuju tentang lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup diutarakan elit Nahdlatul Ulama sebesar 86,7% atau sebanyak 13 responden. Adapun deskripsi mendalam tentang sikap terhadap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.5.3
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

G.	Pemberantasan Radikalisme Islam	S	CS	KS	TS
1	Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia	12		1	2
2	Para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat	13	1		1
3	Ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di indonesia	11	4		
4	Pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam	12	2		1
5	Lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan	13	1	1	

	radikalisme Islam seharusnya ditutup.				
	Jumlah	61	8	2	4
	Prosentase	81,3%	10,7%	2,7%	5,3%

Grafik 1.5.3
Persepsi Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

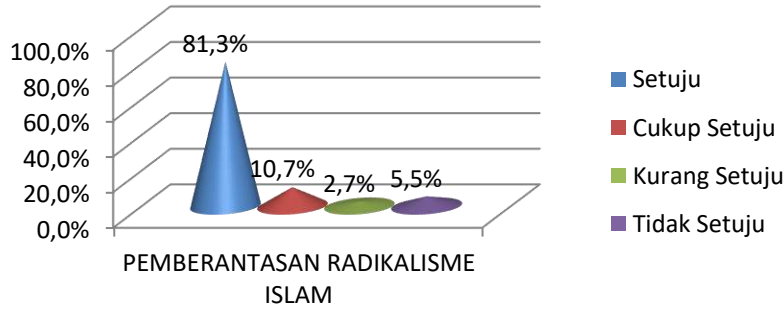

Grafik diatas menunjukkan bahwa sikap setuju terhadap pemberantasan radikalisme Islam dengan rincian prosentase 81,3% responden memilih setuju, 10,7% cukup setuju, 5,3% tidak setuju dan 2,7% kurang setuju dengan cara: Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia; Para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat; Ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di Indonesia; Pemerintah harus melakukan upaya deradikalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam; Lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup.

F. Komparasi Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

a. Komparasi Sikap terhadap Alasan Radikalisme Islam

Sebesar 30,7% elit Muhammadiyah dan 66,7% Elit Nahdlatul Ulama memberikan sikap tidak setuju terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia tentang Negara wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah memperoleh respon. Kemudian sikap elit Muhammadiyah tentang Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik sebesar 60% menyatakan cukup setuju, namun sebanyak 53,3% Elit Nahdlatul Ulama menyatakan sikap kurang setuju. Selanjutnya sebesar 53,3% elit Muhammadiyah juga menyatakan sikap cukup setuju bahwa Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam, akan tetapi 40% Elit Nahdlatul Ulama menyatakan sikap kurang setuju terhadap pernyataan tersebut. disamping itu sebanyak 66,7% elit Muhammadiyah dan 93,3% Elit Nahdlatul Ulama sama-sama menyatakan sikap tidak setuju bahwa mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan. Adapun deskripsi mendalam tentang sikap alasan Radikalisme Islam di Indonesia oleh elit Muhammadiyah dan Elit Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.6.1
Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia

No	Sikap terhadap Alasan Radikalisme Islam	Elit Muhammadiyah				Elit Nahdlatul Ulama			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS
1	Negara Wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah	23.1%	30.8%	15.4%	30.8%	0	6.67%	26.7%	66.7%
2	Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik	40%	60%	0	0	26.7%	13.3%	53.3%	6.67%

3	Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam	33.3%	53.3%	6.67%	6.67%		26.7%	33.3%	40%	0
4	Mendukung gerakan khilafah global merupa-kan sebuah keharusan	6.67%	13.3%	13.3%	66.7%		0	0	6.67%	93.3%
	Prosentase Rata-Rata	25.9%	39.7%	8.6%	25.9%		13,3%	13,3%	31,7%	41,7%

Grafik 1.6.1
Prosentase Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia

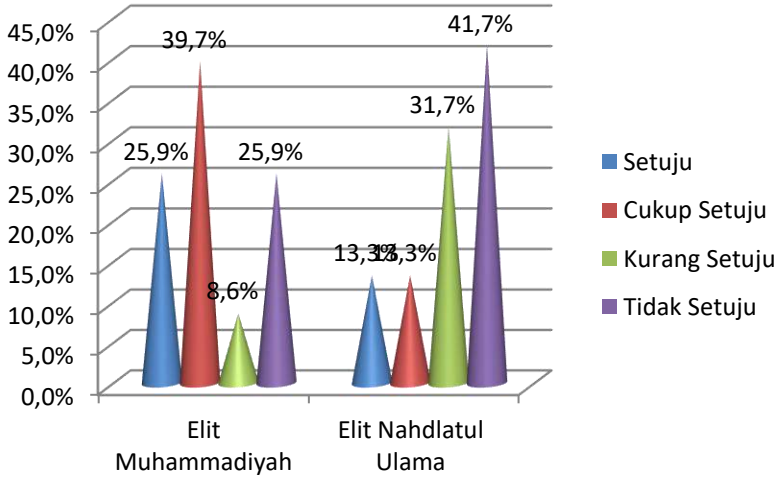

Grafik 1.6.1 menunjukkan komparasi Elit Muhammadiyah di jawa tengah terkait sikap terhadap alasan radikalisme islam di indonesia dengan rincian cukup setuju sebesar 39,7% kemudian

setuju dan tidak setuju sama-sama 25,9% serta pilihan responden kurang setuju sebesar 8,6%. Sedangkan elit Nahdlatul Ulama menyatakan sikap tidak setuju sebesar 41,7%, 31,7% kurang setuju, dan 13,3% setuju dan cukup setuju, dengan rincian deskripsi sebagai berikut: Negara Wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah; Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik; Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam; Mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan.

b. Komparasi Sikap terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme

Sikap elit Muhammadiyah sebesar 73,3% dan elit Nahdlatul Ulama sebanyak 93,3% sama-sama menyatakan tidak setuju terhadap cara mencapai tujuan radikalisme tentang Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran mendapat respon. Kemudian sebesar 66,7% elit Muhammadiyah dan 86,7% elit Nahdlatul Ulama juga samasama menyatakan sikap tidak setuju terhadap Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik mendapat respon. Selanjutnya sebesar 66,7% dari kalangan elit Muhammadiyah dan 73,3% elit Nahdlatul Ulama juga menyatakan sikap yang sama yaitu tidak setuju kalau merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam. Selain itu sikap tidak setuju juga sebesar 46,7% responden elit muhammadiyah dan 60% elit Nahdlatul Ulama kalau bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk. Disamping itu sikap tentang membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan telah mendapatkan respon tidak setuju sebesar 86,7% atau sebanyak 13 responden dari kalangan elit muhammadiyah maupun elit Nahdlatul Ulama. Serta sikap tentang meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah memperoleh respon tidak setuju sebesar 80% dari kalangan elit Muhammadiyah dan 93,3% dari

kalangan elit Nahdlatul Ulama. Adapun deskripsi mendalam tentang komparasi elit muhammadiyah dan elit Nahdlatul Ulama terhadap sikap cara mencapai tujuan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.6.2
Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme Islam di Indonesia

No	Sikap terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme	Elit muhammadiyah				Elit Nahdlatul Ulama			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS
1	Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran	0	13.3%	13.3%	73.3%	0	0	6.67%	93.3%
2	Perintah jihad fi sabil-illah itu harus dil-aksanakan dengan cara berperang secara fisik	0	0	33.3%	66.7%	0	0	13.3%	86.7%
3	Merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam	0	0	33.3%	66.7%	0	0	26.7%	73.3%
4	Bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk	20%	6.67%	26.7%	46.7%	0	6.67%	33.3%	60%
5	Membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan	0	0	13.3%	86.7%	6.67%	0	6.67%	86.7%
6	Meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah	0	6.67%	13.3%	80%	0	0	6.67%	93.3%

	Prosentase Rata-Rata	3.3%	4.4%	22.2%	70%		1,1%	1,1%	15,6%	82,3%

Grafik 1.6.2
Prosentase Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme Islam di Indonesia

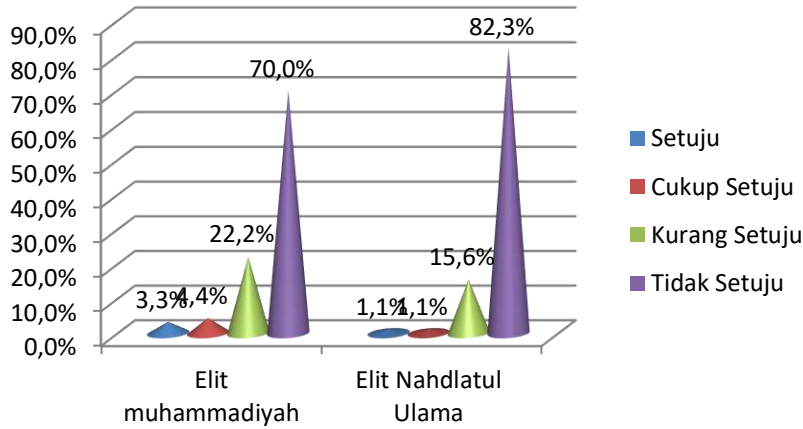

Grafik diatas menjelaskan bahwa komparasi sikap tidak setuju terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme dari elit Muhammadiyah dan elit Nahdlatul Ulama secara berurutan yaitu; 70% dan 82,3% tidak setuju, 22,2% dan 15,6% kurang setuju, dan cukup setuju sebesar 4,4% dan 1,1% serta setuju hanya 3,3% dan 1,1%, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran; Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik; Merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam; Bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk; Membunuh

polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan; Meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah.

c. Komparasi Sikap terhadap Pemberantasan Radikalisme Islam

Sikap elit Muhammadiyah sebanyak 40% mengatakan setuju dan cukup setuju terhadap pemberantasan radikalisme Islam tentang Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia, sikap setuju juga dinyatakan elit Nahdlatul Ulama sebesar 80%. Kemudian sebesar 66,7% responden dari elit Muhammadiyah dan 86,7% elit Nahdlatul Ulama sama-sama menyatakan sikap setuju tentang para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat memperoleh respon. Selanjutnya sebesar 46,7% responden dari elit Muhammadiyah menyatakan sikap kurang setuju tentang ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di Indonesia akan tetapi 73,3% elit Nahdlatul Ulama menyatakan setuju terhadap statemen tersebut. Disamping itu sebesar 53,3% dari elit Muhammadiyah menyatakan sikap cukup setuju tentang pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam, namun 80% elit Nahdlatul Ulama menyatakan setuju. Serta sebesar 60% responden dari elit Muhammadiyah menyatakan sikap cukup setuju tentang lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup dan elit Nahdlatul Ulama menyatakan setuju sebesar 86,7%. Adapun deskripsi mendalam tentang komparasi sikap pemberantasan Radikalisme Islam di Indonesia antara elit muhammadiyah dan elit Nahdlatul Ulama dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.6.3
Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

No	Pemberantasan Radikalisme Islam	Elit Muhammadi-yah				Elit Nahdlatul Ulama			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS
1	Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia	40%	40%	6.67%	13.3%	80%	0	6.67%	13.3%
2	Para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat	66.7%	13.3%	6.67%	13.3%	86.7%	6.67%	0	6.67%
3	Ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seha-rusnya dilarang untuk berdakwah di Indonesia	20%	33.3%	46.7%	0	73.3%	26.7%	0	0
4	Pemerintah harus melakukan upaya de-radekalisasi agar masyarakat bisa terlin-dungi dari radikalisme Islam	40%	53.3%	6.67%	0	80%	13.3%	0	6.67%
5	Lembaga pendidikan yang terbukti mengajar-kan radikalisme Islam seharusnya ditutup.	0	60%	33.3%	6.67%	86.7%	6.67%	6.67%	0
	Prosentase Rata-Rata	33.3%	40%	20%	6.7%	81,3%	10,7%	2,7%	5,3%

Grafik 1.6.3
Prosentase Komparasi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

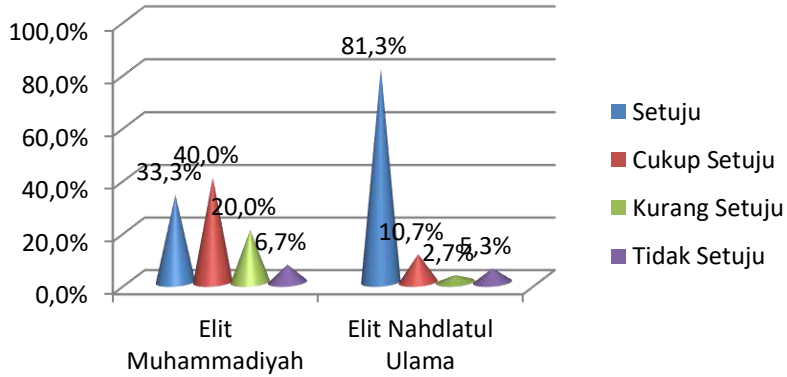

Grafik diatas menunjukkan bahwa sikap setuju terhadap pemberantasan radikalisme Islam oleh kalangan elit Muhammadiyah dapat dipaparkan dengan rincian bahwa prosentase 40% responden memilih cukup setuju, 33,3% memilih setuju, 20% memilih kurang setuju dan 6,7% memilih setuju. Kemudian elit Nahdlatul ulama memiliki rincian sebesar 81,3% setuju, 10,7% cukup setuju, 2,7% kurang setuju, dan 5,3% tidak setuju dengan cara: Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia; Para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat; Ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di Indonesia; Pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam; Lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup.

G. Pola Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

Pada pembahasan ini penulis memaparkan temuan hasil studi tentang analisa tentang pola Persepsi dan Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia, dengan uraian antara lain; 1. Pola persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia, 2. Pola sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia dan 3. Model Persepsi dan Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Hasil studi tentang persepsi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap radikalisme Islam di Indonesia, penulis mendiskripsikan antara lain 1 Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia, 2. Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme, 3. Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam dan 4. Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme. Yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a.. Persepsi terkait Keberadaan Radikalisme Islam di Indonesia

Para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa tengah sebanyak 56,7% menyatakan bahwa Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya adalah sesuai. Selain itu elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah juga menyatakan setuju atau sudah sesuai bahwa di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam sebanyak 63% atau 19 dari 30 responden menyatakan sesuai. Kemudian sebanyak 86,7% responden juga sepakat bahwa Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham

radikal. Pada bagian lain elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah juga sebanyak 33,3% menyatakan sesuai bahwa radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Kemudian para responden melanjutkan bahwa Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah masing–masing sebanyak 56,7 % menyatakan sesuai. Adapun deskripsi menyeluruh tentang persepsi terkait keberadaan radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.7.1
Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa tengah terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia	Jumlah Responden				Prosentase			
		S	MS	KS	TS	S	MS	KS	TS
1.	Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya	17	5	1	7	56.7%	16.7%	3.3%	23.3%
2.	Di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam	19	5	1	5	63.3%	16.7%	3.3%	16.7%
3.	Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham radikal	26	3	1	0	86.7 %	10%	3.3%	0
4.	Radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda	10	9	7	4	33.3%	30%	23.3%	13.3%

5.	Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah	17	12	1	0	56.7%	40%	3.3%	0
Jumlah		89	34	11	16	59.3%	22.7%	7.3%	10.7%

Grafik 1.7.1
Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia

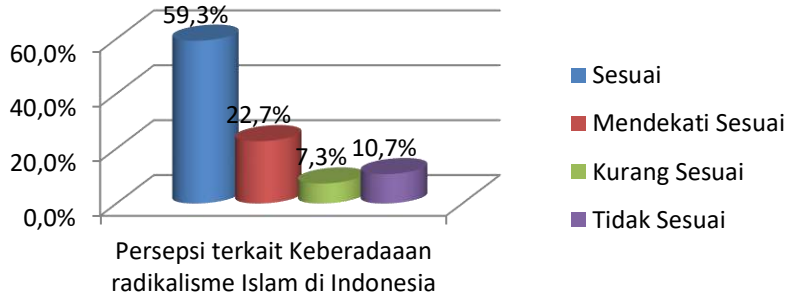

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa persepsi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait keberadaan radikalisme Islam di Indonesia sudah sesuai dengan uraian meliputi 59,3% sesuai, 22,7% mendekati sesuai, dan 10,7% tidak sesuai serta 7,3% kurang sesuai dengan uraian sebagai berikut: Radikalisme Islam itu merupakan keyakinan dan tindakan kekerasan dengan legitimasi ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh para pelakunya; Di Indonesia terdapat individu atau kelompok yang melaksanakan tindakan radikalisme atas nama agama Islam; Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak mengikuti faham radikal; Radikalisme Islam di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda; Radikalisme Islam di Indonesia tampil dengan modus yang berubah-rubah.

Masalah radikalisme memang diakui terus mencuat ke permukaan. Mengenai munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme Islam merupakan tantangan bagi umat Islam untuk menjawabnya. Meski diketahui bahwa radikalisme Islam ini sebenarnya sudah lama menjadi wacana Internasional. Dalam konteks negara Indonesia, fenomena radikalisme agama muncul kembali dengan hadirnya aksi-aksi terorisme yang sudah memiliki ribuan pengikut di seluruh Indonesia.

Khusus dalam konteks Indonesia, munculnya bibit yang kemudian dibarengi dengan gerakan radikalisme adalah sesuatu yang tidak lagi baru dalam pemberitaan di telinga kita. Berawal dari sebuah kekecewaan umat Islam di Indonesia waktu itu terkait penentuan dasar Negara. Ketika itu usulan dari tokoh-tokoh Islam seperti Wahid Hasyim dan Teuku Muhammad Hasan mengenai pengakuan Islam sebagai agama resmi Negara, hingga kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluknya (yang dikenal dengan Piagam Jakarta) ditolak oleh sebagian besar anggota sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Meskipun penolakan tersebut akhirnya dapat diterima dengan beberapa pertimbangan dan alasan, umat Islam pada waktu itu memandang hal tersebut sebagai tindakan penipuan dan pengkerdilan cita-cita umat Islam. (Erlangga Husada, 2007: 5)

Kekecewaan tersebut berbuntut kepada pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada saat itu, salah satunya yang paling dikenal adalah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Dan meskipun pemberontakan tersebut sudah berhasil diatasi oleh pemerintah pada saat itu namun pengaruh ideologis DI/TII tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hal ini terbukti dengan munculnya organisasi Islam radikal lain pasca tumbangnya orde baru, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Betawi Rembug (FBR) dan organisasi Islam Radikal lain.

Di Indonesia radikalisme cenderung dikaitkan dengan tindakan atau gerakan militan, anti barat, dan jika melakukan demonstrasi selalu ricuh. Padahal radikalisme mempunyai sisi positif yaitu sebagai pembaharu (tajdid) dan perbaikan (islah) terhadap hal-hal yang dianggap melanggar syariat Islam. Hanya saja terkadang dalam penyampaiannya terkesan "preman" seperti merusak beberapa tempat-tempat yang dianggap maksiat. Sehingga opini publik menjudge organisasi-organisasi radikal sebagai organisasi yang merusak. Tujuan organisasi-organisasi radikal di Indonesia adalah menegakkan syariat Islam sebagai ideologi bangsa. Organisasi radikal di Indonesia yang lantang mengumandangkan berdirinya syariat Islam salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang lebih kuat berorientasi pada politik dengan cita-cita membentuk kekhalifahan Islam.

Apabila dilakukan suatu analisis yang lebih mendalam dapat berakibat buruk bagi stabilitas nasional, Mengingat salah satu dari empat pilar bangsa Indonesia adalah NKRI maka dapat dipastikan dengan pertumbuhan organisasi radikal semacam ini dapat mengganggu stabilitas Keamanan suatu Negara. Dengan berbagai dasar pemikiran mengenai konsep Sistem Pemerintahan yang pernah digagas oleh tokoh-tokoh bangsa dahulu maka penulis mencoba melakukan suatu studi analisa mengenai system pemerintahan yang cocok dalam mengatasi keresahan kaum fundamentalis sehingga tercapai suatu masyarakat madani yang mampu hidup berdampingan meskipun berbeda-beda sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika sehingga tidak ada lagi upaya perubahan struktur social dengan pemaksaan oleh gerakan-gerakan radikalis seperti terror, kekerasan fisik maupun perang pemikiran yang mengarahkan kepada vandalism dan chaos.

Oleh karena itu, dalam pandangan Yudi Latif, gerakan radikal di Indonesia disinyalir karena mereka tidak menerima perbedaan. Perbedaan yang muncul di masyarakat dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi kaum radikal. Mereka

berasumsi bahwa untuk menunjukkan eksistensi mereka maka mereka harus mengeliminasi eksistensi orang lain. Teroris berani mati karena mereka menganggap perbedaan adalah musuh dan ancaman yang harus dihancurkan. "Teroris berani mati, tetapi tidak berani hidup, mereka adalah musuh kehidupan" (Mukhlisin, 9 Maret 2012).

Disebabkan karena itu, maka Indonesia mengukir sejarah hitam dengan berbagai peristiwa 'bom' yang menggemparkan dunia, antara lain peristiwa bom Bali (12 Oktober 2002), hotel JW Marriott Jakarta (5 Agustus 2003 & 17 Juli 2009), dan Kuningan Jakarta (9 September 2004). Peristiwa tersebut tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi telah menewaskan ratusan nyawa manusia, termasuk orang-orang yang tidak bersalah seperti anak-anak.

Berbagai tindak kekerasan dalam bentuk demonstrasi, aksi protes hingga terorisme, tingkat regional, nasional, dan internasional, realitanya sebagian dilakukan kelompok umat beragama Islam. Beberapa kelompok atau organisasi berbasis muslim di Indonesia yang sering melakukan tindakan kekerasan dicontohkan Azra antara lain Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad (LJ), Jamaah Ikhwan al-Muslimin Indonesia (JAMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (A. Azra, 170). Tercatatlah nama-nama tokoh kekerasan di Indonesia seperti Imam Samudra, Amrozi, Ali Ghufran, Hernianto, dalam kasus bom Bali. Tercatat juga nama-nama perakit bom yang memiliki jaringan internasional seperti Azahari dan Noordin Muhammad Top, warga negara Malaysia yang melakukan aksi kekerasan di Indonesia.

Dari realitas tersebut, maka muncul kegelisahan yang berujung pada sebuah pertanyaan yang mendasar, mengapa pemeluk Islam bisa menjadi radikal bahkan praktisi terorisme. Padahal sesuai dengan terminologi yang digunakan, Islam berarti agama kedamaian dan keselamatan, yang tentunya mengajarkan

kedamaian dan keselamatan yang harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku para pemeluknya. Tetapi kenyataan bahwa sebagian pemeluk Islam menjadi pelaku tindakan radikalisme dan terorisme tidak bisa dipungkiri.

Lalu apa yang tepat disematkan pada sosok Abu Bakar Baasyir tersebut, apakah betul dia termasuk dari orang yang menerapkan radikalisme atau justru sudah masuk dalam kategori sebagai pelaku terorisme, berikut dikemukakan oleh M. Arja Imroni, selaku Sekretaris PWNU Jawa Tengah, Dr. H. Arja' Imroni, M.Ag;

> "Jadi begini, menurut saya istilah itu bertingkat-tingkat. Jadi pertama, dimulai dari proses pemahaman yang tekstual yang kemudian memunculkan paham yang radikal. Radikal itu kemudian ketika menjadi pemahaman yang dipahami secara institusional oleh kelompok tertentu, kemudian paham itu menjadi radikalisme. Nah radikalisme pemahaman itu kemudian pada akhirnya bila itu muncul sebagian tindakan, itu yang disebut tindakan teroris. Jadi menurut saya, kalau sudah mereka mengaktualisasikan radikalisme dalam tindakan kekerasan, tindakan-tindakan kekerasan yang muncul dari pemahaman tadi, itu disebut tindakan terorisme. Maka pengikut Baasyir yang telah melakukan pengeboman bom bunuh diri. Itu merupakan tindakan teroris, tindakan teror yang merupakan langkah lanjut dari pemahaman radikal tadi."

Seperti banyak dipahami dan diingat oleh banyak orang, bahwa para teroris memiliki pemahaman keagamaan yang radikal. Radikalisme itu sendiri lahir kembali setelah 2001, Pascatragedi 11/9 atau serangan teroris ke As pada 2001, berbagai negara, termasuk Indonesia, justru direpotkan oleh munculnya jaringan terorisme global dengan membawa-bawa ajaran Islam. Tentu mereka memiliki pandangan keislaman yang berbeda

dengan mayoritas Islam. Tentu mereka memiliki pandangan keislaman yang berbeda dengan mayoritas Islam di negeri kita, yang rata-rata bersikap moderat dan menjauhi radikalisme.

Ajaran Islam sejati yang memuliakan hidup terpinggirkan oleh argumentasi teologis yang tampak rasional, sehingga ujung-ujungnya kematian justru dipuja, baik kematian si pelaku bom bunuh diri sebagai syuhada maupun kematian dari warga tak berdosa. Padahal, Islam yang sejati mengajarkan bahwa membunuh satu orang sudah membunuh seluruh umat manusia. Jadi, para teroris sudah menodai agama, karena sejak lama mereka menjadikan agama sebagai pembenar atau melegitimasi bagi segala aksi. M. Arja Imroni, selaku sebagai Sekretaris PWNU Jawa Tengah, mengemukakan bahwa;

> "Fenomena pemahaman terhadap agama, bukan merupakan ajaran agama tetapi itu bagian dari cara orang memahami teks-teks keagamaan yang kemudian menimbulkan sikap dan perilaku radikal itu."

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa timbulnya skripturalisme-ideologis. Yaitu kecenderungan kelompok atau kaum radikalis adalah mereka yang skriptualis dalam menafsirkan teks-teks agama. Sebab yang demikian itu, dalam menafsirkan apa yang terbaca dalam teks di pahami secara harfiah semata. Oleh karena itu timbul upaya pemahaman yang menjadikan teks kitab suci sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan.

b. Persepsi terkait Faktor yang mendorong radikalisme

Para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa tengah sebanyak 53,3% bersama-sama menyatakan bahwa persepsi terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik dinyatakan mendekati Sesuai (16 responden), kemudian sebanyak 53,3% atau mendekati Sesuai (16 responden)

masyarakat menyatakan bahwa persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi, selanjutnya persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama sebanyak 36,7% menyatakan mendekati Sesuai (11 responden), dan persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya 63,3% menyatakan Sesuai (19 responden), selain itu persepsi tentang radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam 43,3% menyatakan mendekati sesuai (13 responden). Adapun deskripsi menyeluruh tentang persepsi terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.7.2
Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa tengah terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi terkait Keberadaan radikalisme Islam di Indonesia	Jumlah Responden				Prosentase			
		S	MS	KS	TS	S	MS	KS	TS
1.	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik	10	16	3	1	33.3 %	53.3 %	10%	3.3 %
2.	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi	9	16	5	0	30%	53.3 %	16.7 %	0
3.	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan agama	8	11	5	6	26.7 %	36.7 %	16.7 %	20%
4.	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi	19	9	1	1	63.3 %	30%	3.3 %	3.3 %

	psikologis para pelakunya								
5.	Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam	12	13	4	1	40%	43.3 %	13.3 %	3.3 %
Jumlah		58	65	18	9	38.7 %	43.3 %	12%	6%

Grafik 1.7.2
Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa tengah terkait faktor yang mendorong radikalisme Islam di Indonesia

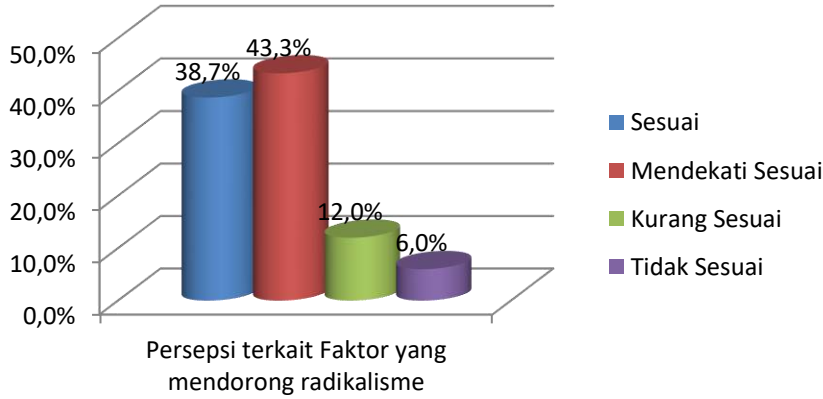

Grafik diatas menjelaskan bahwa Persepsi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait Faktor yang mendorong radikalisme sudah sesuai dengan perincian 43,3% mendekati sesuai, 38,7% sesuai, 12% kurang sesuai dan 6% tidak sesuai, dengan uraian sebagai berikut: Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan politik; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi; Radikalisme Islam di Indo-

nesia didorong oleh kepentingan agama; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh kondisi psikologis para pelakunya; Radikalisme Islam di Indonesia didorong oleh rendahnya pengetahuan agama Islam.

Sejauh ini, banyak pengamat menyebutkan bahwa aksi kekerasan dan terorisme yang ditimbulkan akibat radikalisme tidak berdiri sendiri. Ada mata rantai berkesinambungan yang saling terkait satu sama lain. Setidaknya, ada dua akar mendasar yang menyebabkan lahirnya radikalisme juga aksi kekerasan sosial. Yang pertama, kenyataan hegemoni negara adidaya atas negara Dunia Ketiga, juga negara mayoritas berpenduduk Muslim. Hingga saat ini kebijakan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara maju lain terus melahirkan paradoks dan penentangan banyak negara, khususnya yang berkait dengan kebijakan AS di Timur Tengah.

Merebaknya gerakan radikalisme Islam di Indonesia yang telah disinggung secara global diakui memang tidak terlepas dari Politik Global yang berdampak pada munculnya paham Islamisme yaitu sebuah gerakan keagamaan yang tidak hanya menganggap islam sebagai ideologi politik namun juga memandang islam sebagai implementasi penerapan ide tradisional Islam sebagai "*an all encompanissing religion to modern society*". Pemahaman semacam itu mulai tumbuh pada masa orde baru Presiden Soeharto di kurun waktu 1980 hingga 1990an awal. Sejak saat itu Presiden Suharto mengubah kebijakan politiknya yang semula strict terhadap kelompok umat Islam dan lebih menyukai gaya kepemimpinan sekuler-abangan menjadi pro-Muslim. Hal tersebut melatarbelakangi munculnya berbagai gerakan Islam dan berbagai kelompok Islamis yang awalnya berkonsentrasi pada dakwah dan kesalehan individual menjadi aktif secara politik. Namun gerakan islamisme di Indonesia tidak dapat dipandang general sebab gerakan tersebut bukan suatu gerakan monolitik atau seragam dengan kepentingan politik yang sama. Apabila dikaji lebih mendalam mengenai gerakan politik global

saat itu memiliki variasi dalam segi kepentingan, motif, strategi dan aksi. Mulai dari Jamaah Islamiyah yang cenderung radikal dan Clandestine hingga Hizbut Tahrir yang menggunakan aksi lebih peaceful dan pro-militer meskipun dari segi ideologi mereka cenderung radikal. (Sumanto Al Qurtuby, 2009: 92-92)

Kapitalisme global dan problem kemiskinan. Sistem kapitalisme yang sampai hari ini berkuasa berhasil menciptakan kesejahteraan dengan kemajuan tingkat produktivitas dan kecanggihan teknologi yang semakin tinggi. Sebagai sistem ekonomi, kapitalisme yang diterapkan dunia Barat dinilai merusak dasar-dasar kebudayaan dan menyingkirkan mereka yang lemah secara ekonomi, di samping mampu berkuasa secara politik di level kebijakan negara. Ketidakberdayaan umat Islam terhadap hegemoni ekonomi kapitalisme Barat menyebabkan sebagian umat Islam melakukan resistensi.

Jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan dengan Abu Bakar Baasyir dan teman-temannya, terkait dengan faktor yang mendorongnya melakukan langkah yang berujung pada tindakan terorisme, maka itu bentukan dari bertemunya antara ideologi dan politik, karena hal tersebut ada keterkaitanya antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana menurut M. Arja Imroni;

> "Menurut saya semua faktor itu saling berhubungan satu sama lain. Tapi saya kira yang paling penting justru dari pemahaman keagamaan ya itu. Jadi pemahaman agama itu yang menyulut faktor-faktor lain itu bisa menjadi sumbu kekerasan itu. Jadi, dari model pemahaman yang sudah radikal, lalu cara mereka menyikapi misalnya ada berita tentang Israel memperlakukan Palestina. Respon mereka kemudian respon radikal tadi, yang kadang tidak rasional. Mereka marah-marah kepada orang amerika, mengebomnya orang Indonesia sendiri. Itukan aneh. Jadi faktor yang menentukan tindakan mereka adalah faktor pemahamannya terhadap agama itu; yang masih rendah, dan tekstual tadi. Itu kemudian karena faktor keagamaan

itu adalah faktor yang paling mendasar pada manusia. Maka itu mempengaruhi pandangan-pandangan dia dalam berbagai aspek. Ketika menanggapi ketidakadilan pemerintah misalnya. Itukan karena sikap pemahamannya itu; ini sikapnya harus diperangi. Lha karena pemahamannya itu kemudian responnya kekerasan. Tidak melalui jalur-jalur konstitusional. Tapi mereka ingin melakukan perubahan secara instan melalui radikal itu lalu muncul kekerasan/radikalisme. Ketidakadilan negara, mereka menganggap mungkin umat Islam ini di Indonesia tidak diperhatikan. Tapi karena pemahaman agamanya begitu, responnya akan selalu begitu."

c. Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam

Para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa tengah sebanyak 86,7% menyatakan bahwa Persepsi terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia tentang tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun mendapat respon dikatakan oleh 26 responden tidak Sesuai, kemudian persepsi tentang Islam menolak radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat menyatakan sebanyak 83,3% dikatakan Sesuai atau 25 responden, selanjutnya persepsi tentang tindakan radikal diperbolehkan pada saat–saat tertentu para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan Sesuai sebesar 30% (9 responden), selain itu sebanyak 63,3% menyatakan tidak Sesuai (19 responden) terhadap persepsi tentang tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar, serta sebanyak 93,3% sepakat tidak Sesuai bahwa persepsi tentang Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan. Adapun deskripsi menyeluruh tentang persepsi terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.7.3
Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa tengah terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam di Indonesia	Jumlah Responden				Prosentase			
		S	MS	KS	TS	S	MS	KS	TS
1.	Tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun	0	1	3	26	0	3.3%	10%	86.7 %
2.	Islam menolak radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat	25	3	2	0	83.3 %	10%	6.7%	0
3.	Tindakan radikal diperbolehkan pada saat – saat tertentu	9	6	7	8	30%	20%	23.3 %	26.7 %
4.	Tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar	2	2	7	19	6.7%	6.7%	23.3 %	63.3 %
5.	Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan	0	0	2	28	0	0	6.7	93.3 %
Jumlah		36	12	21	81	24%	8%	14%	54%

Persepsi terkait Keabsahan radikalisme Islam di Indonesia adalah tidak sesuai hal ini dapat dilihat dari persepsi responden sebagai berikut 54% tidak sesuai dan 24% sesuai kemudian 14% kurang sesuai serta 8% mendekati sesuai, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Tindakan radikal itu diperbolehkan oleh Islam dalam keadaan apapun; Islam mendukung radikalisme karena Islam menekankan sikap moderat; Tindakan radikal diperbolehkan pada saat–saat tertentu; Tindakan radikal bagian dari amal makruf nahi munkar; Istisyhad (tindakan bunuh diri para teroris) itu diperbolehkan.

Grafik 1.7.3
Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa tengah terkait keabsahan radikalisme Islam di Indonesia

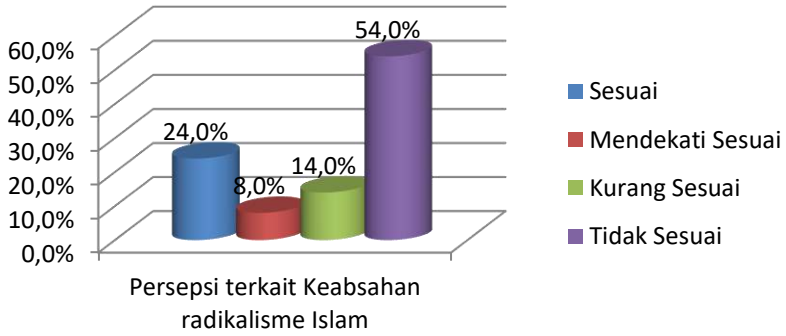

d. Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme

Para elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa tengah sebanyak 50% menyatakan bahwa Persepsi terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia tentang tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat dinyatakan Mendekati Sesuai (15 responden), kemudian persepsi tentang tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat sebanyak 50% elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan mendekati sesuai atau sebanyak 15 responden, selanjutnya sebanyak 46,7% (14 responden) menyatakan persepsi tentang tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat, selain itu sebanyak 66,7% elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa persepsi tentang tindakan organisasi Keagamaan (Muhammadiyah dan NU) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat, disisi lain juga terdapat 70% elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan telah sesuai kalau persepsi tentang Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan. Adapun

deskripsi menyeluruh tentang persepsi terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.7.4
Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa tengah terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia

No	Persepsi terkait Respon Terhadap radikalisme Islam di Indonesia	Jumlah Responden				Prosentase			
		S	MS	KS	TS	S	MS	KS	TS
1.	Tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	9	15	5	1	30%	50%	16.7 %	3.3 %
2.	Tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	10	15	4	1	33.3 %	50%	13.3 %	3.3 %
3.	Tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	14	12	4	0	46.7 %	40%	13.3 %	0
4.	Tindakan organisasi Keagamaan (NU dan Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat	20	9	1	0	66.7 %	30%	3.3%	0
5.	Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan	21	6	3	0	70%	20%	10%	0

Jumlah	74	57	17	2	49.3 %	38%	11.3 %	1.3 %

Grafik 1.7.4
Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa tengah terkait respon terhadap radikalisme Islam di Indonesia

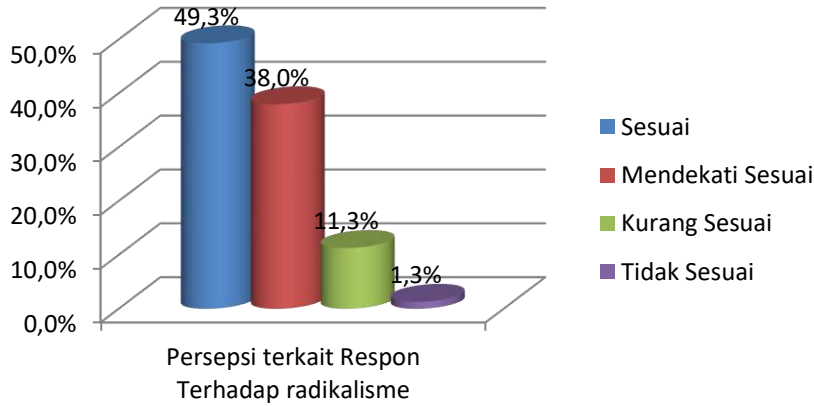

Persepsi terkait Respons terhadap radikalisme sudah sesuai dengan 49,3% sesuai, 38% mendekati sesuai, 11,3 % kurang sesuai dan 1,3% tidak sesuai, dengan uraian sebagai berikut: Tindakan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan Kementerian Agama radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan Majlis Ulama Indonesia (MUI) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Tindakan organisasi Keagamaan (Muhammadiyah) terhadap radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat; Penanggulangan radikalisme Islam di Indonesia menekankan kepada pencegahan dibanding penindakan.

H. Pola Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

Hasil studi tentang sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap radikalisme Islam di Indonesia, penulis mendiskripsikan antara lain 1. Sikap terhadap Alasan Radikalisme Islam, 2. Sikap terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme dan 3. Sikap terhadap Pemberantasan Radikalisme Islam, yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Sikap terhadap Alasan Radikalisme Islam

Sebesar 53,3% elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau sebanyak 16 responden memberikan sikap tidak setuju terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia tentang Negara wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah memperoleh respon, kemudian sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik sebesar 36,7% (11 responden) menyatakan cukup setuju, selanjutnya 43,3% elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau 13 responden juga menyatakan sikap cukup setuju bahwa Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam, selain itu sebanyak 80% elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau 24 responden menyatakan sikap tidak setuju bahwa mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan. Adapun deskripsi mendalam tentang sikap alasan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.8.1
Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia

No	Sikap Terhadap Alasan radikalisme Islam	Jumlah Responden				Prosentase			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS
1.	Negara Wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah	3	5	6	16	10 %	16.7 %	20%	53.3 %

2.	Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik	10	11	8	1	33.3 %	36.7 %	26.7 %	3.3 %
3.	Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam	9	13	7	1	30 %	43.3 %	23.3 %	3.3 %
4.	Mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan	1	2	3	24	3.3 %	6.7 %	10%	80%
Jumlah		23	31	24	42	19.2 %	25.8 %	20%	35%

Grafik 1.8.1
Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap alasan radikalisme Islam di Indonesia

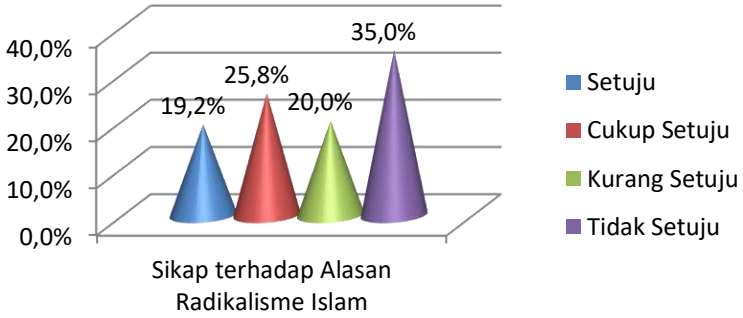

Grafik diatas menunjukkan sikap cukup setuju dengan rincian tidak setuju 35% kemudian cukup setuju sama-sama 25,8% serta pilihan responden kurang setuju sebesar 20% dan 19,2% setuju dengan deskripsi sebagai berikut: Negara Wajib menerapkan hukum Islam secara kaffah; Umat Islam di Indonesia harus menjadi penguasa dalam bidang politik; Ekonomi di Indonesia harus dikuasi oleh umat Islam; Mendukung gerakan khilafah global merupakan sebuah keharusan.

b. Sikap terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme

Sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebesar 83,3% atau 25 responden menyatakan tidak setuju terhadap cara

mencapai tujuan radikalisme tentang Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran mendapat respon, kemudian sebesar 76,7% atau sebanyak 23 responden elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga menyatakan sikap tidak setuju terhadap Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik mendapat respon, selanjutnya sebesar 70% sebanyak 21 responden dari kalangan elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga menyatakan sikap tidak setuju kalau merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam, selain itu sikap tidak setuju juga sebesar 53,3% atau sebanyak 16 responden elit muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kalau bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk, disamping itu sikap tentang membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan telah mendapatkan respon tidak setuju sebesar 86,7% atau sebanyak 26 responden dari kalangan elit muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta sikap tentang meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah memperoleh respon tidak setuju sebesar 86,7% atau sebanyak 26 responden. Adapun deskripsi mendalam tentang sikap cara mencapai tujuan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.8.2
Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme Islam di Indonesia

No	Sikap Terhadap Cara Mencapai Tujuan radikalisme	Jumlah Responden				Prosentase			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS

1.	Tindakan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran	0	2	3	25	0	6.7%	10%	83.3%
2.	Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik	0	0	7	23	0	0	23.3%	76.7%
3.	Merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakan syariat Islam	0	0	9	21	0	0	30%	70%
4.	Bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk	3	2	9	16	10%	6.7%	30%	53.3%
5.	Membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan	1	0	3	26	3.3%	0	10%	86.7%
6.	Meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah	0	1	3	26	0	3.3%	10%	86.7%
Jumlah		4	5	34	137	2.2%	2.8%	18.9%	76.1%

Grafik 1.8.2 menjelaskan bahwa sikap tidak setuju terhadap Cara mencapai tujuan Radikalisme dengan jalan dengan uraian 76,1% tidak setuju, 18,2% kurang setuju dan cukup setuju sebesar 2,8% serta setuju hanya 2,2% yang dapat diuraikan sebagai berikut: Tindakan kekerasan itu lebih baik didahulukan dalam upaya mencegah kemungkaran; Perintah jihad fi sabilillah itu harus dilaksanakan dengan cara berperang secara fisik; Merampas harta orang kafir hukumnya sah untuk mencapai tujuan menegakkan

syariat Islam; Bekerjasama dengan orang kafir merupakan tindakan terkutuk; Membunuh polisi atau tentara yang tidak mendukung syariat Islam di Indonesia itu diperbolehkan; Meninggalkan keluarga yang tidak sependapat dalam urusan penegakan syariat Islam itu sah.

Grafik 1.8.2
Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap terhadap cara mencapai tujuan radikalisme Islam di Indonesia

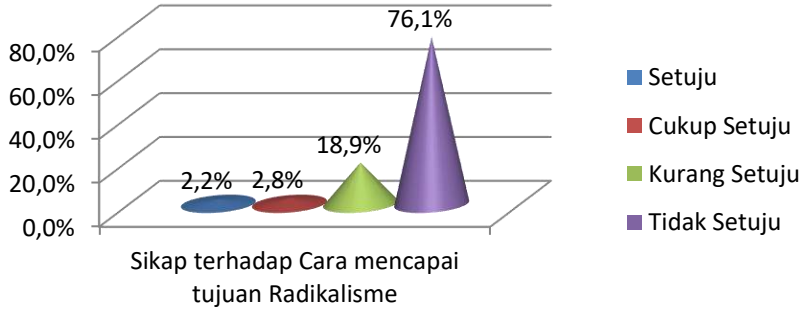

c. Sikap terhadap Pemberantasan Radikalisme Islam

Sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebanyak 60% sama-sama mengatakan setuju terhadap pemberantasan radikalisme Islam tentang Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia, pernyataan setuju dan cukup setuju tersebut sama-sama dari 16 responden, kemudian sebesar 76,7% atau sebanyak 23 responden dari elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan sikap setuju tentang para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat, selanjutnya sebesar 46,7% atau sebanyak 14 responden dari elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan sikap setuju tentang ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di Indonesia dinyatakan, disamping itu sebesar 60% atau sebanyak 18

responden dari elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan sikap setuju tentang pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam, serta sebesar 43,3% atau sebanyak 13 responden dari elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyatakan sikap setuju tentang lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup. Adapun deskripsi mendalam tentang sikap pemberantasan Radikalisme Islam di Indonesia dapat di lihat dalam tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 1.8.3
Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

No	Sikap Pemberantasan Radikalisme Islam	Jumlah Responden				Prosentase			
		S	CS	KS	TS	S	CS	KS	TS
1.	Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia	18	6	2	4	60%	20%	6.7%	13.3 %
2.	Para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat	23	3	1	3	76.7 %	10%	3.3%	10%
3.	Ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di indonesia	14	9	7	0	46.7 %	30%	23.3 %	0
4.	Pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam	18	10	1	1	60%	33.3 %	3.3%	3.3%

5.	Lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup.	13	10	6	1	43.3 %	33.3 %	20%	3,3%
Jumlah		86	38	17	9	57,3 %	25,3 %	11,3 %	6%

Grafik 1.8.3
Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

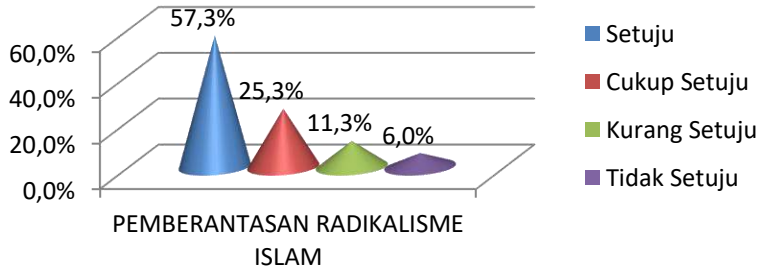

Grafik diatas menunjukkan bahwa sikap cukup setuju terhadap pemberantasan radikalisme Islam dengan rincian prosentase 57,3% responden memilih setuju, 25,3% memilih cukup setuju, 11,3% memilih kurang setuju dan 6% memilih tidak setuju dengan cara: Paham Islam radikal tidak boleh berkembang di Indonesia; Para pelaku tindakan terorisme harus mendapatkan hukuman yang berat; Ustadz-ustadz yang terindikasi menyebarkan radikalisme Islam seharusnya dilarang untuk berdakwah di Indonesia; Pemerintah harus melakukan upaya deradekalisasi agar masyarakat bisa terlindungi dari radikalisme Islam; Lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan radikalisme Islam seharusnya ditutup.

I. Model Persepsi dan Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

a. Model Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

Pengolahan data hasil studi dari jawaban yang diperoleh dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam angket tentang persepsi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia yang berupa angka-angka atau bilangan-bilangan dapat direkap sebagai berikut:.

Tabel 1.9.1
Data Nilai Distribusi Interval angket tentang Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

Responden	S	MS	KS	TS	Jml	4	3	2	1	Jml
1	12	3	0	5	20	48	9	0	5	62
2	13	1	3	3	20	52	3	6	3	64
3	8	4	5	3	20	32	12	10	3	57
4	14	1	0	5	20	56	3	0	5	64
5	2	11	4	3	20	8	33	8	3	52
6	12	2	1	5	20	48	6	2	5	61
7	12	0	0	8	20	48	0	0	8	56
8	5	9	3	3	20	20	27	6	3	56
9	8	5	0	7	20	32	15	0	7	54
10	13	2	0	5	20	52	6	0	5	63
11	8	7	2	3	20	32	21	4	3	60
12	8	4	1	7	20	32	12	2	7	53
13	11	5	0	4	20	44	15	0	4	63

14	4	11	4	1	20	16	33	8	1	58
15	13	1	0	6	20	52	3	0	6	61
16	7	6	3	4	20	28	18	6	4	56
17	10	4	2	4	20	40	12	4	4	60
18	6	8	5	1	20	24	24	10	1	59
19	1	9	7	3	20	4	27	14	3	48
20	9	6	2	3	20	36	18	4	3	61
21	9	6	2	3	20	36	18	4	3	61
22	9	5	2	4	20	36	15	4	4	59
23	10	4	2	4	20	40	12	4	4	60
24	9	6	0	5	20	36	18	0	5	59
25	2	6	7	5	20	8	18	14	5	45
26	8	7	0	5	20	32	21	0	5	58
27	8	5	5	2	20	32	15	10	2	59
28	7	7	3	3	20	28	21	6	3	58
29	7	8	2	3	20	28	24	4	3	59
30	8	6	4	2	20	32	18	8	2	60

Dalam hal ini kelas intervalnya ditentukan ada 4 yaitu sangat Baik/Sangat sesuai, Baik/Sesuai, Sedang/cukup, Kurang Baik/Jelek. Oleh karena itu dapat ditentukan sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan:
I = Interval kategori
R = Range
K = Kelas interval
Adapun untuk mengetahui R (range) digunakan rumus:
R = H – L
Keterangan:
R = *Range*
H = Skor tertinggi
L = Skor terendah

Dalam studi Persepsi Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia ini digunakan 20 item soal angket: 4*option* jawaban (nilai jawaban masing-masing item paling tinggi = 4 dan paling rendah =1)
20 x 4 = 80
20 x 1 = 20
Jadi R = 80 – 20
R = 60 Jadi hasil range adalah 60.

Setelah diketahui nilai R, maka sudah dapat dicari nilai kelas interval kategori:

$$I = \frac{R}{K} = \frac{60}{4} = 15$$

Setelah diketahui interval kelasnya, sehingga dapat ditentukan kelas interval kategorinya sebagai berikut:

Tabel 1.9.2
Prosentase Distribusi Kelas Interval persepsi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

No	Interval	Frekwensi	Prosentase	Keterangan
1	65 – 80	-	0	Sangat Baik
2	50 – 64	28	93,3%	Baik/sesuai
3	35 - 49	2	6,7%	Sedang/Cukup
4	20 – 34	-	0	Kurang/jelek
	Jumlah	30	100%	

Dari tabel diatas dapat dipaparkan bahwa persepsi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia dalam kategori Baik/Sesuai dengan prosentase sebesar 93,3% dan kategori sedang/cukup sebesar 6,7%. Adapun gambaran paparan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.9.1
Prosentase persepsi elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

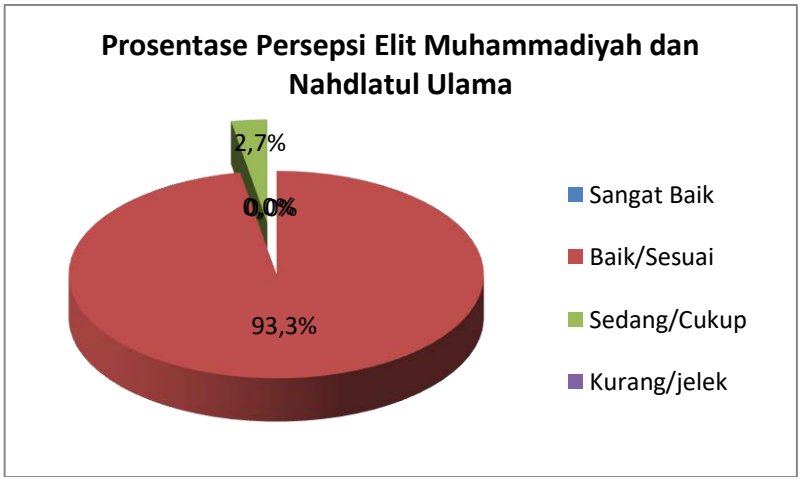

b. Model Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

Pengolahan data hasil studi dari jawaban yang diperoleh dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam angket tentang sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia yang berupa angka-angka atau bilangan-bilangan dapat direkap sebagai berikut:

Tabel 1.9.3
Data Nilai Distribusi Interval angket tentang Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

Responden	S	CS	KS	TS	Jml	4	3	2	1	Jml
1	4	1	1	9	15	16	3	2	9	30
2	7	0	1	7	15	28	0	2	7	37
3	6	1	1	7	15	24	3	2	7	36
4	3	1	2	9	15	12	3	4	9	28
5	1	3	6	5	15	4	9	12	5	30
6	5	0	2	8	15	20	0	4	8	32
7	6	0	1	8	15	24	0	2	8	34
8	3	4	3	5	15	12	12	6	5	35
9	6	0	4	5	15	24	0	8	5	37
10	4	1	2	8	15	16	3	4	8	31
11	7	0	0	8	15	28	0	0	8	36
12	5	0	2	8	15	20	0	4	8	32
13	5	2	0	8	15	20	6	0	8	34
14	5	2	5	3	15	20	6	10	3	39
15	4	1	2	8	15	16	3	4	8	31
16	0	5	5	5	15	0	15	10	5	30
17	2	6	2	5	15	8	18	4	5	35
18	7	2	5	1	15	28	6	10	1	45
19	3	3	7	2	15	12	9	14	2	37
20	1	3	1	10	15	4	9	2	10	25
21	1	5	5	4	15	4	15	10	4	33
22	1	3	1	10	15	4	9	2	10	25
23	4	4	1	6	15	16	12	2	6	36
24	4	3	0	8	15	16	9	0	8	33
25	5	3	0	7	15	20	9	0	7	36
26	4	4	1	6	15	16	12	2	6	36
27	0	8	1	6	15	0	24	2	6	32
28	3	3	5	4	15	12	9	10	4	35
29	4	2	6	3	15	16	6	12	3	37
30	4	3	0	8	15	16	9	0	8	33

Dalam hal ini kelas intervalnya ditentukan ada 4 yaitu sangat Baik/Sangat sesuai, Baik/Sesuai, Sedang/cukup, Kurang Baik/Jelek. Oleh karena itu dapat ditentukan sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :
I = Interval kategori
R = Range
K = Kelas interval

Adapun untuk mengetahui R (range) digunakan rumus:
R = H – L
Keterangan:
R = Range
H = Skor tertinggi
L = Skor terendah

Dalam studi Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia ini digunakan 15 item soal angket: 4 *option* jawaban (nilai jawaban masing-masing item paling tinggi = 4 dan paling rendah =1)
15 x 4 = 60
15 x 1 = 15
Jadi R = 60 – 15
R = 45 Jadi hasil range adalah 45.

Setelah diketahui nilai R, maka sudah dapat dicari nilai kelas interval kategori:

$$I = \frac{R}{K} = \frac{45}{4} = \mathbf{11,25 = 11}$$

Setelah diketahui interval kelasnya, sehingga dapat ditentukan kelas interval kategorinya sebagai berikut:

Tabel 1.9.4
Prosentase Distribusi Kelas Interval Sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

No	Interval	Frekwensi	Prosentase	Keterangan
1	48 – 60	-	0	Sangat Baik
2	37 – 47	6	20%	Baik/sesuai
3	26 - 36	22	73,3%	Sedang/Cukup
4	15 – 25	2	6,7	Kurang baik/jelek
	Jumlah	30	100%	

Dari tabel diatas dapat dipaparkan bahwa Sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia dalam kategori sedang/cukup baik dengan prosentase sebesar 73,3%, kategori baik/cukup sebesar 20% dan kategori kurang baik/jelek sebesar 6,7%. Adapun gambaran paparan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.9.2
Prosentase Sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

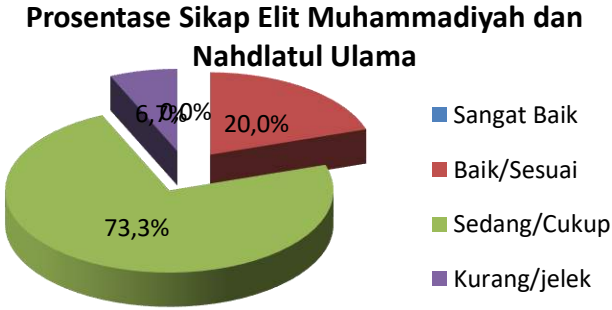

c. Model Persepsi dan Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

Pengolahan data hasil studi dari jawaban yang diperoleh dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam angket tentang persepsi dan sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia yang berupa angka-angka atau bilangan-bilangan dapat direkap sebagai berikut:.

Tabel 1.9.5
Data Nilai Distribusi Interval angket tentang Persepsi dan Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah terkait sikap pemberantasan radikalisme Islam di Indonesia

Responden	S	CS	KS	TS	Jml	4	3	2	1	Jml
1	16	4	1	14	35	64	12	2	14	92
2	20	1	4	10	35	80	3	8	10	101
3	14	5	6	10	35	56	15	12	10	93
4	17	2	2	14	35	68	6	4	14	92
5	3	14	10	8	35	12	42	20	8	82
6	17	2	3	13	35	68	6	6	13	93
7	18	0	1	16	35	72	0	2	16	90
8	8	13	6	8	35	32	39	12	8	91
9	14	5	4	12	35	56	15	8	12	91
10	17	3	2	13	35	68	9	4	13	94
11	15	7	2	11	35	60	21	4	11	96
12	13	4	3	15	35	52	12	6	15	85
13	16	7	0	12	35	64	21	0	12	97
14	9	13	9	4	35	36	39	18	4	97
15	17	2	2	14	35	68	6	4	14	92
16	7	11	8	9	35	28	33	16	9	86
17	12	10	4	9	35	48	30	8	9	95
18	13	10	10	2	35	52	30	20	2	104

19	4	12	14	5	35	16	36	28	5	85
20	10	9	3	13	35	40	27	6	13	86
21	10	11	7	7	35	40	33	14	7	94
22	10	8	3	14	35	40	24	6	14	84
23	14	8	3	10	35	56	24	6	10	96
24	13	9	0	13	35	52	27	0	13	92
25	7	9	7	12	35	28	27	14	12	81
26	12	11	1	11	35	48	33	2	11	94
27	8	13	6	8	35	32	39	12	8	91
28	10	10	8	7	35	40	30	16	7	93
29	11	10	8	6	35	44	30	16	6	96
30	12	9	4	10	35	48	27	8	10	93

Dalam hal ini kelas intervalnya ditentukan ada 4 yaitu sangat Baik/Sangat sesuai, Baik/Sesuai, Sedang/cukup, Kurang Baik/Jelek. Oleh karena itu dapat ditentukan sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan :
I = Interval kategori
R = Range
K = Kelas interval

Adapun untuk mengetahui R (range) digunakan rumus:

$$R = H - L$$

Keterangan:
R = *Range*
H = Skor tertinggi
L = Skor terendah

Dalam studi Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia ini digunakan 15 item soal angket: 4*option* jawaban (nilai jawaban masing-masing item paling tinggi = 4 dan paling rendah =1)

35 x 4 = 140
35 x 1 = 35

Jadi
R = 140 – 35
R = 105
Jadi hasil range adalah 105.

Setelah diketahui nilai R, maka sudah dapat dicari nilai kelas interval kategori:

$$I = \frac{R}{K} = \frac{105}{4} = \mathbf{26,25 = 26}$$

Setelah diketahui interval kelasnya, sehingga dapat ditentukan kelas interval kategorinya sebagai berikut:

Tabel 1.9.6
Prosentase Distribusi Kelas Interval Persepsi dan Sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

No	Interval	Frekwensi	Prosentase	Keterangan
1	113 – 140	-	0	Sangat Baik
2	87 – 112	23	76,7%	Baik/sesuai
3	61 - 86	7	23,3%	Sedang/Cukup
4	35 – 60	-	0	Kurang baik/jelek
	Jumlah	30	100%	

Dari tabel diatas dapat dipaparkan bahwa Persepsi dan Sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia sebesar 76,7% pada kategori Baik/sesuai dan 23,3% pada kategori sedang/cukup sesuai. Adapun gambaran paparan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.9.3
Prosentase Persepsi dan Sikap elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap Radikalisme Islam di Indonesia

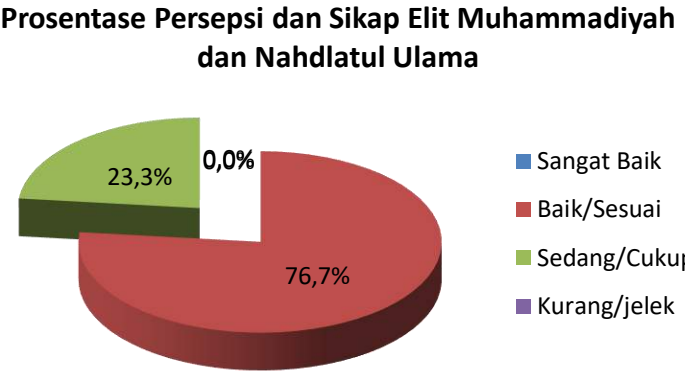

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data yang terkumpul melalui berbagai sumber dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara elit Muhammadiyah dan NU Jawa Tengah dalam memandang radikalisme di Indonesia. Kedua elit ormas Islam tersebut memandang bahwa radikalisme Islam telah ada sejak Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Meskipun tidak didukung oleh mayoritas Umat Islam, radikalisme Islam itu terus muncul dengan bentuk yang berbeda-beda. Elit Muhammadiyah dan NU juga memandang bahwa faktor politik, ekonomi, sentimen agama, kondisi psikologi si pelaku dan rendahnya pengetahuan agama telah menjadi faktor yang mendorong lahirnya radikalisme. Kedua elit ormas Islam tersebut juga memandang bahwa radikalisme tidak memiliki landasan dalam ajaran Islam, karena pada dasarnya Islam itu agama yang moderat. Elit Muhammadiyah dan NU Jawa Tengah juga memandang bahwa apa yang dilakukan oleh BNPT, Kementerian Agama, MUI dan Ormas-ormas Islam dalam rangka merespon radikalisme Islam di Indonesia sudah tepat. Langkah-langkah pencegahan harus lebih didahulukan dibanding langkah penindakan.

Ada perbedaan antara elit Muhammadiyah dan NU Jawa Tengah dalam menyikapi radikalisme di Indonesia. Terkait dengan alasan yang umumnya digunakan oleh mereka yang mendukung radikalisme, elit NU menunjukkan sikap ketidaksetujuan yang lebih tegas dibanding elit Muhammadiyah. Elit

NU juga menunjukkan sikap ketidaksetujuan yang lebih tegas terhadap cara-cara yang ditempuh oleh mereka yang melakukan tindakan radikal. Elit NU menunjukkan sikap persetujuan yang lebih tegas terkait dengan pemberantasan radikalisme di Indonesia dibanding elit Muhammadiyah.

B. Saran

Radikalisme Islam terbukti telah membawa bencana kemanusiaan dan terbukti membuat Islam bercitra buruk. Oleh karena itu radikalisme Islam harus menjadi musuh bersama umat Islam. Organisasi massa Islam sebagai wadah berhimpunnya umat Islam perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam proses pencegahan radikalisme Islam. Proses pencegahan bisa dilakukan dengan cara peningkatan pemahaman agama yang benar, peningkatan kesejahteraan umat dan melakukan deradikalisasi terhadap mereka yang sudah terpengaruh faham radikal.

Pemerintah perlu secara lebih serius menangani radikalisme Islam dengan memadukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan secara proporsional. Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menyebarluaskan pemahaman Islam yang rahmatan lil 'alamin melalui penerbitan dan penyebarluasan buku-buku keagamaan Islam yang memuat pandangan-pandangan yang moderat dan mempromosikan hidup harmoni. Sedangkan pihak aparat keamanan tidak perlu ragu untuk melakukan penindakan terhadap mereka yang terbukti telah melakukan tindakan kekerasan atas nama agama Islam.

DAFTARPUSTAKA

Abas, Nasir, Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Anggota JI. Jakarta: Grafido Khasanah Ilmu, 2005.

Abdullah, Amin, Studi Agama, Normatifitas atau Historisitas? Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Abdullah, Irwan, "Privatisasi Agama, Globalisasi Gaya Hidup dan Komodifikasi Agama di Indonesia" dalam Wacana, Jurnal Studi Islam, Vol. 2, No.1, 2002

Ahmed, Akbar S, Posmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi Islam. Terjemah M. Sirozi. Mizan: Bandung, 1993.

Arifin MT, Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1987.

Asy'arie, Musa, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an, Yogyakarta: LESFI, 1992.

Ayoub, Mahmoud M., "Akar-Akar Konflik Muslim-Kristen" dalam Ulumul Qur'an, No.4, Vol. IV, 1993

Azis, Abdul dkk, Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.

Azra, Azyumardi (1996). Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post-Modernisme. Jakarta: Paramadina.

----------, "Resonansi" dalam Harian Republika, Kamis, 1 September 2005

Bashari, Lutfi, Musuh-Musuh Besar Islam. Yogyakarta: Widhad Press, 2003

Basyaib, Hamid, "Perspektif Sejarah Hubungan Islam dan Yahudi" dalam Ulumul Qur'an, No. 4, Vol. IV, 1993

Bourdieu, Pierre, Language and Symbolic Power, Oxford: Polity Press, 1991.

Budiman, Arief, Teori-teori Pembangunan di Dunia Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Campbell, Tom, Tujuh Teori Sosial, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Chalim, Asep Saifudin, Membumikan ASWAJA, Pasuruan: Mawan, 2014.

Dekmejian, R. Hrair, Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World, New York: Syracuse University Press, 1985.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Bandung: PT Rosdakarya, 2011.

Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2005.

Eck, Diana L., A New Religious America: How Christian Country Has Become the World's Most Religious Diverse Nation, San Fransisco: Harper San Francisco, 2001

Esposito, John L., The Islamic Threat: Myth or Reality, New York: Oxford University Press, 1995.

Falk, Richard, "Geopolitik Penyingkiran Islam" (Kritik Atas Huntington), dalam Ulumul Qur'an, No.6/VII/1997.

Fanani, Zainuddin, Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Featherstone, Mike, Posmodernisme dan Budaya Konsumen, Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Galtung, Johan, Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban. Surabaya: Eureka, 2003.

Gaus AF, Ahmad, "Waspadai Isu Terorisme" dalam Perta, Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, Vol.4/No.2/2002.

Gibb, H.A.R. Aliran-aliran Moderen dalam Islam, Terjemah oleh Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Gunaryo, Achmad dkk, Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal dalam Pembelajaran PAI pada Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kota Semarang, Semarang: UIN Walisongo, 2011.

Hadimulyo, "Fundamentalisme Islam: Istilah yang Dapat Menyesatkan" dalam Ulumul Qur'an, No.3, Vol. 4, 1993.

Hambali, Yoyo, "Fundamentalisme dan Kekerasan Agama", Waters, Malcolm, Modern Sociological Theory. London: Sage Publication, 1994.

Hasan, M Noor, "Islam, Terorisme dan Agenda Global" dalam Perta, Vol.V/No.02/2002

Hassan, Riffat, "Mempersoalkan Istilah Fundamentalisme Islam", dalam Ulumul Qur'an, No. 5, Vol. 4, 1993.

Hidayat, Komaruddin, "Kata Pengantar" dalam Olaf H. Schumann, Menghadapi Tantangan. Memperjuangkan Kerukunan. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Imarah, Muhammad, Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam, Terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Jamhari dan Jajang Jahroni (Penyunting), Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Junaedi, Dedi, Konspirasi Dibalik Bom Bali: Skenario Membungkam Gerakan Islam. Jakarta: Bina Wawasan, 2005.

Karyono, Ribut, Fundamentalisme dalam Kristen – Islam, Yogyakarta: Kalika, 1997.

Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.

----------, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1997.

Lee, Robert D., Overcoming Tradition and Modernity: the Search for Authenticity, Colorado: Westview Press, 1997.

Lubis, Arbiyah, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Madjid, Nurcholish, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Jakarta: Paramadina, 1995.

----------, Islam Agama Peradaban, Mencari Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.

Mubarak, M. Zaki, Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 2008.

Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogyakarta: Rake Sarasin, 1990

Mukhlisin, Bahaya Radikalisme, http://icrp-online.org/112011/post-804.html, diakses 9 Maret 2012.

Nasir, Ridlwan dan Nur Syam, Istitusi Sosial di Tengah Perubahan, Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2004.

Nasution, Harun, Islam Rasional, Bandung: Mizan, 1995.

Paridah, Orang Bilang Ayah Teroris. Jakarta: Jazera, 2005

Peacock, James L., Muslim Puritans: Reformist Psychology in Southeast Asian Islam, Berkeley: University of California Press, 1978.

Polda Jawa Tengah, Dari Bali ke Jawa Tengah: Buku Putih Peran Polda Jawa Tengah dalam Pengungkapan Kasus Bom Bali, Jakarta: Pensil 324, 2004.

Pranata, Rudi "An Indonesianist's View of Islamic Radicalism" dalam Tempo, Pebruari15-21, 2005.

Qardhawi, Yusuf, Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya, ...

Qodir, Zuly, Sosiologi Agama: Esai-esai Agama di Ruang Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Rahman, Budi Munawar, Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Jakarta: Paramadina, 2004.

----------, Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya, Jakarta: Grasindo, 2010.

Rahman, Fazlur Islam and Modernity, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

---------- "Pendekatan terhadap Islam dalam Studi Agama" dalam Richard C. Martin, Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama. Terjemah oleh Zakiyuddin Baidlawi, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Ramli, Muhammad Idrus, Pengantar Sejarah Ahlussunnah Waljama'ah, Surabaya: Khalista-LTN PBNU, 2011.

Riddel, Peter G, "The Diverse Voices of Political Islamin Post-Suharto, 2002.

Ritzer, George, Sociological Theory, New York: Mc-Graw Hill Companies, Inc., 1996.

----------, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

----------, Contemporary Sociological Theory. New York: Mc-Graw Hill Companies, 1985.

Saleh, Abdul Rahman, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, Jakarta: Kencana, 2008.

Sarwono, Sarlito Wirawan, Pengantar Umum Psikologi, Jakarta: Bulan Bintang.

Sihbudi, Riza, "Islam, Radikalisme dan demokrasi" dalam Republika, 23-24 September 2004

Syam, Nur, Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam, Surabaya: Eureka, 2005.

----------, Islam Pesisir. Jogyakarta: LKiS, 2005.

Subangun, Emanuel, Dari Saminisme ke Pos-Modernisme. Jogyakarta: Alocita, 1995.

Susanto, Happy, "Menyoroti Fenomena Radikalisme Agama", 10/9/2003.

Syam, Nur Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam, Surabaya: Eureka, 2005.

Thaba, Abdul Aziz, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Thohari, Ahmad, "Resonansi" dalam Republika, 29 Agustus 2005.

Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Watt, William Montgomery, Islamic Fundamentalism and Modernity, London: T.J. Press (Padstow) Ltd, 1988.

Zada, Hamami, Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia. Jakarta: Teraju, 2002.

TENTANG PENULIS

Dr. H. NUR KHOIRI, M.Ag— lahir di Jepara pada 18 April 1974. Sekarang ia bertempat tinggal di Jl. Soekarno- Hatta KM 5,5 Rt.02/01 Langon Tahunan Jepara. Dari pernikahannya dengan Ulfah Turohmah, S.Ag ia dianugrahi empat anak (Wahid, Fahry, Widia dan Naela). Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh pertama kalinya di SD Negeri 1 Lebuawu Pecangaan Jepara (Lulus Th. 1987), dilanjut di SMP Negeri 1 Pecangaan Jepara (Lulus Th. 1990), kemudian di MA Walisongo Pecangaan Jepara (Lulus Th. 1997).

Ia kemudian melanjutkan kuliah S.1 jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Hasyim Asy'ari (UNHAS) Tebuiring Jombang, dan berhasil menyandang gelar Sarjana Agama (S.Ag) dengan predikat *cumloude* pada tahun 1997. Selesai itu, ia kemudian melanjutkan studi S.2, mengambil kuliah program Pascasarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya Program Studi Pendidikan Islam dan berhasil memperoleh gelar Master Agama (M.Ag), dengan menyandang predikat *cumloude* pada tahun 2000. Dan studi S.3 di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan nilai *cumloude* mengambil Menajemen Pendidikan pada tahun 2017.

Saat ini ia aktif menjadi Dosen Fakultas Sains dan Teknologi (FST) dan Dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Walisongo Semarang, dengan status

sebagai Dosen DPK pada INISNU Jepara tahun 2005 -2013. Ia juga mengajar di Program Pascasarja di UNISNU pada prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Di samping kesibukannya mengajar mahasiswa, ia banyak menulis karya-karya ilmiah yang termuat diberbagai jurnal ilmiah. Diantaranya adalah Mentalitas Komunitas Muslim dalam Pembangunan (Jurnal An-Nur, 2008), Peran Media Komunikasi Modern dalam Dakwah Islam (Jurnal An-Nida', 2010), Minat Masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi SMP dan MTs Negeri Maupun Swasta di Kabupaten Jepara (Jurnal Tarbawi INISNU Jepara, 2011), Aplikasi Strategi Ekspositori 'Studi Model dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak' (Jurnal Tarbawi INISNU Jepara, 2013), Revitalisasi dan Optimalisasi Manajemen Madrasah Sebagai Pendidikan Islam Menuju Pendidikan Alternatif (Jurnal Tarbawi, 2014). Ia juga banyak menulis berbagai buku, diantaranya yaitu Metode Penelitian Pendidikan (AKFImedia, 2012), Prototipe Pendidikan (Mahameru Yogyakarta, 2013), Metodologi Pembelajaran PAI (Mahameru Yogyakarta, 2013), Teknik Evaluasi Hasil Belajar PAI (Mahameru Yogyakarta, 2013).

Ia juga banyak melakukan berbagai kegiatan penelitian. Adapun penelitian yang pernah dibuatnya antara lain: Kualitas Pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Proses Demokratisasi dan *Civil Society* "Studi Deskriptif Analisis Di Kecamatan Kedung dan Pecangaan Kabupaten Jepara" (2004), Profil Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Jepara (2004), Mapping Sumber Daya Pendidikan Kabupaten Jepara (2005), Mentalitas Komunitas Muslim Dalam Pembangunan "Diskripsi Mentalitas Komunitas Muslim Dalam Melaksanakan Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Ajaran Islam Tentang Etos Kerja Dalam Pembangunan Daerah" (2005), Problematika *Droup Out* Di Jepara "Kajian Tentang Alternatif Pemecahan Masalah Putus Sekolah dan Penuluran Tamatan di Kabupaten Jepara" (2006), Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat Di Kecamatan Jepara Dan Karimunjawa (2006), Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Kabupaten Jepara (2007), Evaluasi Pelaksanaan Program *Decentralized Basic Education* (DBE) Kabupaten Jepara (2008), Studi Deskriptif Materi Dan Pola Pembelajaran Fiqih Pada Madrasah Al iyah (MA) Di Jawa Tengah (2009), Minat Masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bagi Siswa SMP dan

MTs Negeri Swasta di Kabupaten Jepara (2010), Aplikasi Pendekatan *Student Active Learning* (SAL) dalam Pembelajaran Fiqih "Studi Deskriptif pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di Jawa Tengah" (2011). Implementasi Model Cooperative Learning dalam Pembelajaran Fiqih Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Madrasah (2011), Tracer Study Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah INISNU Jepara (2012), Model Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Madrasah Aliyah NU Banat Kudus (2015)

Beberapa kegiatan sosial keagamaan yang pernah digelutinya, antara lain: Koordinator Bidang Forum Studi Pengembangan Daerah (2000-2003), Koordinator Bidang Lembaga Studi Pengembangan Daerah (2003-2008), Koordinator Tim Pemantau Independen (TPI) Ujian Nasional Kabupaten Jepara (2007-2010), Dewan Riset Daerah (DRD) Koordinator Bidang Sosial, Politik dan Budaya(2009-2013), Ketua I Komite Sekolah (2010-2015), Koordinator Bidang Kajian Kontemporer Lembaga Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Jepara (2010-2015), Sekretaris Umum Lajnah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Kabupaten Jepara (2010-2015), Sekretaris Umum Pengurus Yayasan NU Baiturrahman Langon, (2011-2016), Ketua Bidang Informasi dan Data Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Kabupaten Jepara (2011-2016), Pengawas Komite Sekolah di MIN Bawu Jepara (2017-2021), Wakil Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Jepara (2018-2022).

Kegiatan akademik berupa seminar, diklat dan workshop kepenulisan serta pengembangan keilmuan aktif selalu ia ikuti, baik di tingkat nasional maupun internasional. Diantaranya adalah "Publikasi Hasil Penelitian Melalui Jurnal Ilmiah Terakreditasi" (2012). *International Seminar on Enhancing Academik Literacy to Foster Conservation Values in Character Education* (2012), *International Conference on Islamic Dakwah* (2013), *Workshop Active Learning for Higher Education* (ALFHE) (2013), Workshop Penyusunan Desain Pengabdian Masyarakat bagi Dosen (2014), Workshop Pengembangan Keterampilan Penyusunan Penelitian Kuanti-tatif (2014), Training E-Learning (2014), Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ilmu Saintek (2015).

Kepala Madrasah Aliyah (Kontribusi Kepemimpinan, Iklim Organisasi, Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja) (2014), Model Kepemimpinan Transformasional Menuju Madrasah Berkualitas (2014), Effectiveness of Education Development Policy Model in the District of Jepara (2015).

Penulis pernah mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu sebagai Peneliti Penyaji terbaik I pada Pertemuan Nasional Jaringan Penelitian PTAI tahun 2007 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Malang (2007), dan Penyaji terbaik sepuluh besar proposal penelitian dalam Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Departemen Agama RI (2009). Penulis bisa dihubungi lewat email: *nur_khoiri@yahoo.co.id*, *nurkhoirijepara74@gmail.com*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – INDONESIA

UNITY IN DIVERSITY

SEAP
SOUTHEAST ASIAN PUBLISHING